

Penulis:
Dr. Siti Fatimah, M.H.
Drs. Toni Harsan, M.H.

PENDIDIKAN PANCASILA

Untuk Perguruan Tinggi



PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK PERGURUAN TINGGI

Oleh :

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.H.

Drs. Toni Harsan, M.H..



UNIVET
PRESS & PUBLISHING

PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK PERGURUAN TINGGI

Penulis : Dr. Siti Fatimah, S.H., M.H.
Drs. Toni Harsan, M.H..

Editor : Adhika Prasetya K, S.Sos., M.M.
M. Fathul Anwar, S.P, M.Si.

Lay Out & Setting : Mulyo Agung, S.I.Kom.

Desainer Cover : Ivan Prapanca Wardhana, S.Pd., M.Pd.

Diterbitkan oleh



UNIVET
PRESS & PUBLISHING

UNIVET PRESS

Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1
E-mail : adhika.kusharsanto@gmail.com

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada penulis

SAMBUTAN REKTOR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena pada kesempatan ini Buku yang telah dinanti nantikan ini telah bisa terwujud. Buku yang diberi judul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya untuk menanamkan kesadaran bela negara bagi setiap warga negara khususnya para mahasiswa. Di zaman sekarang, Pendidikan Tinggi dihadapkan pada berbagai tantangan. Ilmu Pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama di bidang Teknologi informasi. Banyak kegiatan dalam kehidupan mengalami gangguan karena adanya perkembangan teknologi. Universitas dan civitas akademisi perlu bersiap menghadapi kemajuan ini agar dapat merespon dengan bijak dan mengambil manfaat dari perkembangan teknologi tersebut, serta menghindari dampak negatifnya. Peningkatan pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat memaksa Pendidikan Tinggi untuk mengambil tindakan strategis agar perkembangan ini tidak merusak karakteristik lulusan Pendidikan tinggi Indonesia yang masih tetap memegang teguh nilai-nilai mulia bangsa. Institusi pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam penerapan nilai-nilai fundamental keagamaan dan kebudayaan, semangat nasionalisme, serta rasa cinta terhadap tanah air sepanjang hidup, untuk menciptakan lingkungan sekitar yang memungkinkan lulusan menjadi sukses dan siap menghadapi tantangan global dan memiliki pengertian yang lebih holistik terhadap berbagai bidang studi.

Semoga buku ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu membentuk orang Indonesia yang berperilaku baik, berpengetahuan, terampil, dan memiliki karakter Indonesia yang kuat serta berkontribusi terhadap kemajuan kehidupan negara. Semoga pula buku ini dapat menjadi inspirasi dan dapat dijadikan rujukan oleh yang lainnya, terutama kalangan akademisi dan semoga menjadi amal jariyah untuk kita semua. Aamiin.

Sukoharjo, 30 November 2023

Prof. Dr. Farida Nugrahani, M. Hum.

Rektor UNIVET BANTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya sehigga kami dapat menyusun Buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi ini. Dalam menyusun Buku ini kami mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa saran, petunjuk, ataupun yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu.

Buku ini di susun berdasarkan amanat Keputusan Diraktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan tinggi dan telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri.

Penyusun menyadari bahwa buku ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya, namun penyusun berharap buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan semoga dapat membeantu proses belajar mengajar. Krtitik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan guna evaluasi bagi buku ini.

Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sukoharjo, 30 November 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
Deskripsi	1
Panduan Belajar	3
Tujuan Akhir	4
Visi Pancasila	5
Misi Pancasila	5
BAB I PENGANTAR PANCASILA	7
Fenomena Permasalahan Bangsa	8
Tujuan Pembelajaran	8
Uraian Materi	8
Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila	19
Tujuan Pembelajaran	19
Uraian Materi	19
Penilaian Pembelajaran	24
Kunci Jawaban	29
Tindak Lanjut Pembelajaran	30
Referensi	31
Dakar Istilah	32
BAB II SEJARAH PERJALANAN PANCASILA	35
Sejarah Perjalanan Pancasila di Era Pra Kemerdekaan dan Era Kemerdekaan	38
Tujuan Pembelajaran	38
Uraian Materi	38
Sejarah Perjalanan Pancasila di Era Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi	58
Tujuan Pembelajaran	58
Uraian Materi	58
Penilaian Pembelajaran	73

	Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi	
vii	Dr. Siti Fatimah, S.H., M.H. & Drs. Toni Harsan, M.H.	
	Kunci Jawaban	76
	Tindak Lanjut Pembelajaran	77
	Referensi	79
	Dakar Istilah.....	81
BAB III	PANCASILA SEBAGAI DASARNEGARA I	83
	Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	84
	Tujuan Pembelajaran	84
	Uraian Materi	84
	Menilik Sumber Historis-Yuridis-Sosiologis Pancasila ..	89
	Tujuan Pembelajaran	89
	Uraian Materi	89
	Penilaian Pembelajaran.....	96
	Kunci Jawaban	100
	Tindak Lanjut Pembelajaran	101
	Referensi	102
BAB IV	PANCASILA SEBAGAI DASARNEGARA II	105
	Konsep, Esensi, dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar Negara.....	106
	Tujuan Pembelajaran	106
	Uraian Materi	106
	Penjabaran dan Implementasi Pancasila/Butir- Butir Pancasila.....	113
	Tujuan Pembelajaran	113
	Uraian Materi	113
	Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagi Dasar Negara 120	
	Tujuan Pembelajaran	120
	Uraian Materi	120
	Penilaian Pembelajaran.....	126
	Kunci Jawaban	129
	Tindak Lanjut Pembelajaran	130
	Referensi	133
	Dakar Istilah.....	134
BAB V	PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI I	137
	Hakikat Ideologi.....	138
	Tujuan Pembelajaran	138

Uraian Materi	138
Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Negara	143
Tujuan Pembelajaran	143
Uraian Materi	143
Penilaian Pembelajaran.....	147
Kunci Jawaban	150
Tindak Lanjut Pembelajaran	151
Referensi	152
Dakar Istilah.....	153
BAB VI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI II	155
Pancasila sebagai Ideologi Terbuka.....	156
Tujuan Pembelajaran	156
Uraian Materi	156
Pancasila Sebagai Ideologi Tengah Tanpa Oposisi	162
Tujuan Pembelajaran	162
Uraian Materi	162
Penilaian Pembelajaran.....	166
Kunci Jawaban	170
Tindak Lanjut Pembelajaran	171
Referensi	172
Dakar Istilah.....	173
BAB VII PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI III	175
Pancasila Sebagai Working Ideology	176
Tujuan Pembelajaran	176
Uraian Materi.....	176
Reaktualisasi: Tantangan Dan Kritik Ideologi Pancasila.....	180
Tujuan Pembelajaran	180
Uraian Materi	180
Penilaian Pembelajaran.....	188
Kunci Jawaban	192
Tindak Lanjut Pembelajaran	193
Referensi	194
Dakar Istilah.....	196
BAB VIII PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT	167
Tujuan Pembelajaran	197
Uraian Materi	197

	Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi	
x	Dr. Siti Fatimah, S.H., M.H. & Drs. Toni Harsan, M.H.	
	Penilaian Pembelajaran.....	204
	Kunci Jawaban.....	207
	Tindak Lanjut Pembelajaran.....	208
	Referensi	208
	Dakar Istilah.....	209
	BAB IX PANCASILA DALAM SUDUT PANDANG NILAI KEJUANGAN.....	211
	Tujuan Pembelajaran	211
	Uraian Materi	211
	Penilaian Pembelajaran.....	221
	Kunci Jawaban	224
	Tindak Lanjut Pembelajaran	225
	Referensi	225
	Dakar Istilah.....	227
	BAB X PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA	226
	Tujuan Pembelajaran	229
	Uraian Materi	229
	PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA	229
	Penilaian Pembelajaran.....	236
	Kunci Jawaban	240
	Tindak Lanjut Pembelajaran	241
	Referensi	241
	Dakar Istilah.....	242
	BAB XI PANCASILA DAN DEKADENSI MORAL.....	243
	Tujuan Pembelajaran	243
	Uraian Materi.....	243
	Penilaian Pembelajaran.....	268
	Kunci Jawaban	271
	Tindak Lanjut Pembelajaran	271
	Referensi	271
	Dakar Istilah.....	272
	BAB XII PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU	275
	Tujuan Pembelajaran	275
	Uraian Materi	275
	Penilaian Pembelajaran.....	282

Kunci Jawaban	286
Tindak Lanjut Pembelajaran	286
Referensi	286
Dakar Istilah.....	287

PENDAHULUAN

Deskripsi

Pancasila adalah salah satu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang diwajibkan di Perguruan Tinggi yang harus diikuti oleh mahasiswa. Implementasi Kebijakan Pendidikan Pancasila di jenjang perguruan tinggi mengalami perubahan dan fluktuasi yang berkelanjutan. Setelah reformasi tahun 1998, sebuah persepsi negatif muncul karena pada masa pemerintahan Orde Baru, Pancasila diinterpretasikan dengan cara yang politis agar kekuasaan dapat terus berlanjut. Tidak terdapat penjelasan mengenai kurikulum Pancasila di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor n Pada tahun 2003, Teks 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus mencakup pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Materi Pancasila kemudian diintegrasikan ke dalam isi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/Dikti/ Kep/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Dalam waktu berikutnya, melalui pengumuman resmi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. Dalam Teks 914/E/T/2011 mengenai Pelaksanaan Materi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, dijelaskan bahwa bagi Perguruan Tinggi yang belum menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Pancasila harus melakukan perkuliahan.

Seiring dengan munculnya regulasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 2, pendidikan tinggi di Indonesia perlu mengadopsi Pancasila sebagai dasar sistemnya. Artinya, pengaruhnya adalah bahwa setiap lembaga pendidikan tinggi di Indonesia harus terus memperkuat prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan mereka dan harus memberikan mata kuliah pendidikan Pancasila secara serius dan bertanggung jawab. Selain itu, aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat (5) mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus memasukkan mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia dalam kurikulumnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara mendorong pelaksanaan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dan menjadi mata kuliah tersendiri. Diharapkan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila ini akan membantu mahasiswa untuk lebih fokus dalam memperkuat pemahaman dan penghayatan mereka terhadap ideologi bangsa Indonesia yang dikenal dengan Pancasila. Pancasila sebagai pilar kepercayaan dikemukakan agar mempengaruhi dan membentuk karakteristik mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan profesional yang sesuai dengan bidang keilmuan di jurusan mereka. Pendidikan Pancasila dilengkapi dengan Buku untuk memudahkan dalam memahami materi. Buku Pendidikan Pancasila ini terdiri dari

tujuh BAB. BAB 1 merupakan Pengantar Pendidikan Pancasila. BAB 2 berisi tentang Sejarah Pendidikan Pancasila, sejak era Pra-Kemerdekaan sampai dengan era reformasi. Selanjutnya di BAB 3 berisi tentang Pancasila sebagai Dasar Negara. BAB 4 Tentang Pancasila Sebagai Ideologi Negara. Bab 5 memuat materi tentang Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. BAB 6 tentang Pancasila Sebagai Sistem Etika. Selanjutnya di BAB 7 tentang Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.

Panduan Belajar

Agar dapat mempelajari buku ini, Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- a. Silakan baca secara teliti bagian awal buku ini agar dapat memahami mengenai isi, tujuan, dan cara belajar dari buku ini. Harap periksa daftar isi sebagai panduan untuk memahami konten buku ini.
- b. Ikuti urutan buku ini dengan seksama guna mendapatkan pemahaman yang lengkap.
- c. Menguasai setiap konsep yang dibahas dalam buku ini dapat dilakukan dengan memahami setiap penjelasannya melalui pemikiran pribadi atau melalui diskusi dengan teman belajar, dosen, atau tutor.
- d. Perkuat proses belajar dengan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam melalui diskusi dalam kelompok kecil atau kelas selama kegiatan tutorial.
- e. Anda dapat menemukan daftar istilah di bagian akhir setiap BAB jika ada istilah yang tidak Anda pahami.

- f. Lakukan semua latihan soal pada setiap bagian bab, agar dapat mengevaluasi kemajuan belajar Anda. Jika terdapat hal yang tidak Anda ketahui, Anda bisa memperdalam pemahaman dengan mempelajari kembali isi dari bab yang terkait. Jika masih ada hal yang sulit, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada Dosen yang mengajar mata kuliah tersebut atau mencari referensi lain yang dianjurkan oleh Dosen. Penting untuk mendalami berbagai sumber bacaan lainnya, terutama yang dirujuk dalam referensi di setiap bagian. Dengan melihat sumber lain, Anda juga akan memperoleh pengetahuan ekstra.

Tujuan Akhir

Setelah menyelesaikan pembelajaran dalam Buku ini, diharapkan Anda akan memiliki pemahaman yang baik dan mampu mengungkapkan kembali konsep Pendidikan Pancasila. Tujuannya adalah agar Anda dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat, negara, dan bangsa yang positif, dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Ini bermakna bahwa mata kuliah Pancasila adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan *student centered learning*, dengan tujuan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam mengembangkan jiwa profesional mereka sesuai dengan program studi yang mereka ikuti. Selain itu, juga menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama (*guiding principle*) agar mahasiswa menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).

Pendidikan Pancasila memiliki tujuan dan prinsip yang ingin dicapai sebagai berikut;

Visi Pancasila

Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Misi Pancasila

- a. Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psiko pedagogis).
- b. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
- c. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural).
- d. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem
- e. pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (synthetic discipline),
- f. sebagai misi akademik
- g. (Tim Dikti dikutip Nurwardhani, dkk, 2016).

BAB I

PENGANTAR PANCASILA

Dalam bab pertama ini, teman-teman mahasiswa akan diarahkan untuk menggambarkan dan menjelaskan Konsep Pendidikan Pancasila di institusi pendidikan tinggi. Bab ini adalah pengenalan untuk memulai pembahasan di Buku Pendidikan Pancasila yang terdiri dari delapan bab. Bab ini mengundang mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang fenomena permasalahan yang dihadapi bangsa, yang merupakan dasar yang sangat penting dalam pendidikan Pancasila. Bab ini juga menjelaskan mengenai landasan, tujuan, serta dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam pendidikan Pancasila.

Bab 1 dirancang dalam dua aktivitas pembelajaran. Dua aktivitas pembelajaran tersebut direncanakan sejalan dengan urutan berikut ini:

- Kegiatan Belajar 1 : Fenomena Permasalahan Bangsa
- Kegiatan Belajar 2 : Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila

Kegiatan Belajar 1: Fenomena Permasalahan Bangsa

Tujuan Pembelajaran

Setelah Anda menjalani Kegiatan Belajar 1, diharapkan Anda mampu mengungkapkan berbagai fenomena permasalahan yang dihadapi oleh negara kita, yang menjadi dasar penting mengapa kita harus belajar dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.

Uraian Materi

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari beragam perbedaan. Sebenarnya, perbedaan ini menjadi ciri khas dari keragaman yang kemudian digabung menjadi kekayaan identitas bangsa yang bersatu. Pancasila, yang merupakan nilai-nilai dasar bagi bangsa Indonesia, ternyata mulai tergerus di tengah perkembangan zaman yang sangat cepat. Bangsa Indonesia, yang memang memiliki keberagaman dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama, merupakan penyebab utama dari tererosinya nilai-nilai Pancasila. Pancasila, yang sejak awal disusun oleh para pendiri negara sebagai landasan ideologi dan identitas bangsa, kini mengalami penurunan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan yang terlihat dalam kurangnya toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan menunjukkan adanya pengurangan nilai-nilai religius yang sudah lama ada. Masyarakat dengan mudah dapat terpengaruh dan terpisah-pisah. Berita palsu dan usulan yang

tidak benar dengan mudah menyebar dan diterima sebagai kebenaran. Tidak sulit menemukan penghinaan, penghinaan, dan kata-kata kasar di media sosial, bahkan ditunjukkan oleh orang-orang terkenal. Kepercayaan masyarakat tergerus oleh krisis moral dan kekurangan figur yang dapat menjadi teladan. Menonton acara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dapat merusak religiusitas.

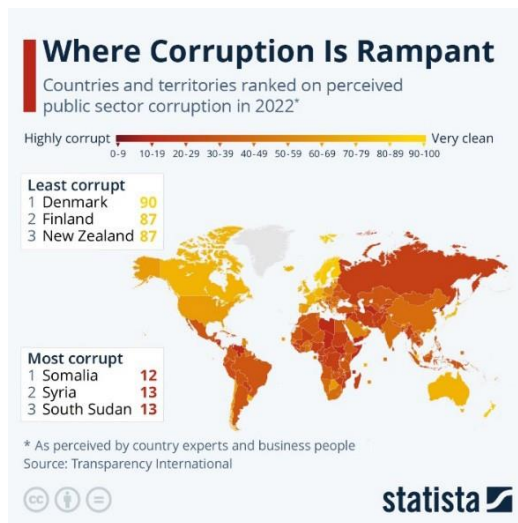
Tidak bisa dihindari, globalisasi membawa konsekuensi yang berpengaruh secara besar-besaran, baik dengan konsekuensi yang positif maupun negatif. Pancasila sebagai prinsip-prinsip utama harus berfungsi sebagai penghalang untuk mengurangi bahkan mencegah dampak negatif. Namun, pada kenyataannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara konsep yang ideal dengan praktik yang sebenarnya. Globalisasi mengakibatkan perbedaan sosial yang semakin meningkat. Hampir segala hal dapat diukur dalam bentuk nilai materi (Latif, 2018). Keadaban tidak lagi diprioritaskan.

Sistem demokrasi Pancasila yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari sering kali tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Dalam sistem demokrasi, hasilnya adalah adanya variasi dalam pendapat dan hal ini harus ditangani melalui diskusi yang bijaksana dan musyawarah. Akhirnya, keputusan tersebut menyuarakan kedaulatan rakyat guna kepentingan masyarakat. Pancasila sebagai panduan kehidupan bangsa tercemar oleh sejumlah masalah yang dihadapi oleh negara ini. Beragam masalah yang dihadapi oleh negara ini yang terlihat seperti:

a. Korupsi

Tahun 2022, skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia 38 dan berada di posisi 110 dari 180 negara. Indonesia berada di peringkat ke-6 di antara negara ASEAN, setelah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. Di tahun 2022, Denmark berada di tingkat pertama dengan perolehan skor 90, disusul oleh negara Finlandia dan New Zealand di tingkat kedua dengan skor 87. Sementara, Somalia masih berada di posisi terendah dengan perolehan skor 12 (Indonesia, 2023).

Ketika Korupsi Merajalela



<https://www.statista.com/chart/16834/countries-and-territories-ranked-on-perceived-public-sector-corruption/>

Menurut KBBI, korupsi merujuk pada tindakan melampaui dan menyalahgunakan dana negara (atau perusahaan dan sejenisnya) demi keuntungan diri sendiri

atau orang lain, serta memanfaatkan waktu kerja untuk kepentingan pribadi (<https://kbbi.web.id/korupsi>). Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan upaya luar biasa (extra ordinary effort) pula untuk memberantasnya. Oleh karena kejahatan korupsi ini mempunyai dampak yang sangat luas dan dapat merugikan berbagai aspek, maka diperlukan upaya pencegahan sejak dini (Sumaryati, dkk, 2019).

Terdapat 2 definisi korupsi yaitu tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:

Setiap individu yang tergolong melanggar undang-undang, melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, memberi keuntungan kepada diri sendiri, orang lain, atau perusahaan, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang dimilikinya berdasarkan jabatan atau posisi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tidak ada definisi perilaku koruptif yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Perilaku yang melibatkan sikap dan tindakan individu yang tidak bermoral dan cenderung memunculkan tindakan korupsi disebut perilaku koruptif. Salah satu contoh perilaku yang tidak pantas meliputi meniru, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, menyuruh orang lain mencatat

kehadiran, berbohong, dan sebagainya. Sikap seperti itu, jika terus-menerus dilakukan, akan secara perlahan membuat seseorang terbiasa dan bahkan mungkin mendorong untuk melakukan tindakan yang tidak pantas yang memiliki konsekuensi yang lebih serius, dan pada akhirnya dapat menyebabkan korupsi. Keberadaan Pancasila sebagai pedoman dasar bagi bangsa Indonesia, dapat menjadi ruh dalam pemberantasan korupsi, sehingga perilaku koruptif sedikit demi sedikit dapat dilumpuhkan (Sumaryati, dkk, 2019).

Integritas yang lemah adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik korupsi. Menurut KBBI, inti dari kata 'integritas' adalah kualitas, karakteristik, atau kondisi yang menunjukkan keseluruhan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk menunjukkan kekuatan dan kejujuran (<https://kbbi.web.id/integritas>). Orang yang memiliki integritas dicirikan dengan kualitas diri dan kualitas interaksi dengan orang lain seperti mematuhi peraturan dan etika organisasi, jujur, memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar, tanggung jawab, konsisten antara ucapan dan tindakan, kerja keras dan antikorupsi (Sumaryati, 2019). Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Maka, dengan melaksanakan prinsip-prinsip Pancasila diharapkan akan muncul individu yang jujur dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Korupsi akan menjadi meluas dikarenakan tindakan koruptif oleh para pejabat negara yang tidak diatur oleh aturan yang jelas dalam melaksa-

nakan tugas mereka. Para penyelenggara negara tidak mampu membedakan antara batasan yang dapat diterima atau tidak, tindakan yang pantas atau tidak, serta kebijakan yang baik atau buruk (*good and bad*) (Nurwardani, dkk, 2016).

b. Kesenjangan Sosial

Menurut definisi di KBBI, kesenjangan merujuk pada ketidak simetrisan atau ketidaksetaraan antara bagian kiri dan kanan, perbedaan yang signifikan, atau adanya pemisah yang mencolok. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang membentuk suatu sistem yang sebagian besar interaksinya terjadi di antara anggota-anggota kelompok tersebut. Kesenjangan sosial adalah situasi ketidakseimbangan sosial di dalam komunitas yang menyebabkan perbedaan. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat dapat memunculkan kesenjangan sosial yang tidak merata. Hal ini terjadi ketika individu dan kelompok yang dianggap penting mengalami perlakuan berbeda, terdapat perbedaan penilaian, dan diskriminasi berdasarkan posisi sosial dan gaya hidup. Selain itu, distribusi hak dan kewajiban juga tidak merata atau tidak adil dalam hal akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang ada (Najoan, dkk, 2017).

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka rasio gini berada pada kisaran 0,4%, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat konsumsi. Namun, ketidakseimbangan dalam pendapatan lebih besar, yaitu

sebesar 0,7 persen. Menurut Jusuf Kalla, ketidakadilan politik dan ekonomi menjadi penyebab utama berbagai konflik yang terjadi di Indonesia, bukan agama. Menurut Kalla, sepanjang masa kemerdekaan Indonesia, terjadi 15 konflik besar yang dipicu oleh ketidakadilan, terutama konflik antara daerah (Jaramaya, 2017). Penting bagi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mengedepankan perhatian pada disparitas ekonomi antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia. TNP2K mengklaim bahwa Indonesia memiliki kesenjangan yang menempati peringkat keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Separuh dari semua aset nasional di Indonesia dikuasai oleh satu persen dari populasi penduduknya. (Fida Ul Haq, 2019).

Kesenjangan Sosial



<https://tuankutosa.blogspot.com/2018/04/hakikat-bentuk-dan-faktor-penyebab.html>

c. Dekadensi Moral

Tingkat penurunan moral atau yang biasa dikenal dengan degradasi moral telah mencapai tingkat yang

membahayakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, degradasi moral memiliki makna sebagai hal yang menyebabkan seseorang atau suatu kelompok mengalami kemunduran, kemerosotan, atau penurunan moralnya. Dengan demikian, bisa dijelaskan bahwa degradasi moral adalah penurunan atau kehilangan nilai dan moral yang ada dalam sebuah komunitas. Untuk mengurangi penurunan moral, disarankan agar diselenggarakan sebuah program yang dapat mengajarkan nilai-nilai pendidikan kepada semua keluarga di Indonesia. Selain itu, perlu juga dibentuk aturan hukum yang lebih tegas bagi mereka yang melakukan tindakan penyimpangan yang serius di dalam lingkungan keluarga (Sukardi, 2017). Istilah lain yang serupa yang digunakan adalah penurunan moral atau keruntuhan moral. Generasi muda saat ini mengalami penurunan nilai moral yang mengkhawatirkan, yang berpotensi mengancam kelangsungan negara. Dekadensi moral terjadi ketika nilai-nilai globalisasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, namun justru nilai-nilai eksternal menjadi lebih dominan. Ada beberapa bentuk dekadensi moral yang dapat ditemukan dalam masyarakat, seperti penggunaan obat-obatan terlarang, kebebasan yang tidak terkendali, kurangnya penghargaan terhadap orang tua, berkurangnya integritas dan kejujuran, serta tindakan kekerasan di kalangan para pelajar. Semua itu menggambarkan kelemahan dalam sistem nilai moral. (Nurwardani, dkk, 2016). Dekadensi moral ini merupakan perilaku koruptif.



<https://maryloug-flaw.blogspot.com/2021/03/degradasi-moral-adalah-degradasi-moral.html>

Kelompok sosial yang kurang beruntung karena kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin memburuk, serta penurunan nilai moral, akan lebih rentan terhadap hasutan dan campur tangan dari pihak eksternal yang dapat menyebabkan keretakan dalam kesatuan bangsa.

d. Perilaku yang merusak lingkungan

Perusakan lingkungan alam terjadi ketika seseorang melakukan aktivitas yang mengakibatkan perubahan pada karakteristik fisik, kimia, atau biologis dari lingkungan hidup melebihi standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 16. Populasi manusia terus meningkat dan berdampak pada kondisi lingkungan. Dengan populasi manusia yang semakin bertambah, produksi barang konsumsi juga semakin meningkat, yang pada gilirannya menyebabkan rusak-

an terhadap lingkungan alam di sekitarnya. Begitu juga dengan produk yang dihasilkan, mereka menghasilkan limbah yang dibuang ke lingkungan. Dampak negatif terhadap lingkungan hidup disebabkan oleh limbah ini. dampaknya bagi lingkungan sekitar. Banyak orang yang acuh tak acuh terhadap Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).

Masalah sampah adalah serius karena dapat menghancurkan banyak aspek dalam kehidupan, termasuk lingkungan. Tiap tahun, Indonesia memproduksi sekitar 64 juta ton limbah. Tetapi menurut data Sustainable Waste Indonesia (SWI) tahun 2017, hanya 7 persen di antara angka tersebut yang berhasil didaur ulang, sedangkan 69 persennya masih terakumulasi di tempat pembuangan akhir (TPA). Selanjutnya, 24 persen sisanya dilemparkan secara sembarangan dan mengkontaminasi ekosistem, sehingga dianggap sebagai illegal dumping (Tim Publikasi, 2019).

e. Masalah Penegakan Hukum yang berkeadilan

Penegakan hukum bertujuan untuk mengubah nilai, ide, dan cita-cita yang abstrak menjadi tujuan yang konkret melalui berbagai tahapan proses. Cita hukum atau tujuan hukum mengandung prinsip-prinsip etika, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata (Rahardjo, 2009). Kendala dalam penegakkan hukum terletak

pada elemen-elemen yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri dari beberapa elemen, yaitu faktor hukum itu sendiri (peraturan-peraturan, pihak-pihak yang memberlakukan hukum), faktor yang mendukung penerapan hukum (infrastruktur dan fasilitas pendukung), faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku), dan faktor kebudayaan (hasil karya dan nilai-nilai yang dibangun dalam kehidupan sehari-hari) (Soekanto, 2014). Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Selain itu, budaya hukum masyarakat memegang peranan penting.

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, silahkan tuliskan kesimpulan yang Anda simpulkan di dalam buku catatan Anda. Setelah itu, proses pembelajaran dapat diteruskan dengan melakukan kegiatan belajar berikutnya.

Kegiatan Belajar 2: Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyimak materi Kegiatan Belajar 2, diharapkan Anda dapat menjelaskan kembali landasan dan tujuan dilaksanakannya Pendidikan Pancasila.

Uraian Materi

a. Landasan Pendidikan Pancasila

Perkembangan Pendidikan Pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi dikarenakan kebijakan perubahan kurikulum yang tidak stabil. Untuk tujuan parafrase, teks yang diberikan akan disesuaikan dengan format yang sama tetapi dengan kata-kata yang berbeda secara keseluruhan: "Undang-Undang Nomor n" dapat diubah menjadi "Regulasi No. n" atau "Peraturan No. n" Pendidikan nasional, menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan pendidikan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan tersebut juga berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan responsif terhadap perubahan zaman. Di Pasal 2 dalam undang-undang yang sama, dipaparkan kembali bahwa sistem pendidikan di negara ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. setelah itu munculnya peraturan perundang-undangan nomor n Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Perguruan Tinggi Pasal 2, pendidikan tinggi di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti bahwa semua upaya penyelenggaraan Pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ayat (5) dari Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menegaskan bahwa dalam kurikulum pendidikan tinggi, harus ada mata kuliah yang membahas agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa negara menginginkan agar pendidikan Pancasila dijalankan dan diwajibkan untuk termasuk dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang memiliki kekhususan tersendiri. Maksudnya, perguruan tinggi di Indonesia perlu terus meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kebijakan mereka serta mengadakan mata kuliah pendidikan Pancasila dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab (Nurwardani, dkk, 2016). Menurut peraturan perundang-undangan yang jelas, Pendidikan Pancasila harus diselenggarakan di Perguruan Tinggi sebagai mata kuliah yang terpisah, tidak digabungkan dengan mata kuliah Kewarganegaraan.

Pengembangan pendidikan Pancasila bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui pendekatan sejarah, sosial, dan hukum/politik. (Nurwardani, dkk, 2016). Secara historis, nilai-nilai Pancasila digali dari

bangsa Indonesia sendiri sebagai *causa materialis*nya, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan bangsa Indonesia. Pancasila melewati perjalanan sejarah yang panjang dari mulai zaman Kerajaan kerajaan sampai dengan disahkan di Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Negara. Sumber sosiologis meliputi nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendirinegara (Kaelan, 2000 dikutip Nurwardani, dkk, 2016). Sumber yuridis pendidikan Pancasila berdasarkan argumen bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum (*rechtsstaat*) dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rule of law*).

b. Tujuan Pendidikan Pancasila

Menurut peraturan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2), tujuan utama dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang termasuk dalam pengembangan kepribadian adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta memiliki pemahaman yang luas sebagai individu intelektual. Maksudnya adalah membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis,

bersikap rasional, dan dinamis, serta memiliki pemahaman yang luas sebagai individu dengan kecerdasan intelektual:

- a. untuk dapat memiliki kemampuan untuk bertindak dengan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dalam hati dan nurani seseorang
- b. untuk bisa mengidentifikasi permasalahan kehidupan dan kesejahteraan serta cara-cara mengatasi masalah tersebut
- c. untuk dapat mengidentifikasi perubahan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- d. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa, dengan tujuan untuk membangun persatuan di Indonesia.

Secara spesifik tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk :

- Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

(Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013).

Pancasila sebagai Dasar Filsafat negara diupayakan melekat erat dalam diri setiap warga negara Indonesia. Upaya sengaja keberadaan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi diharapkan sejalan dengan pembudayaan nilai-nilai Pancasila agar berakar kuat menjadi kepribadian tiap warganegara. Bung Hatta menyatakan bahwa apa yang diajarkan dalam proses Pendidikan adalah kebudayaan, sedangkan Pendidikan itu sendiri adalah pembudayaan. Pancasila merupakan titik temu yang menyatukan keragaman bangsa (Latif, 2018). Titik pertemuan ini akan menjadi penghalang bagi disintegrasi bangsa. Rusaknya nilai-nilai Pancasila akan menjadikan hilangnya kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang kaya dengan beragam budaya, agama, adat-istiadat, serta suku bangsa. Sehingga, untuk memperkuat persatu-

an bangsa, penting bagi kita untuk terus memelihara dan mendorong pendidikan serta pembentukan sikap yang menghormati nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertujuan agar kita dapat mencapai tujuan bersama, yakni memiliki negara yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, silahkan tuliskan kesimpulan yang Anda simpulkan di dalam buku catatan Anda. Setelah itu, proses pembelajaran dapat diteruskan dengan melakukan kegiatan belajar berikutnya.

Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Anda kerjakan soal berikut;

1. Apa definisi tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001...
 - a. Tindak pidana yang merugikan keuangan negara
 - b. Tindakan melampaui dan menyalahgunakan dana negara
 - c. Tindakan yang melibatkan sikap dan tindakan individu
 - d. Tindakan untuk memperkaya diri sendiri
2. Apa definisi perilaku koruptif....
 - a. Tindakan yang tidak pantas seperti berbohong dan meniru
 - b. Tindak pidana dan perilaku koruptif

-
- c. Tindakan melampau dan menyalahgunakan dana negara
 - d. Tindakan tidak bermoral dan cenderung memunculkan tindakan korupsi
3. Apa yang menjadi focus Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)...
- a. Disparitas politik dan ekonomi
 - b. Disparitas ekonomi antara kelompok kaya dan miskin
 - c. Disparitas sosial di dalam komunitas
 - d. Disparitas akses terhadap sumber daya
4. Apa hubungan antara dekadensi moral dan perilaku koruptif...
- a. Perilaku koruptif tidak berdampak pada dekadensi moral
 - b. Dekadensi moral merupakan perilaku koruptif
 - c. Perilaku koruptif menyebabkan dekadensi moral
 - d. Tidak ada hubungan antara keduanya
5. Apa yang dapat mengurangi penurunan moral...
- a. Kesetaraan sosial dan ekonomi
 - b. Pembentukan aturan hukum yang tegas
 - c. Program yang mengajarkan nilai-nilai Pendidikan kepada semua keluarga
 - d. Penggunaan obat-obatan terlarang
6. Apa yang dimaksud dengan degradasi moral...

- a. Penurunan atau kehilangan nilai dan moral dalam sebuah komunitas
 - b. Penyimpangan tindakan di dalam lingkungan keluarga
 - c. Kemunduran atau kemerosotan moral
 - d. Keretakan dalam kesatuan bangsa
7. Apa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan alam...
 - a. Penurunan populasi manusia
 - b. Pembuangan limbah ke lingkungan
 - c. Peningkatan produksi barang konsumsi
 - d. Perubahan pada karakteristik fisik, kimia, atau biologis lingkungan hidup
8. Apa yang di sebut dengan illegal dumping...
 - a. Pembuangan limbah di tempat pembuangan akhir
 - b. Pembuangan limbah yang dikontaminasi ekosistem
 - c. Pembuangan limbah secara sembarangan
 - d. Pembuangan limbah yang berhasil di daur ulang
9. Apa tujuan mempersiapkan mahasiswa dalam menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara...
 - a. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika

internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia

- b. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
- c. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- d. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

10. Apa tujuan revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila?

- a. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia
- b. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai per-

- soalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
- c. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 - d. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawabanyang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah iniuntukmenghitungnilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$

Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

1. A
2. D
3. B
4. B
5. C
6. A
7. D
8. C
9. B
10. C

Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah mempelajari materi di BAB ini dan sudah menyelesaikan soalnya yang diberikan, silahkan Anda membaca sumber lain yang ada di referensi. Anda juga dapat menyimak beberapa video di bawah ini untuk memperdalam pengetahuan Anda.

1. Penegakkan Hukum dan Delegitimasi Negara, dalam link berikut;
2. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/42-penegakan-hukum-dan-delegitimasi-negara>
3. Bagaimana Pembudayaan Pancasila, dapat Anda simak dalam link berikut;



<https://youtu.be/efKsVSXh7wg?si=sryP-4dUs9ardjIDG>



https://youtu.be/mnJOG5sZhRY?si=vbN-k2t0wH_vqTwtT

Referensi

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2013). Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Fida Ul Haq, Muhammad. (2019). Data Kesenjangan Indonesia: 1% Orang Kuasai 50% Aset Nasional.

Jaramaya, Rizky (2017). Jusuf Kalla: Ketidakadilan Ciptakan Kesenjangan Ekonomi.



<http://bit.do/fLwjh>

<https://republika.co.id/berita/olzcxf299/jusuf-kalla-ketidakadilan-ciptakan-kesenjangan-ekonomi>

Indonesia, T. I. (2023). *Corruption Perceptions Index 2022 - Transparency International Indonesia*. Ti.or.Id. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2022/>

Latif, Yudi. (2018). Wawasan Pancasila, Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan. Jakarta Selatan: Mizan.

Najoan, Bella, dkk (2017). Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat. e-journal "Acta Diurna" Volume VI. No. 3. Tahun 2017.



<http://bit.do/fLwjU>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/17375/16908>

Nurwardani, Paristiyanti, dkk. (2016). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Sukardi, Ratnawati. (2017). Pendidikan Nilai; Mengatasi Degradasi Moral Keluarga. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017 ISBN 978-602-19411-2-6.

Sumaryati, dkk (2019). Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Jakarta Selatan: Direktorat Pendidikan

dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Tim Publikasi. (2019). Menuju Indonesia Peduli Sampah,



<http://bit.do/fLwkd>

<https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a4c4a336e0/menuju-indonesia-peduli-sampah>

Daftar Istilah

MKWU

: Mata Kuliah Wajib Umum yang wajib ditempuh di Perguruan Tinggi terdiri dari mata kuliah Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia

Causa materialis

: Asal mula bahan. Pancasila yang sekarang menjadi ideologi negara bersumber pada bangsa Indonesia. Asal mula bahan Pancasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang ada di Indonesia.

Hoax

: berita bohong, berita tidak bersumber.

Globalisasi

: proses masuknya ke ruang lingkup dunia. suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia.

Corruptione Perception Index (CPI)

: Indeks Persepsi Korupsi adalah indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. Urutan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis

SKS

: Satuan Kredit Semester

<i>Gini Ratio</i> (koefisien gini)	: Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)	: ANDAL merupakan salah satu dokumen penyusun AMDAL, ANDAL merupakan bagian dari AMDAL itu sendiri yang memuat mengenai deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal, prakiraan dampak penting dan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (AMDAL)	: Kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan Illegal dumping

BAB II

SEJARAH PERJALANAN PANCASILA

Rekan mahasiswa, BAB kedua ini mengajak para mahasiswa untuk belajar tentang perjalanan sejarah Pancasila dari masa sebelum kemerdekaan hingga periode reformasi.

Pancasila yang dijadikan sebagai landasan negara Republik Indonesia adalah versi Pancasila yang disetujui oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Penetapan Pancasila sebagai landasan bagi negara mengalami perjalanan yang berliku dan memakan waktu yang lama. Banyak kejadian bersejarah dan tokoh sejarah yang berperan dalam perjalanan Pancasila sebagai landasan negara. Ada beberapa kegunaan dalam mempelajari sejarah perjalanan Pancasila, antara lain;

1. Pemahaman akan Pancasila sebagai fondasi negara telah ditetapkan secara resmi melalui pengandaian Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 paragraf keempat. Pancasila berasal dari prinsip-prinsip asli yang ada di dalam masyarakat Indonesia sebagai landasan ideologi.
2. Untuk melanjutkan catatan sejarah berikutnya, dalam upaya merealisasikan prinsip hukum dan moral bangsa seperti yang tercantum dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945, yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur.
3. Mempelajari masa lalu akan memungkinkan kita untuk

memahami adanya kesalahan yang telah terjadi dan tidak dapat dihapuskan dari rekaman sejarah. Kemudian, ada kebutuhan yang penting untuk memikirkan dan bertindak secara benar demi menghindari pengulangan kesalahan sejarah, yang akan berdampak buruk bagi Indonesia dan semakin menjauhkan kita dari pencapaian tujuan bangsa.

4. Memiliki pemahaman terhadap sejarah juga akan membawa kita pada keyakinan bahwa segala yang terjadi tidak bisa lepas dari keinginan Tuhan. Kemerdekaan diperoleh karena "...". Oleh karena berkat kemurahan Allah yang Maha Kuasa..., maka menjadi tugas kita sebagai ciptaan Allah dan sebagai bentuk pengamalan prinsip pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk bersyukur dan memanfaatkan kemerdekaan dengan tujuan mencapai cita-cita bangsa.
5. Mempelajari perjalanan sejarah Pancasila memungkinkan kita untuk mengenal yang terlibat dalam mengarahkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan apa kontribusi mereka. Adalah penting bagi kita untuk menghormati dan mengapresiasi serta mengambil contoh dari individu-individu yang telah berkontribusi dalam menjaga Pancasila sebagai landasan ideologi negara.
6. Dalam catatan sejarah, kebersamaan antara seluruh warga negara merupakan faktor utama yang membawa kita ke arah kemerdekaan Indonesia. Itu sebabnya, sangat penting untuk mencegah bangsa ini terpecah belah

sebagai bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, dengan tujuan menjaga kebulatan bangsa ini.

Bab 2 dirancang dalam dua aktivitas pembelajaran. Dua aktivitas pembelajaran tersebut direncanakan sejalan dengan urutan berikut ini:

- Kegiatan Belajar 1: Sejarah Perjalanan Pancasila di Era Pra Kemerdekaan dan Era Kemerdekaan.
- Kegiatan Belajar 2: Sejarah Perjalanan Pancasila di Era Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi

Kegiatan Belajar 1 : Sejarah Perjalanan Pancasila di Era PraKemerdekaan dan Era Kemerdekaan

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti Kegiatan Belajar 1 di BAB 2 ini, diharapkan Anda dapat mengenali, menjelaskan, dan mengevaluasi perjalanan Sejarah Pancasila sebelum dan setelah kemerdekaan.

Uraian Materi

a. Kapan istilah “Indonesia” mulai digunakan?

Asal usul nama Indonesia dapat ditemukan dalam artikel yang berjudul “Tentang Nama Indonesia” di buku “Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1927-1977)”. Dalam tulisan tersebut, perubahan penggunaan nama Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



b. Bagaimana awal mula sejarah Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara?

Pada bukunya yang berjudul "Pancasila Secara Ilmiah Populer", Notonagoro membahas mengenai asal mula dan faktor-faktor yang menjadikan Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara.

1. Pada awalnya, bangsa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber (*causa materialis*), yang terlihat melalui tradisi, budaya, dan keyakinan agama mereka.
2. Bung Karno, seorang anggota BPUPKI, bersama Bung Hatta, berperan sebagai pembentuk negara Indonesia. Mereka menjadi sumber ide (*causa formalis*) dan tujuan (*causa finalis*) untuk Pancasila sebagai dasar filosofi negara.
3. Sembilan orang yang termasuk anggota BPUPKI, termasuk kedua beliau tersebut, bekerja sama untuk merancang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila. Rancangan tersebut di kemudian hari diterima oleh BPUPKI dengan beberapa perubahan sebagai titik awal dari segi bentuk dan tujuan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara.
4. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan penyebab utama mengapa Pancasila menjadi dasar filsafat Negara. Sebelum PPKI menetapkannya, Pancasila hanya merupakan potensial calon dasar filsafat Negara..

Bangsa Indonesia sendiri sebagai asal mula bahan (*causa materialis*) Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Unsur-unsurnya telah terdapat di dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama yang ada di Indonesia. Kemudian diidentifikasi oleh para pendiri bangsa (*Founding Father*) dan diberi nama Pancasila, secara legal formal kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat Negara, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu di tanggal 18 Agustus 1945. Dengan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, bangsa Indonesia sebenarnya tidak lain daripada setia kepada diri sendiri, mengembangkan pribadi sendiri, dahulunya dalam adat kebiasaan, kebudayaannya, dan agama-agamanya ketika belum bernegara, dan sesudah bernegara juga dalam hidup kenegaraannya (Notonagoro, 1975).

Proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, tidak terlepas dari timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV dan ke V. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M (Kaelan, 2016) dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa (tiang batu).

Indikasi nilai-nilai dasar kebangsaan Indonesia pertama kali terlihat dalam sejarah pada abad ke VII, ketika kerajaan Sriwijaya didirikan di pulau Sumatra, dan kerajaan Majapahit muncul di Jawa Timur, bersama dengan berbagai kerajaan lainnya. Pergerakan nasional dalam bentuk kebangkitan bangsa Indonesia dilakukan oleh pejuang kemerdekaan sejak tahun 1908, dan kemudian secara resmi ditegaskan pada peristiwa

Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil mencapai hasil yang paling penting dalam perjuangannya untuk membangun negara Indonesia yang baru dengan dinyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, terjadilah peneguhan Pancasila sebagai landasan filosofi negara.

c. Bagaimana Nilai-nilai Pancasila di Zaman Kerajaan-kerajaan?

Kerajaan Kutai (Kalimantan Timur) adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai dapat merujuk pada dua kerajaan yang berbeda, yakni: Kutai Mulawarman/Martapura atau Kutai Kartanegara. Kutai Mulawarman adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Sementara Kutai Kartanegara adalah kerajaan yang pada akhirnya menaklukkan Kutai Martapura dan berubah menjadi Kesultanan Islam (Kerajaan Islam). Kutai Mulawarman/Martapura diperkirakan telah berdiri sejak kurang lebih tahun 400 Masehi. Kerajaan tersebut telah memiliki hubungan dagang dengan India, terbukti dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 Yupa (tiang batu) yang bertuliskan bahasa Sansekerta. Sansekerta adalah bahasa Hindu asli yang menggunakan aksara Palawa. Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan memberikan sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahma-

na membangun yupa itu sebagai tanda terima kasih kepada Raja yang dermawan (Ismaun, 1975, dikutip Kaelan, 2016). Prasasti tersebut memberikan gambaran masyarakat Kerajaan Kutai yang teridentifikasi sebagai zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menunjukkan nilai-nilai sosial politik dan Ketuhanan dalam bentuk kegiatan kerajaan berupa kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana. Munculnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha di Nusantara yang bertahan paling tidak hingga abad 15 M (Latif, 2012). Zaman Sriwijaya - Syailendra dari abad ke VII sampai abad ke XII, zaman Singosari - Majapahit dari abad ke XIII sampai abad ke XVI (Muhammad Yamin, 1958 dikutip Ismaun, 2005). Dua contoh kerajaan yang memiliki wilayah besar adalah Kerajaan Sriwijaya serta Kerajaan Majapahit. Kekuasaan Sriwijaya meliputi wilayah yang luas seperti Jawa, Sumatera, hampir seluruh semenanjung Malaka dan sekitarnya. Mulai dari abad ke 7, Sriwijaya telah menjadi kekuatan yang mengagumkan dalam perdagangan dan kebudayaan. Bahasa Melayu adalah bahasa yang sering digunakan.



Peta wilayah kerajaan Sriwijaya

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Srivijaya_Empire_id.svg

Tatanan kehidupan berbangsa di Kerajaan Sriwijaya sudah sedemikian rupa teratur. Bidang ekonomi ; yaitu mempersatukan pedagang, pengrajin dan pegawai raja yang disebut Tuha An Vatakvurah sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi, sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya (Kenneth R. Hall, 1976, dikutip Kaelan, 2016). Bidang politik ; terdapat pegawai yang mengurus pajak, harta benda kekayaan kerajaan, para rohaniwan yang menjadi pengawas pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci,

sehingga pada waktu itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Ketuhanan (Suwarno, 1993, dikutip Kaelan, 2016). Bidang agama dan kebudayaan; Sriwijaya di tahun 671 M menjadi pusat pendidikan Teologi agama Budha dengan mendirikan Universitas, yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Universitas Sriwijaya tercatat masih berdiri sampai tahun 1023. Salah satu guru besar yang mempunyai reputasi internasional adalah Dharmakirti (Widiyatmoko, 2015). Bidang kesejahteraan: tercermin dalam ungkapan berikut yang berbunyi: "Marvuat vanua criwijaya Siddhayatra subhiksa" yang artinya cita-cita negara yang adil dan makmur (Sulaiman, t.th, dikutip Kaderi, 2015). Sedangkan Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar (wilayah pantai) Nusantara, meluas ke arah Barat bagian tertentu Vietnam Selatan dan ke arah Timur sampai bagian Barat Papua (Mulyana, 2008, dikutip Latif, 2012).



Peta wilayah kerajaan Majapahit

https://en.wikipedia.org/wiki/Majapahit#/media/File:Majapahit_Empire.svg <http://bit.do/fLwxK>

Nilai-nilai keagamaan, agama Hindu dan Budha, hidup berdampingan secara damai. Salah satu wilayah kekuasaannya, Pasai telah memeluk agama Islam. Hal tersebut menggambarkan adanya sikap toleransi dalam beragama. Dari segi persatuan, dapat dikaji dari "Sumpah Palapa" yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada. Dalam hubungan dengan negara lain Raja Hayam Wuruk senantiasa mengadakan hubungan dengan baik, misalnya dengan kerajaan Tiongkok, Ayodya, Champa dan Kamboja. Dari segi nilai-nilai politik dan nilai musyawarah raja Hayam Wuruk telah memiliki penasehat di bidang pemerintahan (Kaderi, 2015).

Kemunculan Islam di jazirah Arab sejak abad ke 7 M perlahan merembeske Nusantara melalui pedagang-pedagang Muslim. Selain pedagang Arab juga para pedagang dari

India (Gujarat), Persia dan Cina yang membawabudayanya masing-masing (Latif, 2012). Berbagai kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak muncul. Sebagian besar agama Islam di Nusantara menyebar dengan cara yang damai, melalui kegiatan perdagangan dan pengaruh dari para penguasa yang sudah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, agama ini dapat diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik mereka.

d. Zaman Penjajahan Belanda

Portugal dan Spanyol, serta kemudian Belanda dan Inggris, berusaha menemukan jalur laut ke Timur dalam rangka mencari pusat perdagangan rempah-rempah. Pada masa itu, Eropa dikuasai oleh para pedagang Muslim, dimulai dengan penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah. Misi ekspedisi Bangsa Barat tidak hanya terbatas pada mendapatkan keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi juga memiliki tujuan lain yang dikenal dengan singkatan 3G (Gold, Glory, Gospel). Berburu Gold adalah upaya mencari kekayaan dan menghasilkan keuntungan melalui eksploitasi dan pengumpulan logam mulia seperti emas, perak, serta berbagai bahan berharga lainnya. Glory adalah istilah yang menggambarkan pencapaian gemilang, keunggulan, dan dominasi. Gospel adalah melaksanakan kegiatan yang dianggap sakral dengan tujuan memperluas penyebaran agama. Pada tahun 1511, kekuasaan atas wilayah Malaka jatuh ke tangan orang Portugis. Kemudi-

an, setelah armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Banten pada tahun 1596, armada lainnya juga menyusul. Pada tahun 1602, para kapal Belanda membentuk sebuah aliansi perdagangan yang dikenal sebagai Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. Kesatuan ini mengakhiri kompetisi antara perusahaan dagang Belanda. Selain itu, ini juga meningkatkan kesiapan Belanda untuk menghadapi saingannya, yaitu Inggris, Portugis, dan Spanyol (Isnaeni, 2015). VOC tidak hanya merupakan sebuah perusahaan dagang, tetapi juga diberikan hak istimewa oleh Pemerintah Belanda seperti; kontrol penuh atas perdagangan, mengeluarkan mata uang, bertindak sebagai perwakilan pemerintah Belanda di wilayah Asia, memiliki administrasi terpisah, menjalin perjanjian dengan penguasa lokal, memiliki yurisdiksi hukum, mengumpulkan pendapatan pajak, memiliki pasukan militer, dan berwenang untuk menyatakan perang. Itulah sebabnya, VOC secara sering disebut sebagai "suatu entitas yang beroperasi secara independen di dalam suatu negara." VOC mengalami kejatuhan pada abad ke-18, dan kekuasaan di wilayah Nusantara kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Tindakan perlawanan oleh penduduk berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia, perlawanan terjadi dalam skala regional dan tidak dilakukan secara bersamaan. Ini adalah salah satu alasan mengapa perlawanan bisa dengan mudah dihancurkan dan akibatnya penjajahan

berlangsung dalam waktu yang lama. Berbagai upaya perlawanan terhadap penjajahan telah terjadi di berbagai wilayah. Misalnya, di Maluku, perlawanan dipimpin oleh Pattimura pada tahun 1817. Sementara itu, di Palembang perlawanan dipimpin oleh Baharuddin pada tahun 1819. Di Minangkabau, Imam Bonjol memimpin perlawanan dari tahun 1821 hingga 1837. Di Jawa Tengah, perlawanan dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 hingga 1830. Di Aceh, Teuku Umar dan Teuku Tjik di Tiro dan Panglima Polim memimpin perlawanan pada tahun 1860. Kemudian, Anak Agung Made memimpin perlawanan di Lombok pada tahun 1894-1895. Di Tanah Batak, perlawanan dipimpin oleh Sisingamangaraja pada tahun 1900. Selain itu, terdapat perlawanan di tempat-tempat lainnya.



e. Kebangkitan Nasional sebagai Titik Tolak Kebangkitan Bangsa

Kumpulan Pelajar Indonesia di Belanda mendirikan Indische Vereeniging (IV) tahun 1908 merupakan pembuka jalan bagi kebangkitan nasional (Latif, 2012). Pada tahun 1924, Perhimpunan

Indonesia (PI) didirikan oleh Indische Vereeniging. Salah satu tokoh utamanya adalah Moh. Hatta adalah nama seorang individu yang tidak memiliki nama keluarga. Pada tanggal 20 Mei 1908, terjadi sebuah Gerakan Kebangkitan Nasional di Indonesia yang dimulai oleh dr. n Wahidin Sudirohusodo bekerja sama dengan Budi Utomo dalam suatu organisasi.

Kemudian, muncul banyak organisasi masyarakat dan politik yang berdiri. Pada tahun 1909, didirikan Serikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian mengalami perubahan menjadi Gerakan Politik dengan mengubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911. Organisasi ini dipimpin oleh H.O.S Cokroaminoto. Pada tahun 1913, terbentuklah Indische Partij yang diprakarsai oleh tiga tokoh utama, Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1912, KH.Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah yang bertujuan untuk mengenalkan masyarakat dengan berbagai lembaga sosial seperti sekolah, klinik, rumah sakit, dan sejenisnya. Kemudian, terbentuklah organisasi serupa yang disebut Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926. NU menyelenggarakan kegiatan yang berfokus pada bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Soekarno adalah partai politik Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Ir. Soekarno merupakan salah satu tokoh yang turut memimpin pendirian partai ini. Beberapa tokoh yang terkemuka seperti Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan beberapa tokoh lainnya.

Pengikut PNI membubarkan partai tersebut pada tahun 1931 dan menggantinya dengan Partai Indonesia yang juga dikenal sebagai Partindo. Hatta, yang merupakan salah satu pendiri partai politik tersebut. PNI Baru dibentuk sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang menguasai Indonesia pada saat itu. Hatta adalah penduduk desa St. Syahrir menyatakan bahwa Indonesia harus mencapai kemerdekaannya tanpa bantuan dari pihak lain. (Thoyibi, 1997 dikutip Kaelan, 2016).

f. Gema Sumpah Pemuda

Moh. Yamin menyatakan dengan tegas bahwa bangsa Indonesia dilahirkan pada 28 Oktober 1928 (Ali, 2012). Puncak Gerakan kebangkitan nasional adalah ketika para pemuda dari berbagai kelompok dan daerah memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang isinya yakni ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu: Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun dua tahun sebelumnya telah dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 (Sudibyo, 1989).

Naskah Sumpah Pemuda

<https://imada.files.wordpress.com/2012/10/teks-sumpah-pemuda.jpg>

g. Zaman Penjajahan Jepang

Pada bulan Januari 1942, dimulailah pendudukan Jepang. Jepang datang dengan menggambarkan dirinya

sebagai figur yang lebih tua dan berjanji akan memberikan kebebasan. Impresi tersebut dipresentasikan melalui pembebasan narapidana politik, izin untuk mengibarkan bendera Merah Putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sebelumnya dilarang oleh pemerintah Belanda. Menurut Latif (2012), penjajahan Jepang di Indonesia dikenal dengan kekejamannya dan penderitaan yang ditimbulkan bagi rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain, program-program kemiliterannya juga memberikan peluang untuk tumbuhnya semangat nasionalisme Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, didirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Choosakai. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1945, badan tersebut diresmikan dengan tugas utamanya yaitu menyelidiki persiapan-persiapan yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

h. Sidang BPUPKI 1, Lahirnya Pancasila

Masa persidangan pertama, dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945, (4 hari). Dengan pembahasan dititik-beratkan pada landasan filosofi, yakni dasar negara Indonesia. Sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni, lebih dari 30 pembicara terlebih dahulu mengemukakan pandangannya (Latif, 2018). Tokoh pertama yang tampil untuk menyampaikan konsep dasar negara adalah Mr. Mohammad

Yamin. Dalam pidatonya beliau telah menyampaikan rumusan yang terdiri atas lima dasar, yaitu:

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan .
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Peri Kesejahteraan.

Namun usulan tersebut mengalami perubahan saat beliau menyampaikannya secara tertulis, sebagaimana berikut ini:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia.
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada sidang hari kedua (tanggal 30 Mei 1945) tokoh yang tampil diantaranya Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wahid Hasyim (dua orang tokoh muslim), mereka mengusulkan agar yang menjadi dasar negara Indonesia adalah ajaran Islam, namun mereka tidak menyampaikan sesuatu rumusan sebagai tindak lanjutnya. Kemudian pada sidang hari ketiga (tanggal 31 Mei 1945), tokoh yang tampil sebagai pembicara utama adalah Prof. Mr. Soepomo. Beliau mengemukakan lima Dasar negara Indonesia adalah:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin.
4. Musyawarah.
5. Keadilanrakyat.

Pada hari terakhir masa persidangan pertama (tanggal 1 Juni 1945) tokoh yang tampil menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia adalah Ir. Soekarno (Bung Karno). Beliau mengusulkan rumusandasar negara tersebut diberi nama Pancasila, yang berisikan sila-silasebagai berikut:

1. Kebangsaan – Nasionalisme.
2. Peri kemanusiaan – Internasionalisme.
3. Mufakat – Democratie.
4. Keadilan Sosial.
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima sila itu diberi nama Pancasila.

Setelah mendapatkan laporan dari para tokoh yang telah memberikan pemaparannya, sebuah tim yang disebut “Panitia Kecil” dibentuk. Tim ini terdiri dari 8 orang (Panitia 8) yang bertanggung jawab untuk merangkum dan mencatat semua rumusan dan usulan yang telah disampaikan selama persidangan pertama. Pada tanggal 22 Juni 1945, anggota baru Panitia 8 mengadakan pertemuan dengan para anggota BPUPKI yang dihadiri oleh 38 anggota. Dalam pertemuan bersama tersebut, berhasil pula dibentuk sebuah panitia yang terdiri dari

sembilan orang anggota yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, seorang tokoh Indonesia yang penting. The 9th committee successfully assembled a "Draft of the Introduction to the Fundamental Law," which was later approved by Mr. Moh Yamin dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter". Dalam pandangan Soekiman, istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep ini adalah "Perjanjian Kesepakatan yang Terhormat." Perumusan Dasar Negara yang terdiri atas lima macam atau lima sila, yaitu:

1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

i. Sidang BPUPKI 2, Pembahasan Undang-undang Dasar

Sesi kedua persidangan berlangsung selama tujuh hari, dimulai pada tanggal 10 Juli 1945 dan berakhir pada tanggal 16 Juli 1945. Teks ini membahas tentang pokok-pokok dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia. Sidang memutuskan isu-isu yang dipaparkan berikut ini;

1. Pernyataan Indonesia merdeka.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar (disepakati dari

Piagam Jakarta), dan

3. Undang-Undang Dasar (Batang Tubuhnya).

j. PPKI dan Proklamasi Kemerdekaan

Perubahan politik tersebut terjadi setelah Jepang kalah perang terhadap sekutu. Kejadian tersebut dicirikan dengan terjadinya ledakan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang mengakhiri BPUPKI dan pada saat yang sama mendirikan sebuah komite yang dikenal sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritu Junbi Iinkai dengan kepala komite Ir. Soekarno adalah seorang tokoh berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu tanpa mengajukan syarat apapun. Dampaknya adalah daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang sekarang berpindah ke tangan Sekutu, termasuk Indonesia. Para tokoh nasional tidak melewatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kekosongan kekuasaan saat terjadi peralihan kekuasaan. Sejumlah tokoh muda memastikan keamanan Soekarno dan Moh. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB, Soekarno, Hatta, dan Mr. serta para tokoh tua lainnya sepakat di Rengasdengklok, Karawang. Achmad Subardjo berbicara dengan kelompok generasi muda mengenai kapan pelaksanaan proklamasi akan terjadi. Pembuatan teks proklamasi juga dilakukan oleh

Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo, dan disaksikan oleh Soekarni, BM Diah, Sudiro, dan Sajuti Melik sampai mencapai kesepakatan. Titik puncak dari perjuangan bangsa Indonesia terjadi ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perlambang tersebut terjadi pada hari Jumat pukul 10.00 WIB selama bulan Ramadhan, dan berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur No. n Pada tahun 56 di Jakarta.



Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Proklamasi.png>

k. Sidang PPKI

Satu hari setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat untuk menentukan dan memperkuat posisi bangsa.

Indonesia mengalami perubahan dari negara yang dulu dijajah menjadi negara yang merdeka. Keputusan-keputusan yang signifikan yang dihasilkan meliputi aspek-aspek berikut:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD 1945) yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta).
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimedjo (Nurwardani, dkk, 2016).

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, berbeda dengan Piagam Jakarta di Sila Pertama untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat.

Dari penjabaran yang telah diberikan diatas, mohon tuliskan rangkuman mengenai perjalanan Pancasila dari masa sebelum kemerdekaan hingga saat kemerdekaan. Silahkan catat hal tersebut di dalam buku catatan Anda. Lanjutkanlah pembelajaran dengan mengikuti kegiatan belajar selanjutnya.

Kegiatan Belajar 2 :

Sejarah Perjalanan Pancasila di Era Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan Kegiatan Belajar 2 pada BAB 2 ini, diharapkan Anda dapat memaparkan dan mengkaji perkembangan Sejarah Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Uraian Materi

a. Era Orde Lama

Masa setelah Kemerdekaan Republik Indonesia dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah waktu di mana Presiden Soekarno memerintah dari tahun 1945 hingga 1968. Pengoperasian sistem pemerintahan belum efektif karena menghadapi gangguan baik dari pihak eksternal maupun internal negara. Belanda berusaha mendapatkan kembali kendali atas Indonesia melalui berbagai upaya. Agresi Belanda yang terjadi berlangsung selama kurang lebih 4 tahun.

Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali bertransformasi menjadi negara kesatuan setelah sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Transformasi negara dari Negara Serikat menjadi Negara Kesatuan tidak ditemani oleh

penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan memunculkan sebuah konstitusi baru yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Permasalahannya ialah ketika Indonesiakembali Negara Kesatuan, ternyata tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menimbulkan persoalan kehidupan bernegara di kemudian hari (Nurwardani, 2016. Indonesia pernah membuat keputusan resmi. Terdapat beberapa jenis sistem pemerintahan yang dapat ditemui, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan pemerintahan demokrasi yang dipimpin. Situasi ini telah menghasilkan ketidakstabilan politik di dalam negara, bahkan menyebabkan terbentuknya dan bubar nya Kabinet yang berakibat buruk bagi kedaulatan negara.

b. Dekrit Presiden

Menurut Konstitusi Sementara 1950, diadakan pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955. Pada proses Pemilu ini, tujuannya adalah untuk membentuk dua badan perwakilan yang berbeda, yaitu Badan Konstituante yang bertanggung jawab dalam pembuatan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, serta DPR yang berperan sebagai lembaga parlemen. Pada tahun 1956, pertemuan Badan Konstituante dimulai di Bandung dengan tujuan merumuskan Undang-Undang Dasar yang definitif sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sebetulnya sudah banyak pasal-pasal yang

diatur, tetapi sidang terus berlanjut dan membahas ulang landasan negara. Tugas Konstituante untuk merumuskan dan membentuk UUD yang tetap bagi negara RI terbukti tidak berhasil. Oleh karena berbagai pertimbangan di atas, Presiden mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, yang berisi sebagai berikut:

1. 1. Membubarkan Konstituante.
2. 2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945. Serta tidak lagi diberlakukannya kembali UUD 1950.
3. 3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Setelah Dekrit Presiden ini, maka UUD 1945 kembali berlaku di Negara Republik Indonesia hingga sampai saat ini.

c. Beberapa penyimpangan di Era Orde Lama

Sesudah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945;

Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup melalui TAP No. III/ MPRS/1960 menjadi salah satu contoh pelanggaran yang terjadi pada masa pemerintahan orde lama. Ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 UUD 1945. Presiden memutuskan untuk menghentikan DPR yang terpilih dalam pemilu tahun 1955 dan kemudian mendirikan DPR-GR tanpa mengadakan pemilihan kembali. Pada saat ini, Presiden memiliki tingkat pembatasan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan

dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945. Pada masa tersebut, Presiden Soekarno memegang jabatan paling tinggi yang memiliki wewenang atas ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA yang pada saat itu diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi menteri di dalam kabinetnya. Di zaman ini, ideologi yang menyimpang merusak citra saat ini adalah dengan menerapkan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom), terutama pada tahun 1960-an yang bahkan lebih diminati daripada Pancasila. PKI adalah partai komunis Indonesia yang mewakili ideologi komunis. Mereka adalah partai dengan peringkat keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU dalam Pemilu pertama pada tahun 1955. Indonesia menjadi bagian dari konstelasi kekuasaan global dengan terlibat dalam poros politik Jakarta-Moskow-Peking, yang berlawanan dengan prinsip politik bebas aktif. Sebagai akibat dari diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, Indonesia juga mengambil keputusan untuk meninggalkan PBB. Keputusan ini diambil saat Indonesia sedang menghadapi konflik dengan Malaysia.

Paham komunis yang disebarkan oleh Organisasi PKI telah tersebar secara luas di Indonesia. Peristiwa yang mencapai puncaknya adalah aksi yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965. Kondisinya sudah sangat mendesak, baik dari segi perekonomian maupun politik. Protes yang mengecam keberadaan PKI semakin meningkat, tetapi pemerintah tidak dengan cepat meresponsnya. Hal ini menyebabkan pada tanggal

12 Januari 1966, demonstrasi semakin meluas dengan munculnya Tritura, yang berisi;

1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya,
2. Perombakan kabinet Dwikora,
3. Turunkan harga pangan.

Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan pengumuman tentang perombakan kabinet. Di dalam kabinet tersebut, terdapat para pendukung PKI yang duduk. Kalimat ini mendorong mahasiswa untuk meningkatkan aksi demonstrasi mereka lagi.

d. Era Orde Baru

11 Maret 1966 lahir Surat Perintah Sebelas Maret (supersemar) yang ditandatangani Presiden Soekarno dan berisi instruksi kepada Letjen Soeharto. Instruksi tersebut menyatakan bahwa Letjen Soeharto selaku Menpangab (menteri panglima angkatan darat) untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu dalam mengawal jalannya pemerintahan saat itu. Tugas pokok pemegang Supersemar, adalah memulihkan keamanan dan ketertiban negara, melakukan tindakan terhadap pengacau keamanan, yang dilakukan oleh PKI beserta ormas-ormasnya, serta membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya, sekaligus mengamankan 15 orang Menteri yang duduk dalam Kabinet Orde Lama, yang kesemuanya terindikasi terlibat dengan G. 30 S PKI dan lain-lain (Mardoyo, 1978,

dikutip Kaderi, 2015).

Secara perlahan, kepemimpinan negara mulai berubah menuju periode Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang memperoleh kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret. Jenderal Soeharto dinyatakan sebagai pejabat presiden setelah Presiden Soekarno tidak dapat bertanggung jawab lagi menurut keputusan MPRS. Lalu, Soeharto dipilih sebagai presiden sesuai dengan keputusan Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada tanggal 27 Maret 1968 mengenai Penunjukan Pelaksana Ketetapan MPRS No. n IX/1966 sebagai Presiden RI, juga menetapkan bahwa masa kepresidenan ini berlangsung selama lima tahun, dari tahun 1968 hingga 1973, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.

e. Beberapa penyimpangan di Era Orde Baru

Pancasila di masa Orde Baru merupakan ideologi yang sengaja didesain menjadi ideologi yang bersifat state-centered theory yang diterapkan dalam kerangka bagaimana agar masyarakat patuh dan tunduk (Rachman, dkk, 2012). Pancasila diartikan sama dengan rezim Orde Baru, dan digunakan untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR No. II/1978 tentang Pemasalahan Nilai-Nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadilandakan bagi dilaksanakannya penataran Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila (P-4) atau Eka Prasetya Pancakarsa bagi semualapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru (mono tafsir ideologi) yang berkuasa pada waktu itu (Nurwardani, 2016).

Pemerintahan yang tersentral dan lama, serta budaya yang dibangun “Asal Bapak Senang” membuat lingkaran kekuasaan dan kroni-kroninya serta sistem birokrasi banyak yang terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Power tends to corrupt, Absolute power corrupts absolutely (Lord Acton, 1833-1902). Kebijakan ekonomi cenderung mendukung sektor swasta secara signifikan, yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan bagi kelompok tertentu dan memperbesar kesenjangan sosial-ekonomi. Selain itu, masalah lainnya adalah proses pemilihan umum yang kurang menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Presiden memiliki pengaruh terhadap pengangkatan anggota organisasi politik, persetujuan dari presiden diperlukan untuk mengisi posisi kepemimpinan partai politik. Suatu karakteristik yang ditunjukkan oleh negara yang berpegang teguh pada prinsip demokrasi adalah keberadaan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, perlindungan hak asasi manusia dirasakan kurang mendapat perhatian yang cukup. Selanjutnya, sebagai tindakan kebijakan politik pada era Orde Baru, kebebasan media mengalami pembatasan.

f. Era Reformasi

Era Reformasi dimulai ketika waktu berjalan setelah terjadinya perubahan besar yaitu jatuhnya Orde Baru pada bulan Mei tahun 1998. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden demi menghindari terjadinya perpecahan dan ketidakstabilan di Indonesia. Gagalnya rezim Orde Baru tidak langsung menghasilkan sistem dan tatanan yang baru yang merupakan fondasi yang terbaik dan efisien dalam mengatur kehidupan bersama dan negara, karena ada beberapa masalah yang timbul, termasuk perasaan terlalu bersemangat dalam reformasi yang masih belum menemukan bentuk yang idealnya. Orde reformasi sedang berlangsung sebagai periode transisi yang masih berlangsung dan akan terus mencari bentuknya. Lama waktu transisi ini berjalan bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menghasilkan sistem yang efektif dan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J., melanjutkan pemerintahan orde reformasi Abdurrachman Wahid. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan BJ Habibie berlangsung selama 17 bulan. Pada periode kepresidenannya, Timor Timur berhasil memperoleh kemerdekaannya dari Republik Indonesia setelah melewati proses referendum yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada Sidang Umum tahun 1999, dia mengambil keputusan

untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah MPR menolak laporan pertanggungjawabannya.

Pemilu yang dilaksanakan setelah reformasi adalah Pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dalam Pemilu tahun 1999, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, dipilih sebagai presiden oleh MPR. Permasalahan seperti Bulog Gate dan Brunei Gate serta isu-isu lainnya menghantam pemerintahan, membawa pada penggulingan Abdurrahman Wahid dari jabatannya pada bulan Juli 2001. Tugas pemerintahan diserahkan kepada Wakil Presiden Megawati. Privatisasi BUMN yang dilakukan oleh Megawati adalah salah satu kebijakan yang menuai pro dan kontra. Dalam buku *Problem Demokrasi dan Good Governance di Era Reformasi* (2013), disebutkan bahwa penjualan BUMN dilakukan sebagai upaya untuk melunasi keuangan negara yang sedang dalam utang. Megawati mewarisi beban utang yang semakin meningkat dari negara akibat krisis moneter pada tahun 1998/1999. Dengan berhasil menjual beberapa aset BUMN senilai Rp 18,5 triliun, utang berhasil ditekan. Indosat merupakan salah satu privatisasi yang tengah menjadi perdebatan. Pada saat itu, Temasek Holding Company, perusahaan milik negara Singapura, membeli Indosat dengan nilai Rp 4,6 triliun. Setelah lima tahun, Temasek memperoleh harga tiga kali lipat dengan menjual saham Indosat kepada Qatar Telecom. (Nailufar, 2019).

Pemilihan umum pada tahun 2004, dilaksanakan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden untuk

pertama kalinya di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden pada pemilihan tersebut. Ia kemudian terpilih kembali pada periode selanjutnya pada tahun 2009. Pengelolaan Negara oleh Susilo Bambang Yudhoyono selama satu dekade memberikan dampak yang signifikan. Ada banyak hal positif dan negatif yang tercatat dalam dua periode masa jabatan tersebut, begitu juga dalam masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Presiden SBY juga berhasil mengembalikan rasa stabil di sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus dan tidak berubah-ubah, dengan tingkat rata-rata sekitar enam persen, menjadi tanda pentingnya. Indonesia juga tergabung dalam G-20, sebuah organisasi negara-negara di seluruh dunia yang dianggap mempunyai dampak ekonomi yang penting. Pendapatan per individu kita mengalami peningkatan sekitar tiga kali lipat selama tahun 2004 hingga 2012. Namun, perlu dicatat bahwa dalam sektor ekonomi, terdapat beberapa fakta penting yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan ekonomi selama beberapa tahun terakhir di masa pemerintahan kedua SBY, yang dapat dilihat dari peningkatan angka ketimpangan yang diukur dengan menggunakan Gini Index. Sama halnya dengan itu, tingkat kematian ibu saat melahirkan telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ketika pemerintahan SBY berkuasa (Anonim, 2014). Presiden Joko Widodo terpilih dalam Pemilihan Presiden pada tahun 2014 dan 2019. Pemerintahan Joko Widodo tahun

2019-2024 memiliki visi untuk mewujudkan kemajuan Indonesia yang memiliki kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian yang dijalankan dengan semangat gotong royong. Tujuan mereka adalah;

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdayasaing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat,dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasaaman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.



<http://bit.do/fLwmd>

<https://www.patak.a.or.id/wp-content/uploads/2018/09/visi-misi-01.Joko-wi-Amin-2019.pdf>

g. Pancasila di Era Orde Reformasi

Era Reformasi, setelah diasumsikan berhasil meraih demokrasi pasca runtuhnya pemerintahan orde baru

(1998) ternyata tidak diikuti oleh penguatan konsolidasi demokrasi. Beberapa kali telah melalui pergantian rezim pasca tumbangnya orde baru, di akhir masa setiap kepemimpinan selalu terdapat issue tidak sedap yang menerpa, tidak menutup kemungkinan pemerintahan kedepannya akan mengalami nasib yang sama, jika tidak mempercepat langkah menuju penguatan demokrasi. Pemahaman masyarakat terhadap demokrasi masih sangat sempit, baru sebatas pada proses pemilihan saja (Heryanto, dkk, 2019). Implementasi demokrasi di era reformasi di Indonesia mengalami berbagai sumbatan, Heryanto, dkk (2019), menyebutkan diantaranya;

1. Politik Uang

Dari kontestasi tingkat bawah, pemilihan kepala desa, hingga ke atas, pemberian uang masih merajalela. Tahun 2014, politik uang di Indonesia hampir mencapai 33 persen (Muhtadi dikutip Heryanto, dkk, 2019).

2. Korupsi

Tulisan ini telah menjelaskan pada BAB 1 tentang masalah Korupsi yang dihadapi bangsa. IPK Indonesia masih berada dalam kategori yang mengkhawatirkan dengan tingkat skor yang rendah. Paragraf ini mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2019 menciptakan kontroversi dengan adanya perubahan kedua terhadap UU 30 tahun 2002 tentang KPK, yang menimbulkan pendapat yang berbeda dan dianggap

dapat melemahkan lembaga tersebut.

3. Mahar politik

Mahar politik, meskipun diingkari oleh partai politik, tetapi mahalanya biaya politik untuk kampanye menunjukkan hal ini memang ada. Partai politik memerlukan biaya logistik untuk kampanye dan akhirnya dibebankan kepada kandidat. Realitas sekarang ini tidak sejalan dengan Pancasila karena kemiskinan masih terjadi di mana-mana, rasa keadilan masih rendah, konflik antar-kelompok semakin marak, bahkan simbol-simbol negara masih sering dipakai untuk kepentingan politik dan golongan tertentu (Ali, 2009 dikutip Rachman, dkk, 2012).

Terdapat beberapa isu yang timbul, seperti yang diungkapkan pada bagian pertama; Korupsi, kesenjangan sosial, kehilangan moral, tindakan merusak lingkungan, dan perlakuan hukum yang tidak adil. Pada pertengahan tahun 1998, berbagai tuntutan reformasi muncul di masyarakat saat awal masa reformasi. Tuntutan tersebut dinyatakan oleh berbagai sektor masyarakat, khususnya oleh para mahasiswa dan pemuda. Enam permintaan perubahan yang diajukan adalah:

1. Penegakkan Supremasi Hukum
2. Pemberantasan KKN. Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN
3. Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroni-

nya.

4. Amandemen konstitusi/UUD 1945.
5. Pencabutan dwifungsi TNI/Polri.
6. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. (Prasiko, 2016).

Perubahan dalam sistem hukum Indonesia dilakukan melalui amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan secara bertahap dan teratur dalam empat kali perubahan. Amandemen ini terjadi pada Sidang Umum MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Dalam ranah pemerintahan, sistem pemerintahan pusat memiliki keterbatasan dalam mengembangkan aspirasi dan kepentingan daerah, oleh karena itu dilakukan implementasi Otonomi Daerah (Otda) dengan dasar hukum yang disusun. Namun, pada kenyataannya, implementasi otonomi daerah masih belum memenuhi harapan, karena telah menghasilkan penguasa-penguasa kecil di daerah dan juga memperkuat pandangan sempit kebangsaan yang berpotensi merusak persatuan negara.

Dalam sistem demokrasi, pintu reformasi terbuka lebar untuk memungkinkan adanya partai politik yang beragam, tapi situasi politik masih belum stabil dan sehat. Praktik korupsi finansial dan persekongkolan keuangan menghalangi kemajuan reformasi politik. Isu-isu mengenai hak asasi manusia masih belum diselesaikan sepenuhnya, dan kasus korupsi, kolusi,

dan nepotisme masih terus terjadi dengan banyaknya kasus yang muncul.

Tuliskanlah kesimpulan dari uraian materi di atas dalam buku catatan Anda. Untuk mengevaluasi pencapaian pembelajaranmu, silahkan menjawab pertanyaan pada penilaian pembelajaran di bawah ini..

Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Andakerjakansoal berikut;

1. Kerajaan Kutai terdiri dari dua kerajaan, yaitu Kutai Mulawarman/Martapura dan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara...
 - a. Kesultanan Islam
 - b. Kerajaan Hindu-Buddha,
 - c. Kerajaan Majapahit
 - d. Kerajaan Sriwijaya
2. Apa nama lain dari 'Drak of the Introduction to the Fundamental Law'...
 - a. Filsafat Negara (Philosophische Grondslag)
 - b. Piagam Jakarta
 - c. Pancasila
 - d. Ekasila
3. Apa nama tim yang bertanggung jawab untuk merangkum dan mencatat semua rumusan dan usulan yang telah disampaikan selama persidangan pertama....
 - a. Panitia Utama
 - b. Panitia 8
 - c. Panitia Kecil
 - d. Panitia Besar
4. Apa rumusan dasar negara yang diajukan oleh Ir. Soekarno dalam persidangan pertama.....

- a. Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir dan batin, Musyawarah, Keadilan rakyat
 - b. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Persatuan Indonesia, Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - c. Kebangsaan – Nasionalisme, Peri kemanusiaan – Internasionalisme, Mufakat – Democratie, Keadilan Sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa
 - d. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Peri Kesejahteraan
5. Kapan masa persidangan pertama dilaksanakan?
- a. 22 Juni 1945
 - b. 1 juni 1945
 - c. 30 mei 1945
 - d. 29 mei 1945
6. Apa yang menjadi persoalan ketika Indonesia bertransformasi menjadi Negara Kesatuan?
- a. Tidak menggunakan konstitusi baru
 - b. Tidak menggunakan konstitusi
 - c. Tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945
 - d. Tidak menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950
7. Apa konsep yang diterapkan pada masa Orde Lama....
- a. Nasionalis, Agama, dan Komunis

-
- b. Demokrasi
 - c. Kapitalis
 - d. Pancasila
8. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno terhadap ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA....
- a. Mengadakan pemilihan kembali
 - b. Mendirikan DPR-GR
 - c. Menghentikan mereka
 - d. Mengangkat mereka menjadi menteri
9. Berapa lama BJ Habibie menjabat sebagai presiden...
- a. 4 tahun
 - b. 17 bulan
 - c. 6 tahun
 - d. 2 tahun
10. Apa yang dilakukan untuk mengatasi sumbatan dalam implementasi demokrasi di era reformasi di Indonesia.....
- a. Amandemen konstitusi/UUD 1945
 - b. Penegakkan Supremasi Hukum
 - c. Pemberantasan KKN
 - d. Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawabanyang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$

Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | |
|------|-------|
| 1. A | 6. C |
| 2. B | 7. A |
| 3. C | 8. D |
| 4. C | 9. B |
| 5. D | 10. B |

Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memahami materi di BAB ini dan Anda sudah menyelesaikan Soal yang diberikan, silahkan membaca sumber lain yang ada di referensi. Anda juga dapat menyimak beberapa video di bawah ini untuk memperdalam pemahaman Anda.

1. Dari Hindia ke Indonesia: Pergulatan Mencari Nama Sebuah Bangsa



<http://bit.do/fLwnb>

<https://www.youtube.com/watch?v=2fK47yc kuds>

2. Sejarah Lahirnya Pancasila melalui link berikut:



<http://bit.do/fLwnj>

https://www.youtube.com/watch?v=sxIYdR mg_d8

3. Sejarah Masuknya Bangsa Barat di Indonesia link berikut;



<http://bit.do/fLwuE>

<https://www.youtube.com/watch?v=xHF4yOB rbnA>



<http://bit.do/fLwuR>

<https://www.youtube.com/watch?v=eA7M-bqRcFvI>

4. Sumpah Pemuda lihat link berikut:

<http://bit.do/fLwu7><https://www.youtube.com/watch?v=QbhkH-G17Eis>

5. Pembahasan UUD 1945

<http://bit.do/fLwvb><https://www.youtube.com/watch?v=Ik-KU3qNf-y4>

6. Bahasan Merdeka, Indonesia Dalam Peristiwa, silahkan lihat link berikut:

<http://bit.do/fLwvp><https://www.youtube.com/watch?v=GjH1vBpIQSw>

7. Pancasila

<http://bit.do/fLwvF><https://saintif.com/butir-butir-pancasila/butir-butir-pancasila/>

8. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan, lihat link berikut;

<http://bit.do/fLwvM><https://www.youtube.com/watch?v=5Ux92D4cqqg>

Referensi

Ali, R. Moh. (2012). Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Yogyakarta: LKisPelangi Aksara.



Anonim. (2014). Jokowi dan Catatan Pemerintahan SBY. <http://bit.do/fLwAJ>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141020121441-33-6948/jokowi-dan-catatan-pemerintahan-sby>

Bambang Sumadio, dkk. (1977). Sejarah Nasional Indonesia III dan IV. Departemen P dan K: Jakarta.

Dhakidae, Daniel ; Pane, Nina, 1948-. (2015). Mohammad Hatta : Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977) / editor, Nina Pane ; pengantar, Daniel Dhakidae. Jakarta : Kompas.

Hakim, Luqman. (2013). Problem Demokrasi dan Good Governance di Era Reformasi. Malang ; Universitas Brawijaya Press.

Ismaun. (2005). Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan. Bandung : Historia Utama Press.

Isnaeni, Hendri F. (2015). Hari Ini VOC Berdiri.



<http://bit.do/fLwAe>

<https://historia.id/kuno/articles/hari-ini-voc-berdiri-DWVe3>

Jones Russell. (1973). Earl, Logan and "Indonesia". In: Archipel, volume 6, (1973). pp. 93-118. DOI :



<http://bit.do/fLwAr>

https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1973_num_6_1_1130

Kaderi, Alwi. (2015). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Banjarmasin: Antasari Press.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Sejarah Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Latif, Yudi. (2018). Wawasan Pancasila, Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan. Jakarta Selatan: Mizan.

Latif, Yudi. (2012). Negara Paripurna. Cetakan Ke Empat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

MS. Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Nailufar, Nada Nibras. (2019). Perjalanan Politik Megawati: 3 warisannyayang dipuji dan dibuly.



<http://bit.do/fLwAA>

<https://yogyakarta.kompas.com/read/2019/07/26/15130301/perjalanan-politik-megawati-3-warisannya-yang-dipuji-dan-dibully?page=all>

Nurwardani, Paristiyanti, dkk. (2016). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerianristekdikti.

Notonagoro. (1975). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Djakarta: Pantjuran Tudjuh.

Prasisko, Yongky Gigih. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 3 No. 2, Agustus 2016.



<http://bit.do/fLwAZ>

<https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/download/23532/15529>

Rachman, dkk. (2012). Wacana Pancasila Dalam Era Reformasi (Studi Kebudayaan Terhadap Pasang Surut Wacana Pancasila dalam Kontestasi Kehidupan Sosial dan Politik). Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.2, November 2012.

Sudiyo. (1989). Perhimpunan Indonesia sampai dengan Lahirnya Sumpah Pemuda. Jakarta: Bina Aksara.

Widiyatmoko, Bayu. (2015). Kronik Peralihan Nusantara, Liga Raja-raja Hingga Kolonial. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.

Daftar Istilah

<i>Causa formalis</i>	: Asal mula bentuk. Seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUP-KI), yaitu Bung Karno yang kemudian bersama-sama Bung Hatta menjadi Pembentuk Negara. Sukarno yang mengenalkan istilah Pancasila. Kemudian dwitunggal Soekarno-Hatta mendeklarasikan Negara.
<i>Causa finalis</i>	: Asal mula tujuan. Asal mula tujuan ditetapkan Pancasila yaitu sebagai calon dasar filsafat Negara.
<i>Causa efisien</i>	: Asal mula karya. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara yang ditetapkan dalam Sidang PPKI.
Abad	: Sebutan untuk jangka waktu seratus tahun. Satu abad bersamaan dengan sepuluh dekade. Abad ini, abad ke-21, bermula pada tahun 2001 hingga tahun 2100.
yupa	: Istilah Yupa digunakan untuk prasasti yang dipahatkan pada tugu atau tiang batu.
Prasasti	: Piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama.

Palawa	: Sebuah aksara yang berasal dari India bagian selatan. Aksara ini sangat penting untuk sejarah Indonesia karena aksara ini merupakan aksara dari mana aksara-aksara Nusantara diturunkan.
Konstantinopel	: Sekarang Istanbul, kota terpadat di Turki yang menjadi pusat perekonomian, budaya, dan sejarah negara tersebut. Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinus I di atas situs sebuah kota yang sudah ada sebelumnya, Bizantium, yang didirikan pada permulaan masa ekspansi kolonial Yunani, kemungkinan besar sekitar 671-662 SM.
Rezim	: Tata pemerintahan negara atau pemerintahan yang berkuasa
Etnosentrisme	: Seseorang yang berasal dari kelompok etnis yang cenderung melihat budaya mereka sebagai yang terbaik dibandingkan dengan kebudayaan yang lain

BAB III

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA I

Teman-teman mahasiswa, pada bagian ketiga ini kalian akan diajarkan mengenai Pancasila sebagai pondasi negara. Bab 3 terdiri dari dua kegiatan belajar yang berbeda.;

Kegiatan Belajar 1: Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Kegiatan Belajar 2: Menilik Sumber Historis-Yuridis-Sosiologis Pancasila

Kegiatan Belajar 1 : Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 1, diharapkan Anda mampu menguraikan informasi mengenai asal usul, penyelidikan, dan tahapan awal pembentukan Pancasila agar dapat memahami bagaimana Pancasila menjadi dasar negara bagi Negara Republik Indonesia.

Uraian Materi

Buku "Glossarium sekitar Pancasila" yang dikompilasi oleh Laboratorium Pancasila IKIP Malang pada tahun 1981 menjelaskan dengan lengkap tentang definisi prinsip, alas, asas, dasar, atau landasan. Prinsip adalah sumber utama, asal, atau penyebab dari sesuatu; merupakan kebenaran dasar, hukum atau doktrin, atau kekuatan yang mendorong; suatu aturan perilaku yang mengatur terutama tindakan yang benar. Dasar adalah komponen yang terletak di posisi terendah atau bagian paling bawah suatu struktur, baik itu berupa landasan, pokok, atau tumpuan. Dasar juga dapat merujuk pada kaidah, aturan, atau norma yang menjadi landasan dalam suatu hal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar merupakan suatu hal yang diterima sebagai kebenaran dan keyakinan, yang kemudian dibuat menjadi rumusan aturan pokok dan aturan lainnya. Adapun prinsip adalah set aturan pokok yang berasal dari dasar tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan, landasan merujuk pada sebuah kata yang dapat digunakan

untuk menggantikan kata dasar atau alas.

Pada bagian awal dari kata pengantar, Dr. K.R.T. adalah seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah. Radjiman Wedyodiningrat menulis dalam bukunya, Tudjuh Bahan Pokok Indoktrinasi, yang diterbitkan oleh Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 1 Juli 1947, bahwa Pancasila lahir dari transkripsi stenografis pidato Bung Karno yang awalnya diucapkan secara spontan dalam sidang pertama pada tanggal 1 Juni 1945 saat membahas "Dasar (Beginsel) Negara kita". Pidato tersebut merupakan manifestasi dari visi Bung Karno. Penting diketahui bahwa kalimat-kalimat dalam pidato yang tidak tercatat biasanya memiliki susunan yang kurang teratur. Namun, fokus yang utama adalah isinya! (Soekarno, 1947).

Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh lahirnya Pancasila ini, ternyata adalah suatu Demokratisch Beginsel, suatu Beginsel yang menjadi Dasar Negara kita, yang menjadi Rechtsideologie Negara kita suatu beginisel yang telah meresap dan berurat-berakar dalam jiwa Bung Karno, dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada di bawah penilikan yang keras dari Pemerintah Balatentara Jepang. Memang jiwa yang berhasrat merdeka, tak mungkindikekang-kekang. Mudah-mudahan lahirnya Pancasila ini dapat dijadikan pegangan, dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan kemerdekaan negara (PARAN, 1947)

Mendahului Ir. Soekarno, dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) Senintanggal 29 Mei 1945 dengan acara "Pembicaraan

tentang Dasar Negara Indonesia, Mr. Prof. Mohammad Yamin, SH menyampaikan bahwa negara Indonesia pertama Syailendra-Sriwijaya (600-1400) berdasar kedatuan, negara Indonesia kedua Kerajaan Majapahit (1293-1525) berpaham keprabuan, dan negara Indonesia ketiga berupa Republik adalah negarakebangsaan dan berketuhanan. Maka rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia, orang Timur pulang kepada kebudayaan timur. Ditawarkanlah lima poin bahasan: Perikebangsaan, Perike-manusiaan, Periketuhanan, Perikerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat, kemudian ditutup dengan Syair Republik Indonesia dan persembahan lampiran suatu rancangan sementara berisi perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kepada R.P Soeroso (Aning, 2019)

Kemudian, Prof. Mr. Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan lima poin yang dapat dijadikan landasan bagi negara, yaitu: Kesatuan, Persaudaraan, Harmoni Jasmani dan Rohani, Diskusi, dan Kepastian Hukum untuk Rakyat. Pemaparan tentang lima unsur ini memiliki cakupan yang luas dan mendalam.

<https://www.hariansejarah.id/2017/01/bpupki-dan-perumusan-dasar-negara.html>

Ketika tiba giliran Ir. Soekarno berpidato di gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Kementerian Luar Negeri) tanggal 1 Juni 1945, dikatakan:

"Paduka tuan minta dasar, minta *philosophische grondslag* (4 kali disebut) atau jikalau kita boleh memakai perkataan muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta

suatu "*Weltanschauung*" (31 kali disebut), yang telah saya perjuangkan sejak 1918 sampai 1945 di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau prikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, dan Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Prinsip Ketuhanan)". Saudara-saudara! Dasar-dasar Negara telah saya usulkan Lima Bilangannya..... namanya bukan Panca Dharma tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli Bahasa—namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi, karena itulah saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala (PARAN, 1947)

Dalam Piagam Jakarta yang disusun oleh 9 Tokoh bangsa yaitu Dr (HC) Ir. H. Soekarno, Dr (HC) Drs. H. Mohammad Hatta, Mr. Alexander Andries Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Prof. K.H. Abdul Kahar Moezakir, H. Agoes Salim. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoeerjo. K.H. Abdul Wahid Hasjim, dan Prof. Mr. Muhammad Yamin, SH, pada tanggal 22 Juni 1945, tercantum kalimat sebagai berikut:

".....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam

bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sertadengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia(Naskah Persiapan UUD 1945 jilid I halaman 709 dalam Darmodiharjodkk, 1983).

Dari penjelasan di atas, silahkan tuliskan kesimpulan ini di buku catatan Anda. setelah itu, lanjutkanlah proses belajar ke aktivitas pembelajaran berikutnya.

Kegiatan Belajar 2:

Menilik Sumber Historis-Yuridis-Sosiologis Pancasila

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 1, diharapkan Anda mampu menjelaskan tentang asal muasal, payung hukum, dan aspek sosial seputar keberadaan Pancasila di bumi Nusantara

Uraian Materi

Asal usul Pancasila sebagai landasan ideologi negara terdapat dalam konstitusi negara yang paling utama, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan pernyataan Proklamasi 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat negara resmi diumumkan pada tanggal 18 Agustus 1945 saat pembukaan UUD 1945, namun telah ada sejak lama sebelumnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, dilakukan perencanaan pertama kali untuk membuka UUD 1945 yang dikenal dengan nama Jakarta Charter. Namun, Pancasila sudah lama diusulkan sebagai landasan falsafah negara Indonesia Merdeka yang akan dibangun, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945 saat rapat BPUPKI. Pancasila sebagai dasar filsafat atau dasar spiritual negara, yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, memiliki isi yang bersifat abstrak, umum, universal, tak berubah, dan tetap. Oleh karena itu, Pancasila sama dan berlaku untuk semua rakyat Indonesia, tidak peduli perbedaan-perbedaan yang ada dalam bangsa tersebut. Perbedaan tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap Pancasila sebagai dasar filsafat

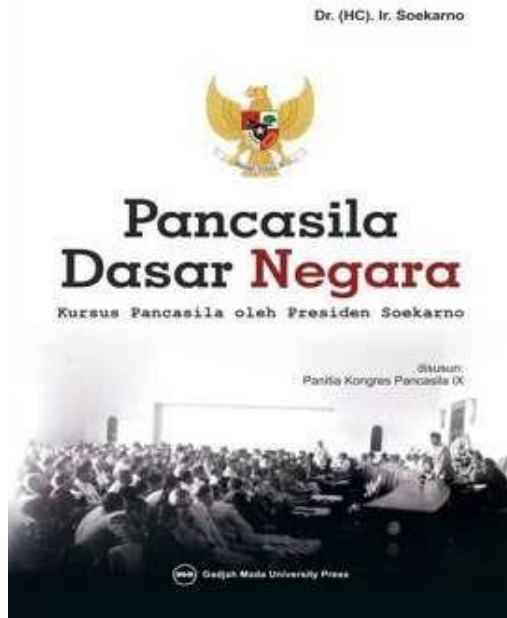
atau dasar spiritual negara. (Lubis, 1982).

Bukti-bukti sejarah yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia:

1. Dalam pembukaan sidang pertama BPU-PK (Dokuritsu Junbi Choosakai) tanggal 29 Mei 1945, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik meminta agar sidang Dokuritsu Junbi Choosakai mengemukakan dasar Indonesia Merdeka (philosofische grondslag dari Indonesia Merdeka)
2. Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin pada permulaan pidato dalam sidang Badan Penyelidik, antara lain mengatakan: kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan, yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan korban darah daging sejak beratus-ratus tahun,....” (Naskah Persiapan UUD 1945 jilid I halaman 88)
3. R.P Soeroso pada waktu memberi peringatan kepada Mr. Mohammad Yamin dalam pidato tanggal 29 Mei 1945, antarlain menyatakan: sebagai diterangkan oleh Ketua, tuan Radjiman, tadi yang dibicarakan adalah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka....(Naskah Persiapan UUD 1945 jilid I halaman 100)
4. Prof. Mr. Dr. Soepomo dalam pidato sidang pertama Badan Penyelidik tanggal 31 Mei 1945, antara lain mengatakan: “soal yang kita bicarakan ialah, bagaimanakah akan dasar-dasarnya Negara Indonesia Merdeka (Naskah Per-

siapan UUD 1945 jilid I halaman 109)

5. Dalam pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik antara lain disebutkan, bahwa yang diminta oleh Ketua adalah agar sidang mengemukakan dasar Indonesia Merdeka, yaitu *Philosofische grondslag* dari Indonesia Merdeka. Selanjutnya beliau memberi nama *Philosofische grondslag* atau dasar falsafah Negara Indonesia Merdeka tersebut: Pancasila
6. Di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, tercantum kalimat sebagai berikut: "....., maka disusunkan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Darmodiharjo dkk, 1983)



Tim Panitia Kongres Pancasila IX. 2019. Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno Tentang Pancasila. (OnLine)
<https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-politik/pancasila-dasar-negara-kursus-pancasila-oleh-presiden-soekarno-tentang-pancasila> (diakses 17 Oktober 2020)

Dilihat dari aspek morfologi Bahasa Indonesia, kata berdasar diperoleh dari kata dasar yang mendapatkan awalan ber dan berubah menjadi berdasar. Melihat informasi atau fakta-fakta sejarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan utama bangsa Indonesia menciptakan Pancasila adalah sebagai landasan bagi negara kita, yaitu dasar negara Republik Indonesia. Pandangan hidup Bangsa Indonesia menjadi sumber utama dalam menggali Pancasila sebagai dasar negara. Maka, pada intinya Pancasila memiliki dua makna utama: Pancasila sebagai fondasi negara, dan Pancasila sebagai visi hidup bangsa.

Berdasarkan Alinea IV UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa pancasila adalah landasan filosofi bagi negara dan juga menjadi sumber utama hukum di Indonesia. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa pancasila adalah dasar filosofi dari negara Indonesia yang juga menjadi pijakan untuk membuat peraturan hukum:

1. Pancasila merupakan dasar filsafat negara (asas kerohanian), pandangan hidup dan filsafat hidup
2. Di atas basis (dasar) itu berdirilah negara Indonesia, dengan asas politik negara (kenegaraan) yaitu berupa Republik yang berkedaulatan rakyat
3. Kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
4. Selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar (yaitu sebagai basis) dalam suasana kebatinan (maka berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang lainnya, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kesatuan hidup bersama yang berasas kekeluargaan
5. Segala sesuatu yang disebutkan terdahulu adalah demi tercapainya suatu tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara tersebut, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmaniah maupun rohaniyah, maupun Tuhaniyah (Kaelan, 2016).

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam negara RI yang meliputi suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, cita-cita moral yang luhur, yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945, telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh pendiri negara, menjadi lima sila, dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan nomor: XX/ MPRS/1966. Dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (Kaelan, 2016).

Dalam sejarah Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup telah ada sejak sebelum Pancasila menjadi dasar negara yang diatur dalam sistem nilai. Sejak lama, daerah-daerah di Indonesia memiliki beberapa nilai yang ditekankan oleh penduduknya, seperti kepercayaan kepada Tuhan yang toleran, kerja sama dalam gotong royong, pengambilan keputusan melalui musyawarah, solidaritas dalam kesetiakawanan sosial, dan lain-lain.

Pancasila bukan hanya menjadi pegangan hidup bangsa, tetapi juga menjadi dasar utama negara, yakni menjadi sumber aturan hukum konstitusional yang mengatur seluruh aspek negara Republik Indonesia, termasuk rakyat, wilayah, dan pemerintahnya. Secara hukum, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat sebagai fondasi negara. Semua sistem berkehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak sejalan dengan Pancasila sebagai landasan hukum konstitusional, pada

dasarnya harus dinyatakan tidak berlaku dan harus dihapuskan. Sebagai fondasi negara, Pancasila telah memiliki kaitan yang jelas dengan struktur kekuasaan dalam bentuk yang resmi. Ini mencakup suasana batin atau aspirasi hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, baik dalam bentuk hukum dasar yang tertulis dalam undang-undang dasar maupun dalam bentuk hukum dasar yang tidak tertulis yang berkembang melalui praktik pelaksanaan negara (Kansil dan Christine, 2006).

Dari penjabaran materi di atas, silakan tuliskan kesimpulan tersebut dalam buku catatan Anda. setelah itu, anda dapat melanjutkan proses belajar dengan mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya.

Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Anda kerjakan soal berikut;

1. Apa yang menjadi manifestasi dari visi Bung Karno dalam pidato yang menjadi lahirnya Pancasila....
 - a. Beginsel negara
 - b. Pidato bung Karno
 - c. Demokratisch Beginsel
 - d. Rechtsideologie negara
2. Apa lima poin yang dijadikan landasan bagi negara.....
 - a. Perikebangsaan, Perikemanusiaan, Periketuhanan, Perikerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Peradaban kebangsaan Indonesia, Orang Timur pulang kepada kebudayaan timur
 - c. Pembicaraan tentang dasar negara Indonesia
 - d. Kesatuan, Persaudaraan, Harmoni Jasmani dan Rohani, Diskusi, dan Kepastian Hukum untuk Rakyat
3. Kapan pertama kali Pancasila diusulkan sebagai landasan falsafah negara Indonesia Merdeka.....
 - a. 18 Agustus 1945
 - b. 17 Agustus 1945
 - c. 01 Juni 1945
 - d. 31 Mei 1945
4. Apa karakteristik Pancasila sebagai dasar filsafat atau dasar spiritual negara....

-
- a. Abstrak, khusus, universal, berubah, dan fleksibel
 - b. Konkrit, khusus, lokal, berubah, dan fleksibel
 - c. Abstrak, umum, universal, tak berubah, dan tetap
 - d. Konkrit, umum, lokal, tak berubah, dan tetap
 5. Kapan Pancasila sebagai dasar filsafat negara resmi diumumkan....
 - a. 18 agustus 1945
 - b. 22 Juni 1945
 - c. 29 mei 1945
 - d. 1 Juni 1945
 6. Apa yang dimaksud dengan sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara...
 - a. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998
 - b. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998
 - c. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945
 - d. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
 7. Mengapa Pancasila penting sebagai dasar negara.....
 - a. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, pada 1 Juni 1945, dan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998

- b. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, pidato 1 Juni 1945, Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
 - c. Karena Pancasila adalah Jiwa Bangsa Indonesia
 - d. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998
8. Apa yang dimaksud dengan sumber politis Pancasila sebagai dasar negara....
- a. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 36A jo. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
 - b. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
 - c. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan dalam Pasal 36A jo. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
 - d. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
9. Bagaimana pengaruh Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan....
- a. Pancasila menjadi norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan public
 - b. Pancasila menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional
 - c. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan

politik

- d. Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politik
10. Apa yang dimaksud dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara...
- a. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan setelah menyerap berbagai pandangan dari para anggota BPUPKI dan PPKI serta ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945
 - b. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan setelah menyerap berbagai pandangan dari para anggota BPUPKI dan PPKI
 - c. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan setelah menyerap berbagai pandangan dari para anggota BPUPKI dan PPKI serta ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998
 - d. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan setelah menyerap berbagai pandangan dari para anggota BPUPKI dan PPKI serta ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, pidato 1 Juni 1945, dan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawabanyang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$

Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | |
|------|-------|
| 1. C | 6. A |
| 2. D | 7. B |
| 3. C | 8. A |
| 4. C | 9. B |
| 5. A | 10. D |

Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memahami materi di BAB ini dan Anda sudah menyelesaikan Soal yang diberikan, silahkan membaca sumber lain yang ada di referensi. Anda juga dapat menyimak beberapa video di bawah ini untuk memperdalam pemahaman Anda.

1. Pidato Lengkap Bung Karno 1 Juni 1945 tentang Pancasila



<http://bit.do/fLwMD>

<https://www.krjogja.com/angkringang/historia/pidato-lengkap-bung-karno-1-juni-1945-tentang-pancasila-i/>

2. Pidato Bung Karno Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni



<http://bit.do/fLwMJ>

<https://www.youtube.com/watch?v=dZjIEP-REm7w>



<http://bit.do/fLwMP>

<https://www.youtube.com/watch?v=3pM3jLB-V44g>

3. KULIAH UMUM Yudi Latif, Ph.D Seri#1 “Melacak Akar Sejarah Pancasila”



<http://bit.do/fLwM2> <https://www.youtube.com/watch?v=IkKU3qNf-y4>

4. Bedah Buku Wawasan Pancasila Karya Yudi Latif, Ph.D DPP PG



<http://bit.do/fLwM9> <https://www.youtube.com/watch?v=QzWREJrf80w>

Referensi

Aning, Floriberta (penyunting). 2019. *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*. Yogyakarta: Media Pressindo

Darmodiharjo, Darjiddk. 1983. *Santiaji Pancasila: Suatu tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional*. Dilengkapi dengan Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila dan Garis Garis Besar Haluan Negara. Surabaya: Usaha Nasional

Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila (edisi Reformasi)*. Yogyakarta: Paradigma

Lubis, Ibrahim. 1982. *Kuliah Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. Jakarta: Ghalia Indonesia

PARAN. 1947. *Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*. Djakarta: Dewan Pertimbangan Agung

Soekarno. 1947. *Lahirnja Pantja-Sila*. Djakarta: Digital

Ahmad. 2020. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. (OnLine)



<http://bit.do/fLwSk>

<https://www.yuksinau.id/pancasila-sebagai-dasar-negara/> (Diakses 29 Oktober 2020)

Tim Panitia Kongres Pancasila IX. 2019. *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno Tentang Pancasila*. (OnLine)



<http://bit.do/fLwSN>

<https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/sosial-politik/pancasila-dasar-negara-kursus-pancasila-oleh-presiden-soekarno-tentang-pancasila> (diakses 17 Oktober 2020)

Daftar Istilah

An sich	: pada dirinya sendiri
Fairness	: keadilan
Free fight	: kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga lemah memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang
Liberalism	
Fundamental	: amat mendasar
Philosophie grondslag	: dasar falsafah negara
Prismatika	: cahaya spektrum aneka warna kehidupan
Rechtsideologie	: ideologi hukum
Staatsidee	: ideologi negara
Tyoo sangi-in	: Dewan Pertimbangan Pusat
Weltanschauung	: pandangan dunia

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA II

Teman-teman mahasiswa, pada bagian ke empat ini kalian akan diajarkan mengenai Pancasila sebagai pondasi negara. Bab 4 terdiri dari tiga kegiatan belajar yang berbeda.;

Kegiatan belajar 1: Konsep, Esensi, dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Kegiatan Belajar 2: Penjabaran dan Implementasi Pancasila/Butir- Butir Pancasila.

Kegiatan Belajar 3: Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara

Kegiatan Belajar 1 : Konsep, Esensi, dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 1, diharapkan Anda mampu menggambarkan gagasan-gagasan utama mengenai posisi, esensi, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berkelompok, berbangsa, dan bernegara

Uraian Materi

Semua penyebutan yang beragam aneka macam terkait posisi atau keberadaan Pancasila di masyarakat yang dirumuskan dengan metode sistematis, harus dikaitkan kembali dengan dua makna. Inti dari teks ini adalah:

1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumbertertib hukum) dari Negara Republik Indonesia
4. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia (waktumendirikan Negara)
5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia (seperti yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945).
6. Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia, namun jika dianggap sebagai alat mempersatu "an sich" sungguh kurang tepat

(Darmodiharjo dkk, 1983).

Pentingnya memahami Pancasila sebagai landasan negara terletak pada pengetahuan tentang sejarah konstitusi proklamasi dan hukum dasar kehidupan bersama dalam sebuah negara. Ini mencakup Pembukaan Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 sebelum mengalami perubahan. Pancasila memiliki sifat yang integralistik, yang berarti bahwa Pancasila adalah pemahaman tentang esensi negara yang didasarkan pada konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Soepomo berpendapat bahwa Pancasila menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka negara yang integralistik, sehingga membedakannya dengan pemahaman yang digunakan oleh negara-negara lain. Hal ini mengacu pada tiga teori, yaitu teori individualistik, teori kelas, dan teori integralistik. Menurut penjelasan sebelumnya, Pancasila memiliki nilai-nilai yang mencerminkan semangat kekeluargaan yang terwujud dalam kebersamaan, kerjasama (gotong royong), menjaga persatuan dan kesatuan, serta memberikan prioritas pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan (Syarbaini, 2009).

Meskipun diajukan dengan pernyataan yang agak berbeda, Pancasila tetap disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, Mukadimah Konstitusi RIS, dan Mukaddimah UUDS 1950. Pancasila selalu ditegaskan dalam kehidupan konstitusional, menjadi acuan bersama ketika terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap kelangsungan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila selalu diinginkan oleh bangsa Indonesia sebagai dasar spiritual negara, diinginkan sebagai landasan yang mendasari.

Dalam arti bahwa Pancasila merupakan Fondasi Negara Republik Indonesia sering kali disebut sebagai Dasar Falsafah Negara, Dasar Filosofis Negara, Ideologi Negara, atau Konsep Negara. Dalam konteks ini, Pancasila digunakan sebagai landasan untuk mengatur tata kelola Pemerintahan Negara. Dalam hal lain, Pancasila dijadikan sebagai landasan untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan negara.

Prof. Dr. Notonagoro dalam karangannya "Berita Pikiran Ilmiah tentang jalan keluar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia", dikemukakan bahwa aspek spiritual Pancasila memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan negara dan sistem hukum Indonesia. Di bagian lain, pembicara menjelaskan bahwa norma hukum yang esensial dan disebut sebagai prinsip dasar tak berubah memiliki kekuatan dan kedudukan yang tak tergoyahkan dalam sistem hukum suatu negara. Dengan kata lain, prinsip ini tidak dapat diubah melalui cara hukum.

Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan (Azhary, 1983). Betapa fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Hal ini penting sekali, karena UUD baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai Dasar Negara sesuai Pembukaan UUD 1945. Dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS

No. XX/MPRS/1966 (joTap MPR No. V/MPR/1973 dan Tap MPR No. IX/MPR/1978). Pengertian yang demikian adalah Pengertian Pancasila yang bersifat Yuridis- Ketatanegaraan (Darmodiharjo dkk, 1983)

Mahfud M.D. adalah seorang tokoh yang dikenal di Indonesia. Pada tahun 2009, dijelaskan bahwa menerima Pancasila sebagai landasan negara memiliki konsekuensi yang harus diterima dan diikuti oleh aturan-aturan yang membimbing dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Dengan berpegang pada dasar negara Pancasila, terdapat setidaknya empat prinsip yang digunakan sebagai panduan dalam pembuatan kebijakan politik hukum dan kebijakan umum negara. Prinsip-prinsip ini harus diikuti:

1. tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori.
2. didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
3. didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prisma antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
4. didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun, tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan

atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.

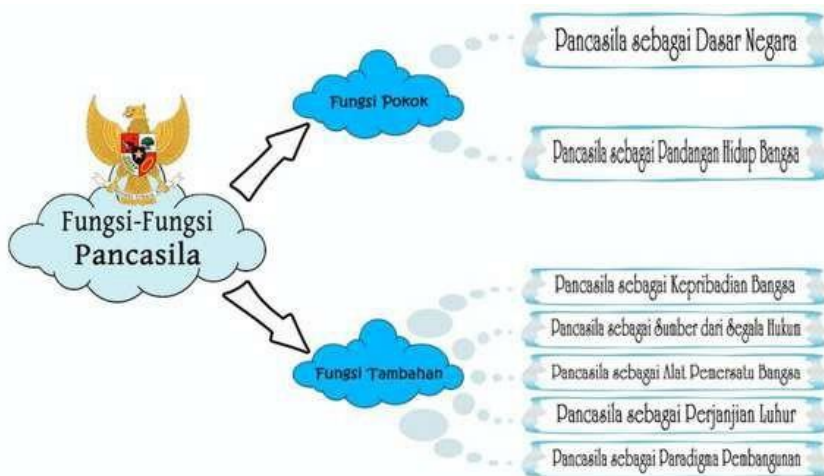
Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tetapi meyakinkan, sebagai berikut: Pancasila adalah *Weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatubangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya (MPR RI, 2013).

Agar dapat memahami betapa pentingnya Pancasila sebagai landasan negara, kita dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional (berkaitan dengan lembaga-lembaga) dan sumber daya manusia (individu-individu yang terlibat). Pendekatan institusional berarti menciptakan dan mengatur negara Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila agar negara ini memenuhi syarat sebagai negara modern. Dalam pendekatan ini, tujuan utama adalah memastikan tercapainya kepentingan nasional dan menciptakan masyarakat yang adil

dan makmur. Pada saat yang sama, sumber daya manusia terdiri dari individu-individu yang memegang posisi dalam pemerintahan (pegawai negeri) dan bertanggung jawab dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan tulus dan konsisten dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dengan demikian, ketika merumuskan kebijakan negara, hal tersebut akan mencerminkan kepentingan rakyat. Demikian juga pada tahap pelaksanaan, penting untuk selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sehingga dapat mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, para pengusaha juga harus mengadopsi nilai-nilai etika bisnis dari Pancasila agar dapat menghindari persaingan bebas yang berlebihan, monopoli, dan monopsoni. Begitu pula bagi mereka yang bergerak di bidang organisasi masyarakat dan politik, harus memperhatikan infrastruktur politik. Pancasila sebaiknya selalu menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, baik di ranah sosial maupun politik. Maka, Pancasila akan berfungsi sebagai pedoman moral atau tata nilai politik yang memberikan arah bagi kehidupan bersama, identitas bangsa, dan tata negara dalam suasana kehidupan yang selaras.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata "berdasarkan" yang berarti, Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara, harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan (Kemenristekdikti, 2016).



Ahmad. 2020. Pancasila Sebagai Dasar Negara.

(OnLine) <https://www.yuksinau.id/pancasila-sebagai-dasar-negara/>
(Diakses 29 Oktober 2020)

Kegiatan Belajar 2: Penjabaran dan Implementasi Pancasila/Butir- Butir Pancasila

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan Kegiatan Belajar 2, diharapkan Anda dapat menguraikan konsep memperkuat kepribadian dan komitmen terhadap negara dalam penerapan prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan negara.

Uraian Materi

"...saya mengajak masyarakat luas...untuk memikirkan dan mengusahakan rumusan-rumusan penjabaran Pancasila itu yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga mudah dihayati dan diamalkan oleh rakyat Indonesia" (Pidato Kenegaraan, 18 Agustus 1975) (Krissantono, ed, 1976)

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menerbitkan 45 poin Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pada tahun 2014, 45 poin Panduan Implementasi dan Penerapan Pancasila (dalam versi online).



<http://bit.do/fLwLM>

<https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - i. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang

Maha Esa.

- ii. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - iii. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - iv. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragamaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - v. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - vi. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - vii. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- i. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

-
- ii. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 - iii. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 - iv. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 - v. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap oranglain.
 - vi. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - vii. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - viii. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - ix. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 - x. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. Persatuan Indonesia
- i. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - ii. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 - iii. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

-
- iv. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - v. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - vi. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - vii. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan
- i. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - ii. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - iii. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - iv. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - v. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 - vi. Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - vii. Di dalam musyawarah diutamakan kepen-

tingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

- viii. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- ix. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- x. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- i. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- ii. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- iii. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- iv. Menghormati hak orang lain.
- v. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- vi. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- vii. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal

yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

- viii. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- ix. Suka bekerja keras.
- x. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- xi. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

MENGENAL PANCASILA

Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh **Sultan Hamid II** kemudian disempurnakan hingga akhirnya diresmikan tanggal 10 Februari 1950

Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945

- 17: Jumlah bulu di sayap burung Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan
- 8: Jumlah bulu di ekor burung Garuda melambangkan bulan proklamasi kemerdekaan
- 45: Jumlah bulu di leher burung Garuda melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan

SILA PERTAMA KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menjalin toleransi saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan

SILA KEDUA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
Saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan

SILA KETIGA PERSATUAN INDONESIA
Menempatkan persatuan bangsa (asas Bhinneka Tunggal Ika) di atas kepentingan pribadi dan golongan

SILA KEEMPAT KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN
Menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur

SILA KELIMA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan dan kegotongroyongan

#PancasilaPembuatTWTW #SetiapPancasilaAdalahKebudayaanBerita
@PancasilaPembuatTWTW @SetiapPancasilaAdalahKebudayaanBerita

TUMBUH BERKEMBANG TUMBUH SETIAH ADILAN

(Departemen Agama RI, 1980; Departemen Agama RI, 1984)

Kris, Robert. 2019. Makna Setiap bagian Lambang Garuda Pancasila. (OnLine) <https://tutorialpelajaran.com/1667/makna-setiap-bagian-lambang-garuda-pancasila/> (diakses 20 Oktober 2020).

Setelah mempelajari isi materi di atas, Anda diminta untuk menuliskan kesimpulan dalam buku catatan Anda. Kemudian, silakan melanjutkan proses pembelajaran dengan kegiatan belajar yang akan datang.

Kegiatan Belajar 3 : Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 3, diharapkan Anda dapat menguraikan perubahan dan hambatan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara sejak era reformasi dalam konteks globalisasi hingga saat ini dalam kehidupan bersosialisasi dan bernegara.

Uraian Materi

Abdul Dachlan (1909-1945) adalah pahlawan nasional dan juga merupakan presiden keempat Indonesia. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyampaikan bahwa Pancasila berfungsi sebagai landasan negara yang menggabungkan konsep nasionalisme dan keagamaan sehingga tidak ada ruang bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Menurutnya, selama kita tetap mengakui Pancasila sebagai fondasi negara, hal tersebut akan menjaga integritas bangsa kita.

Menurut Abdulgani, Pancasila merupakan motivasi utama dan panduan yang membimbing kita dalam hidup. Jika tidak ada panduan dan prinsip-prinsip Pancasila ini, pemerintahan negara dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai akibatnya, segala jenis penyimpangan tersebut harus dihentikan dengan memprioritaskan Pancasila sebagai dasar filsafat dan dasar moral (1979). Agar Pancasila dapat menjadi

motivasi utama dan petunjuk bagi generasi penerus yang akan memegang peranan penting dalam kepemimpinan negara, maka nilai-nilai Pancasila harus diajarkan kepada mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengatur struktur dan tata cara agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diimplementasikan di program studi yang berbeda dengan cara yang menarik dan efisien. Tantangan ini dapat datang dari dalam perguruan tinggi, seperti sumber daya yang terbatas dan penekanan yang semakin kuat pada program studi tertentu (yang menyebabkan minat mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila menjadi kurang). Sebagai contoh, tantangan yang datang dari luar, termasuk krisis keteladanan yang terjadi di kalangan elite politik serta meningkatnya gaya hidup yang cenderung hedonistik dalam masyarakat.

Selanjutnya Soepomo menyatakan, bahwa dalam sistem kekeluargaan sikap warga negara bukan sikap yang selalu bertanya: "apakah hak-hak saya?". Akan tetapi sikap yang menanyakan: "apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia ini?...inilah pikiran yang harus senantiasa diinsyafkan oleh kita semua (Latif, 2020).

Dalam negara Republik Indonesia, tidak ada ruang untuk perbedaan dalam hal keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang harus menghormati dan menghargai keberagaman agama serta tidak boleh melakukan tindakan atau sikap yang menentang agama atau memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Ini merupakan tantangan dan dinamika yang harus dihadapi dalam melaksanakan Sila

Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal itu memang sesuai dengan karakteristik alami kebangsaan kita. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa bangsa kita memiliki kemampuan untuk menggabungkan dengan harmonisasi dalam bidang kebudayaan dan spiritualitas secara luas. Keanekaragaman cita-cita yang berbeda-beda, baik yang berasal dari dalam maupun luar, diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan spiritual dan fisik yang mendasar. Ini adalah inti dari negara Pancasila, di mana sila pertamanya meliputi dan menerangi sila-sila lainnya secara bersamaan.

Dalam Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, terdapat aspek dinamis dan tantangan yang mencerminkan sifat-sifat hakikat manusia yang menjadi dasar dari sila ini. Selain itu, sifat-sifat kepribadian Indonesia atau kepribadian Pancasila juga tergambar dalam sila ini, karena bangsa Indonesia sendiri dianggap sebagai sumber Pancasila. Sebelum proklamasi kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila telah terwujud dalam budaya dan agama, dan setelah negara dibentuk, nilai-nilai Tri-Prakara juga menjadi bagian dari kepribadian Indonesia. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa elemen-elemen yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pada hakikatnya merupakan nilai-nilai budaya dan religius yang telah tetap ada selama berabad-abad. Meskipun mengalami perubahan dan perbedaan dalam kondisi bangsa Indonesia, nilai-nilai ini merupakan aspirasi masyarakat yang terdapat dalam pikiran dan hati mereka, namun dalam kenyataannya hanya dapat direalisasikan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemungkinan yang selalu berubah meskipun prinsip

dasarnya tetap.

Perubahan dan rintangan yang terjadi dalam Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” adalah perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia telah berhasil mencapai momen yang membahagiakan dengan sukses membawa rakyat Indonesia menuju pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera. Apa yang dimaksud dengan “bersatu?” Ini berarti bahwa negara Indonesia harus menjadi satu kesatuan dan tidak terbagi menjadi negara-negara yang bergabung dalam suatu federasi. Apakah bukanlah persatuan nasional menjadi pondasi penting bagi sebuah negara, baik itu dalam lingkup domestik maupun internasional. Dalam konteks ini, tujuan negara adalah untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan seluruh warga Indonesia, tanpa memandang latar belakang etnis maupun wilayah asal mereka. Selain itu, sila ketiga juga menekankan pentingnya pemahaman yang mengandung elemen sejarah dan perjuangan bahwa persatuan Indonesia terlihat dari peristiwa yang terjadi dari masa lalu hingga masa depan, sebagaimana yang tertuang dalam ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika”. Konsep ini mencerminkan keseimbangan dan harmoni yang selalu berubah-ubah dalam bentuknya namun tetap mendasari semua perbedaan.

Perubahan dan situasi yang dihadapi dalam Sila Keempat “Pemerintahan yang bijaksana dan partisipatif berdasarkan musyawarah/perwakilan”. Dalam teks ini terdapat dua pandangan filosofis utama, yaitu bahwa negara berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan semua warga negara dan juga bertujuan mewujudkan demokrasi sosial-ekonomi.

Selain itu, teks ini juga menyatakan pentingnya musyawarah atau demokrasi dalam konteks politik. Kedua hal ini merupakan tujuan politik dalam suatu negara, yang melibatkan partisipasi rakyat sebagai aspek penting yang terdapat dalam ketiga unsur tersebut. Terletak pada dasar yang paling fundamental, yaitu prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi Indonesia. Demikianlah, pada prinsipnya, esensi dan karakteristik negara, keberadaan rakyat, dan demokrasi dapat ditemukan dalam hakikat manusia sebagai landasan paling fundamental. Dalam hakikatnya, kerakyatan dan demokrasi tidak bergantung pada waktu dan keadaan, melainkan didasarkan pada esensi dan karakter manusia. Walau begitu, hubungan yang serupa antara hidup bersama keluarga dan negara monodualis dalam hal elemen-elemen pokoknya menjelaskan mengapa sejak awal deklarasi kemerdekaan, negara kita diinginkan sebagai negara keluarga yang tidak hanya melibatkan ke dalam tetapi juga melibatkan keluarga lain di luar.

Perubahan dan hambatan dalam implementasi Sila Kelima yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Mengungkapkan bahwa mencapai keadilan dan kemakmuran adalah tujuan yang jelas bagi bangsa kita setelah memproklamkan kemerdekaan untuk membentuk negara. Di samping itu, para pelaku utama yang mendirikan negara dan membentuk pemerintahan di Indonesia telah memberikan perintah mengenai pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang harus direalisasikan dalam semua aspek dan komponen pembangunan nasional. Oleh karena itu, kepentingan pribadi atau individu pada dasarnya tidak sepenuhnya tergantung

pada kekuasaan individu itu sendiri, atau sebaliknya sepenuhnya diatur oleh negara. Namun, negara bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan umum dan juga kepentingan individu warga negaranya, yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab individu itu sendiri. Negara memberikan peluang dan menyelenggarakan bantuan yang optimal kepada individu, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk mewujudkan hasrat, kebutuhan, dan kepentingan pribadi. Hal utama adalah bahwa Sila Kelima ini melibatkan aspirasi kemanusiaan yang memenuhi esensi yang adil sebagai dasar terdalam yang paling luas dan abstrak, umum, universal, dan tetap tidak berubah. Dalam pengertian ilmiah klasik, ini berarti memastikan bahwa semua hak yang ada di dalam kehidupan bersama sebagai interaksi antarindividu dipenuhi, dan ini menjadi suatu kewajiban. Prinsip keadilan distributif, keadilan patuh, dan keadilan komutatif merupakan komponen penting dalam kesepakatan bersama dalam masyarakat Indonesia. (Notonagoro, 1983) mencatat dalam penelitiannya bahwa Akhirnya, Pancasila, yang merupakan landasan negara, juga dapat disebut sebagai pandangan dasar yang mengatur negara.

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, Anda dapat menyimpulkan hal-hal berikut ini dan mencatatnya di dalam buku catatan Anda. Silakan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam evaluasi pembelajaran ini untuk mengevaluasi pencapaian Anda dalam pembelajaran.

Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Andakerjakansoal berikut;

1. Bagi bangsa Indonesia, pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang tepat, karena di dalamnya terkandung....
 - a. Nilai-nilai luhur
 - b. Pemahaman tentang negara
 - c. Penegrtian mengenai filsafat
 - d. Keindahan dan pandangan hidup
2. Pernyataan dibawah ini adalah benar, kecuali
 - a. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa
 - b. Pancasila adalah dasar negara republic Indonesia
 - c. Pancasila adalah sumber tertib hukum tertinggi
 - d. Pancasila adalah landasan idiil bangsa Indonesia
3. Sila ke 2 pancasila dapat diimplementasikan melalui.....
 - a. Menghormati pemeluk agama lain
 - b. Cinta dan bangga terhadap produk dalam negeri
 - c. Mengembangkan sikap tenggang rasa
 - d. Menghormati pendapat orng lain
4. Berikut ini yang merupakan penyimpangan terhadap sila ke 3 pancasila adalah....
 - a. Berbuat semena-mena terhadap orang lain
 - b. Mengganggu teman yang sedang beribadah

-
- c. Tidak mengikuti upacara bendera
 - d. Tidak menghargai pendapat orang lain
5. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan pancasila merupakan penjabaran pancasila sebagai....
- a. Sumber dari segala hukum
 - b. Perjanjian luhur
 - c. Cita-cita bangsa Indonesia
 - d. Satu-satunya asas kehidupan bernegara
6. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu...
- a. Institutional dan Infrastructur
 - b. governance dan government
 - c. Institutional dan human resources
 - d. governance dan human resources
 - e. Infrastructur dan government
7. Apa yang menjadi makna Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia.....
- a. Pancasila adalah Kepribadian Bangsa Indonesia
 - b. Pancasila adalah Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia
 - c. Pancasila adalah Jiwa Bangsa Indonesia
 - d. Pancasila adalah sumber tertib hukum dari Negara Republik Indonesia
8. Apa yang menjadi makna Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia....

-
- a. Pancasila adalah Kepribadian Bangsa Indonesia
 - b. Pancasila adalah sumber tertib hukum dari Negara Republik Indonesia
 - c. Pancasila adalah Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia
 - d. Pancasila adalah Jiwa Bangsa Indonesia
9. Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika....
- a. Negara Indonesia harus memisahkan diri menjadi beberapa negara yang berdaulat
 - b. Negara Indonesia harus menjadi satu kesatuan dan tidak terbagi menjadi negara-negara yang bergabung dalam suatu federasi
 - c. Negara Indonesia harus memisahkan diri dari negara-negara tetangga
 - d. Negara Indonesia harus bergabung dengan negara-negara tetangga dalam suatu federasi
10. Apa yang dimaksud dengan perubahan dan situasi yang dihadapi dalam Sila Keempat...
- a. Pemerintahan yang tidak memperhatikan kebutuhan warga negara
 - b. Pemerintahan yang otoriter dan tidak melibatkan partisipasi rakyat
 - c. Pemerintahan yang tidak melibatkan musyawarah atau demokrasi
 - d. Pemerintahan yang bijaksana dan partisipatif berdasarkan musyawarah/perwakilan

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawabanyang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$

Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | |
|------|-------|
| 1. A | 6. C |
| 2. D | 7. B |
| 3. C | 8. A |
| 4. C | 9. B |
| 5. A | 10. D |

Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memahami materi di BAB ini dan Anda sudah menyelesaikan Soal yang diberikan, silahkan membac sumber lain yang ada di referensi. Anda juga dapat menyimak beberapa video di bawah ini untuk memperdalam pemahaman Anda.

1. PANCASILA: Membangun Karakter dan Janji Bernegara

- Sila 1.

Ketuhanan Yang Maha Esa



<http://bit.do/fLwNg>

<https://www.youtube.com/watch?v=WomLUM>

JahC0

2. PANCASILA: Membangun Karakter dan Janji Bernegara

– Sila 2.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab



<http://bit.do/fLwNk> <https://www.youtube.com/>

[watch?v=olTE00iJHEY](https://www.youtube.com/watch?v=olTE00iJHEY)

3. PANCASILA: Membangun Karakter dan Janji Bernegara

– Sila 3.

Persatuan Indonesia



<http://bit.do/fLwNs> <https://www.youtube.com/>

[watch?v=h1Hdo-qq6Y0](https://www.youtube.com/watch?v=h1Hdo-qq6Y0)

4. PANCASILA: Membangun Karakter dan Janji Bernegara - Sila 4.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan



<http://bit.do/fLwNL> <https://www.youtube.com/watch?v=JYhQIKhKN9I>

5. PANCASILA: Membangun Karakter dan Janji Bernegara - Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia



<http://bit.do/fLwN6> <https://www.youtube.com/watch?v=4kEE1jjP0K4>

6. Untuk lebih memahami dinamika dan tantangan Pancasila pada era globalisasi, mahasiswa diminta untuk menganalisis penggalan-penggalan pidato kebangsaan yang disampaikan oleh mantan Presiden dan Presiden Republik Indonesia sebagai berikut:

- i. Pidato Presiden Soeharto Pada Upacara Peringatan Lahirnya Pancasila



<http://bit.do/fLwPd>

<https://soeharto.co/1968-06-01-pidato-presiden-soeharto-pada-upacara-peringatan-lahirnya-pancasila/>

ii. Pidato Lengkap Presiden Ketiga RI, BJ Habibie

<http://bit.do/fLwPr>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/01/lm43df-ini-dia-%20pidato-lengkap-presiden-ketiga-ri-bj-habibie>

iii. Pidato Kebangsaan Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri

<http://bit.do/fLwRV>

<http://beritasore.com/2011/06/01/pidato-kebangsaan-presiden-republik-indonesia-ke-5-megawati-soekarnoputri/>

iv. Pidato Presiden Soesilo Bambang Yudoyono Saat Peringatan Hari Lahir Pancasila

<http://bit.do/fLwR5>

<https://www.antaranews.com/berita/261323/pidato-presiden-saat-peringatan-hari-lahir-pancasila>

v. Pidato Presiden Joko Widodo Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

<http://bit.do/fLwSb>

<https://kominfo.ngawikab.go.id/pidato-presiden-joko-widodo-pada-peringatan-hari-lahir-pancasila-1-juni-2020/>

Referensi

- Azhary. 1983. Pancasila dan UUD'1945. 1983. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Darmodiharjo, Darji dkk. 1983. Santiagi Pancasila: Suatu tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional. Dilengkapi dengan Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila dan Garis Garis Besar Haluan Negara. Surabaya: Usaha Nasional
- Departemen Agama.1980. Pedoman Pelaksanaan P-4 bagi Umat Kristen. Jakarta: Departemen Agama
- Departemen Agama. 1984. Pedoman Pelaksanaan P-4 bagi Umat Islam. Jakarta: Departemen Agama
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2006. Modul Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Pradnya Paramita
- Kemenristek Dikti. 2016. Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum: Pendidikan Pancasila. Ditjen Pembelajaran dan KemahasiswaanKemenristekdikti RI
- Krissantono. 1976. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila. Jakarta: Yayasan Proklamasi-CSIS
- LaboratoriumPancasilaIKIPMalang.1990.GlossariumSekitarPancasila. Surabaya: Usaha Nasional
- Latif, Yudi. 2020. Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan(Edisi Komprehensif). Jakarta: Mizan
- MPR RI. 2013. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Sekretariat Jenderal MPR RI
- Notonagoro.1983.PancasilasecaraIlmiahPopuler.Jakarta:BinaAksara
- Rosyadi. 2001. Pancasila dan Kewiraan untuk Pendidikan TenagaKesehatan. Jakarta: Widya Medika
- Syarbaini, Syahril. 2009. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ahmad. 2020. Pancasila Sebagai Dasar Negara. (OnLine)
-  <http://bit.do/fLwSk>
<https://www.yuksinau.id/pancasila-sebagai-dasar-negara/>
 (Diakses 29 Oktober 2020)
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2014. 45 butir PedomanPenghayatan dan Pengamalan Pancasila (OnLine).



<http://bit.do/fLwSv>

<https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html> (diakses 18 Oktober 2020)

Kris, Robert. 2019. Makna Setiap bagian Lambang Garuda Pancasila. (OnLine)



<http://bit.do/fLwSF>

<https://tutorialpelajaran.com/1667/makna-setiap-bagian-lambang-garuda-pancasila/> (diakses 20 Oktober 2020)

Daftar Istilah

An sich	: pada dirinya sendiri
Fairness	: keadilan
Free fight	: kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga lemah memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah
Liberalism	
Good governance	: pemerintahan yang baik
Hedonistic	: kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan hidup
Imperialisme	: sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara dan berkembang
Integralistik	: gambaran masyarakat sebagai suatu kesatuan organis yang integral akan semua yang ada di dalamnya, satu sama lain saling berhubungan erat dan merupakan satu kesatuan yang hidup
Leitmotive	: dorongan pokok
Leitstar	: bintang penuntun

Monopoli	: situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar local atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan
Monopsoni	: keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar
Nomokrasi	: kedaulatan hukum
Philosophie grondslag	: dasar falsafah negara
Prismatika	: cahaya spektrum aneka warna kehidupan
Rechtsideologie	: ideologi hukum
Staatsidee	: ideologi negara
Stenografisch verslag	: Laporan berupa ucapan tanpa teks tertulis
Tuhaniyah	: mengandung sifat/unsur ketuhanan/keilahian
Weltanschauung	: pandangan dunia

BAB V

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI I

Sahabat Mahasiswa, dalam bab ke lima ini Anda akan mendalami Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Bab ke 5 memuat dua aktivitas pembelajaran;;

Kegiatan Belajar 1; Hakikat Ideologi

Kegiatan Belajar 2; Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi
NegaraKegiatan

Kegiatan Belajar 1 : Hakikat Ideologi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 1, diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang asal mula dan keberadaan ideologi yang diadopsi oleh masyarakat di berbagai negara di dunia dalam tatanan negara mereka

Uraian Materi

Ideologi bermula dari gabungan kata "idea" dan "logos" yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos dan logos. Artinya adalah bahwa suatu ide didasarkan pada pemikiran yang sangat mendalam dan merupakan hasil pemikiran dalam bidang filsafat.

Ideologi merupakan suatu pandangan yang diyakini sebagai kebenaran, yang dirumuskan secara utuh dan memiliki panduan tindakan untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan berkelompok, berbangsa, dan bernegara (BP7 Pusat, 1992).

Menurut Yudi Latif, dalam kutipan Heywood (2012), Antonie Destuutt de Tracy (1754-18-36) adalah orang yang memperkenalkan kata "ideologi" secara publik pada tahun 1796 selama Revolusi Perancis. Ia mengusulkan agar ideologi menjadi dasar bagi semua bentuk penyelidikan, dengan harapan bahwa ideologi akan menjadi "Ratu Ilmu Pengetahuan".

Ada empat jenis ideologi yang berbeda

1. Ideologi konservatif, ideologi yang memelihara keadaan

yang ada (status quo), setidaknya secara umum walaupun membuka kemungkinan perbaikan dalam hal-hal teknis

2. Kontra ideologi, melegitimasi penyimpangan yang ada dalam masyarakat sebagai yang sesuai dan malah dianggap baik
3. Ideologi reformis, berkehendak untuk mengubah keadaan
4. Ideologi revolusioner, yang bertujuan mengubah seluruh sistem nilai masyarakat
5. (Syarbaini, 2009 mengutip BP7 Pusat, 1991)

Kaderi (2015, mengutip Christenson, dkk, 1971 dan Pranarka, 1987), Istilah ideologi pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf berkebangsaan Perancis, yang bernama Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1796, sewaktu revolusi Perancis tengah menggelora. Tracy menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat dan perkembangan ide-ide manusia atau yang biasa dikenal sebagai "Science of idea". Gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun Napoleon mencemoohnya sebagai khayalan, yang tidak memiliki nilai praktis. Dan pemikiran De Tracy ini sebenarnya mirip dengan impian Leibnitz yang disebut "one great system".

Selanjutnya, Kaderi (2015) merangkum beberapa Istilah ideologi, sebagaimana berikut ini:

1. Ideologi adalah sebagai kompleksitas pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi ses-

eorang (masyarakat), untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya.

2. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seseorang menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apayang dinilai baik dan tidak baik. (Poespowardojo, 1992).
3. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa, yang
4. menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan, untukmencapai tujuan masyarakat bangsa itu. (Mubyarto, 1992).
5. Ideologi adalah keharusan untuk melaksanakan dalam sikap, perilaku dan perbuatan penganutnya, kemudi-an juga usaha dapat diundangkannya secara legal, dan dihubungkan dengan suatu badan kelembagaan, yang didirikan untuk merealisasikanpola kepercayaan tersebut (Tjokroamidjojo, 1992).
6. Ideologi sebagai seperangkat gagasan, yang menjelaskan ataumelegalisasikan tatanan sosial, struktur kekuasaan, atau cara hidup, dilihat dari segi tujuan, kepentingan atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas, di mana ideologi itu muncul. (Newman, 1973).
7. Ideologi merupakan seperangkat asumsi dasar, baik normatif maupun empiris, mengenai sifat dan tujuan manusia atau masyarakat, agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan tertib politik.

Jadi, ideologi adalah sekumpulan prinsip panduan yang dipakai sebagai dasar. Memberikan panduan dan target yang akan dicapai dalam menjalankan dan memajukan kehidupan masyarakat dan negara, serta mencakup segala aspek kehidupan manusia. (Anthony dikutip Cheppy dan Suparlan, 1982).

Laboratorium Pancasila IKIP Malang (1981) telah merangkum peranan ideologi dalam kehidupan suatu bangsa dan negara yang mencakup aspek :

1. Tata cara bagaimana menanggapi realitas atau lingkunganhidup, baik segi-segi kepercayaan, agama, maupun bidangilmu pengetahuan
2. Sebagai pedoman hidup nilai-nilai dalam kehidupan tentang apa yang sebaiknya dilakukan (asas normatif), tata aturan tentang hak asasi, kewajiban masing-masing warga masyarakat
3. Segi perasaan, seperti kesadaran/kebanggaan harga diri/nasional, setia kawan, integritas, dan martabat sebagai manusia
4. Sikap dan pola tingkah laku yang menentukan semangat danmotivasi, mendorong usaha dan perjuangan. Berwujud pola dan kesepakatan dalam pemikiran, perjuangan dan tindakan. Pola ini menyangkut juga disiplin hidup atau tata cara yang melembaga dalam kehidupan masyarakat
5. Segi keterampilan dan kemampuan bagaimana melaksanakan dan mewujudkan ideologi yang diyakini itu da-

lam kehidupan, sistem pendidikan dan pengembangannya

6. Segi kelembagaan (organisasi) yang fungsi utamanya ialah melaksanakan ideologi tersebut seperti organisasi negara, organisasi politik, lembaga sosial, pendidikan, juga keluarga

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya berupa hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, unsur-unsurnya merupakan materi (bahan) Pancasila yang merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila (Rahayu, 2015).

Silahkan menuliskan simpulan dari materi di atas di buku catatan Anda. setelah itu, lanjutkan proses belajar ke aktivitas pembelajaran selanjutnya.

Kegiatan Belajar 2 : Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 2, Anda diharapkan dapat mengartikan peran Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam kehidupan sosial yang terorganisir dan negara yang berdaulat.

Uraian Materi

Pegangan resmi sejak Dekrit Presiden No. 150 Tahun 1959, adalah rumusan Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959, dengan sedikit perubahan rumusan silakeempat, yakni kata “permusyawaratan-perwakilan” diubah menjadi “permusyawaratan/perwakilan” sesuai dengan yang terdapat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7. (Latif, 2012)

Mulai dari tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi pijakan (dasar) negara, pandangan hidup, paham bangsa dan pengikat dalam kehidupan bersama dan tata negara Indonesia. Secara singkat, Pancasila adalah landasan yang stabil yang menyatukan dan menjadi panduan dinamis yang mengarahkan masyarakat dalam mencapai tujuan. Pancasila memainkan peran penting dalam menentukan identitas, karakter, etika, dan tujuan yang mengarah pada keberlanjutan negara.

Pancasila memainkan peran penting sebagai landasan bagi

negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan filosofisnya untuk mengatur dan merancang penyelenggaraan negara. Konsep ini dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara
2. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara
3. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi dalam negara memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Struktur kognitif, maksudnya keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan, untuk memahami dan menafsirkandunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar
2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan, yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
3. Norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang, untukmelangkah atau bertindak.
4. Bekal dan jalan bagi seseorang, untuk menemukan identitasnya, sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang, untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan
5. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat, untuk memahami,menghayati, serta memolakan tingkah lakunya, sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkand-

ung di dalamnya.

Kemudian dapat di implementasikan dengan:

1. Fungsi Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa
2. Berfungsi untuk mengarahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya.
3. Karena pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut
4. Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah, pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-citanya.

Terkait Dalam mengarahkan pembentukan kerangka harapan untuk model masa depan yang diinginkan oleh masyarakat yang baik, menurut Bung Hatta, visi Pancasila menginginkan adanya pencapaian "kesenangan, kemakmuran, harmoni, dan kebebasan", yang dapat disimpulkan sebagai kebahagiaan.

Menurut Suryana dan Kaswan (2015), suatu ideologi dapat diukur apakah berfungsi atau tidak melalui tiga aspek utama, yakni:

1. Realitas: mencerminkan kemampuan ideologi dalam mengagregasi dan mengadaptasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Ideologi harus mencer-

minkan citrayang sama dengan realitas masyarakat

2. Idealisme: kadar kualitas idealisme yang ada dalam ideologi untuk mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya, hingga gagasan vital dalam ideologi mampu diyakini sepenuhnya oleh para pendukungnya
3. Fleksibilitas: mencerminkan kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya

Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Andakerjakansoal berikut;

1. Bagaimana ideologi dapat digambarkan.....
 - a. Sebagai seperangkat gagasan yang menjelaskan tatanan sosial
 - b. Sebagai seperangkat gagasan yang menjelaskan cara hidup
 - c. Semua jawaban benar
 - d. Sebagai seperangkat gagasan yang menjelaskan struktur kekuasaan
2. Apa fungsi Pancasila sebagai struktur kognitif....
 - a. Memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar
 - b. Memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
 - c. Menjadi pedoman bagi seseorang untuk melangkah atau bertindak
 - d. Menemukan identitas sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang
3. Apa implementasi fungsi Pancasila sebagai sarana mempersatu masyarakat.....
 - a. Menjadi panduan dinamis dalam mencapai tujuan
 - b. Menjadi landasan yang menyatukan masyarakat
 - c. Semua jawaban benar

- d. Menentukan identitas, karakter, etika, dan tujuan negara
4. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila hendaknya...
 - a. Disesuaikan dengan ideologi lain
 - b. Ditafsirkan ulang
 - c. Dikontraskan dengan ideologi lain
 - d. Dipadukan dengan ideologi lain
5. Nilai-nilai pancasila yang tidak dapat diubah merupakan...
 - a. Nilai-nilai dasar
 - b. Pengembangan nilai-nilainya
 - c. Penjabaran dan operasional nilai-nilainya
 - d. Operasionalisasi nilai-nilainya
6. Apa yang dimaksud dengan ideologi...
 - a. Sebuah sistem yang teratur dan menyeluruh
 - b. Sebuah penyelarasan dan penggabungan pola pikir dan kepercayaan
 - c. Sebuah pilihan yang memiliki keterkaitan dalam proses perwujudannya
 - d. Sebuah gagasan, ide, dan ajaran
7. Apa yang dimaksud dengan ideologi tertutup...
 - a. Ideologi yang tidak bersifat totaliter dan memaksa
 - b. Ideologi yang bersifat totaliter dan memaksa
 - c. Ideologi yang tidak memiliki implikasi dalam kehidupan sehari-hari

-
- d. Ideologi yang tidak perlu diwaspadai oleh negara Indonesia
8. Apa hubungan ideologi dengan hal-hal politik...
- a. Ideologi erat kaitannya dengan hal-hal politik
 - b. Ideologi merupakan sebuah gagasan, ide, dan ajaran
 - c. Ideologi merupakan pilihan yang memiliki keterkaitan dalam proses perwujudannya
 - d. Ideologi merupakan sebuah sistem yang teratur dan menyeluruh
9. Bagaimana implikasi ideologi dalam kehidupan sehari-hari...
- a. Ideologi bersifat totaliter dan memaksa
 - b. Ideologi hanya berlaku untuk generasi sekarang
 - c. Ideologi dapat menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman
 - d. Ideologi tidak memiliki implikasi dalam kehidupan sehari-hari
10. Apa perbedaan antara ideologi terbuka dan tertutup.....
- a. Ideologi terbuka hanya berlaku untuk generasi sekarang, sedangkan ideologi tertutup tidak
 - b. Ideologi terbuka bersifat inklusif dan menginspirasi masyarakat, sedangkan ideologi tertutup tidak
 - c. Ideologi terbuka menghargai keberagaman, sedangkan ideologi tertutup tidak
 - d. Ideologi terbuka bersifat totaliter dan memaksa, sedangkan ideologi tertutup tidak

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawabanyang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$

Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

1. C
2. A
3. B
4. D
5. A
6. D
7. B
8. A
9. C
10. C

Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memahami materi di BAB ini dan Anda sudah menyelesaikan Soal yang diberikan, silahkan membac sumber lain yang ada di referensi. Anda juga dapat menyimak beberapa video di bawah ini untuk memperdalam pemahaman Anda.



<http://bit.do/fLwTn>

https://www.youtube.com/watch?v=Tj1KD3ioGF-Y&ab_channel=CNNIndonesia



<http://bit.do/fLwTy>

<https://www.facebook.com/1794486427527504/videos/266898327225484/>



<http://bit.do/fLwTC>

https://www.youtube.com/watch?v=RmcpeAjMU-AY&ab_channel=KOMPASTV

Referensi

- BP7-Pusat. 1994. Bahan Penataran: P4, Pancasila/P-4. Jakarta: BP7-Pusat
- Kaderi, M. Alwi. 2015. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Banjarmasin: Antasari Press
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. 1981. Glossarium Sekitar Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional
- Latif, Yudi. 2012. Negara Paripurna: historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rahayu, Ani Sri. 2015. Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara
- Republik Indonesia. 2005. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Suryana, H.T. Effendy dan Kaswan. 2015. Pancasila & Ketahanan Jati Diri Bangsa: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Bandung: Refika Aditama
- Syarbaini, Syahril. 2009. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia Indonesia

Daftar Istilah

Feasible	: kelayakan
Good society	: masyarakat yang baik
Guiding principle	: prinsip pemanduan bagi suatu organisasi
Historis	: kesejarahan
Hogere optrekking	: peningkatan (penarikan ke atas)
Human resources	: sumber daya manusia
Integritas	: sikap teguh pertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadidasaryangmelekatpadadiri sendiri sebagai nilai-nilai moral
Kognitif	: pengetahuan
Komutatif	: dalamkeadaansalingdapatberhubungan(mudah dihubungi); 2 mudah dipahami (dimengerti) pembangkitan nilai-nilai tradisional secara politik
Monodualis	: manusiasebagaimakhlukindividu sekaligussosial yang membutuhkan bantuan antar manusia, hewan, dan tumbuhan
Status quo	: keberadaan negara dalam keadaan tetapsebagaimana sekarang
Kulturil	: kebudayaan
Ligature	: ikatan budaya
National interest	: kepentingan nasional yang ditujukan untuk masyarakat luas yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu
Normative	: berpegang teguh pada norma
Overlapping consensus	: sebuah hipotesis mengenai jenis konsepsi yang sebagian besar akan dikembangkan oleh masyarakat yang tersusun dengan baik

Public discourse : public speaking, proses komunikasi
di hadapan khalayak

BAB VI

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI II

Sahabat Mahasiswa, dalam bab ke enam ini Anda akan mendalami Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Bab ke 6 memuat dua aktivitas pembelajaran;;

Kegiatan Belajar 1; Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Kegiatan Belajar 2; Pancasila Sebagai Ideologi Tengah Tanpa Oposisi Kegiatan

Kegiatan Belajar 1 : Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 1, diharapkan Anda dapat mendeskripsikan konsep Pancasila sebagai Ideologi Terbuka dalam menghadapi tantangan zaman di berbagai era kehidupan.

Uraian Materi

Sifat dinamis Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara ini dijabarkan oleh Soeharto ke dalam ideology, dengan menegaskan bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi terbuka. Pentingnya penegasan ini sejak 1985 tidak dapat diabaikan karena dapat mencegah potensi bahaya yang mungkin timbul akibat pengembangan Pancasila menjadi sebuah ideologi. Ancaman dogmatisme yang bertentangan dengan sifat Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara, dapat dihindari dengan penegasan ini.

Dalam kerangka pemikiran Mannheim, Pancasila dapat disebut sebagai ideologi komprehensif yang berlaku di tingkat negara, tetapi tidak sepenuhnya tertutup seperti fasisme, komunisme, dan fundamentalisme. Diharapkan Pancasila memiliki kemampuan adaptasi yang selalu mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Soekarno menggambarkan Pancasila sebagai “pengarah dinamis yang seperti bintang penuntun, menggerakkan pergerakan bangsa ke arah depan”. Bisa memantau perkembangan yang terjadi di

negara-negara lain yang menganut ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan prinsip-prinsip:

1. Nilai Dasar: yang merupakan representasi nilai dan norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tidak berubah-ubah sepanjang nilai tersebut dipedomani, yaitu sila-sila yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945
2. Nilai Instrumental: yang merupakan pendukung utama nilai dasar, mengikuti perkembangan zaman dalam dan luar negeri, dapat berubah. Berupa Tap MPR, UU, PP dan peraturan perundangan lainnya sebagai tatanan dalam pelaksanaan ideologi Pancasila yang merupakan pegangan berkehidupan berbangsa dan bernegara
3. Nilai Praktis: yang harus ada dalam praktik penyelenggaraan negara, sifatnya abstrak. Berupa semangat dalam pelaksanaan negara dari pusat hingga tingkat terbawah dalam struktur sistem pemerintahan negara Indonesia. Semangat penyelenggara dalam membangun sila-sila dalam Pancasila secara konsekuen dan istiqamah, misalnya keteladanan antikorupsi

(Srijanti dkk, 2009)

Terdapat 3 faktor yang mendukung adanya pemikiran keterbukaan dari ideologi pancasila, yaitu:

1. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional berencana dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat

2. Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya
3. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau yang pernah dialami bangsa

Dengan tekad yang kuat, kita bertekad untuk memperkuat pemahaman akan nilai-nilai dasar Pancasila yang tak tergoyahkan sebagai landasan dalam kehidupan bersosialisasi, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, kita juga berkeinginan untuk mengembangkan secara inovatif dan enerjik dengan tujuan mencapai tujuan nasional.

Pentingnya transparansi ideologi bukan hanya merupakan pengulangan dari cara berpikir yang dinamis dari para pendiri negara kita pada tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual dalam era modern yang terus berubah dengan cepat. Untuk itu, penting bagi kita untuk memahami sepenuhnya nilai-nilai dasar Pancasila yang tak tergoyahkan, nilai-nilai instrumental yang terus berkembang dengan dinamis, dan bagaimana penyelenggaraan negara yang menjadi pelaksana nilai-nilai tersebut. Dengan memberikan respon yang positif terhadap hal ini, kita akan melihat adanya berbagai implikasi yang akan muncul. (Moerdiono dalam Oesman dan Alfian, 1992)

Batas-batas keterbukaan Ideologi Pancasila yang tak boleh dilanggar:

1. Stabilitas nasional yang dinamis

2. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, komunisme
3. Mencegah berkembangnya paham liberalis
4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggeli-sahkan kehidupan masyarakat
5. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus (Syarbaini, 2009)

Banyak faktor yang memungkinkan terbukanya ideologi Pancasila, salah satunya adalah pengkonstruksian Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Sehingga, proses pengembangan Pancasila sebagai dasar negara harus terus dipertahankan dalam ranah berpikir yang berbasis pada filsafat yang rasional dan reflektif. Selain itu, kemungkinan ini juga terjadi karena Pancasila merupakan hasil dari kesepakatan banyak pihak yang berbeda-beda dalam hal ideologi, agama, kebiasaan, dan kelompok. Ini dicapai melalui proses mencari kesepakatan dari beragam aspirasi ideologis, agama, adat istiadat, dan golongan, yang secara proporsional terwakili dalam pembentukan dasar negara dan Konstitusi Proklamasi. Selain itu, kemungkinan ini ada karena prinsip-prinsip Pancasila hanya berlaku dalam konteks publik dan hubungan antarsosial, bukan di lingkup pribadi dan internal.

Keberhasilan dalam menciptakan rekonsiliasi dalam Pancasila dapat dicapai karena dalam sejarahnya kelima sila Pancasila memiliki kombinasi dari beragam keyakinan, pemahaman, dan harapan yang ada di Indonesia. Sebagai sintesis dari semua aliran agama dan kepercayaan, sila pertama

melambangkan keragaman keyakinan. Kedua sila ini adalah ringkasan sintetis dari semua nilai dan tujuan sosial-kemanusiaan yang berlaku di seluruh dunia. Sila ketiga adalah sebuah formulasi ringkas yang menggambarkan penggabungan identitas suku ke dalam satu kesatuan nasional yang beragam. Sila yang keempat adalah gambaran sintesis dari berbagai pandangan tentang kedaulatan. Sila kelima adalah hasil dari penggabungan semua ide tentang keadilan sosial-ekonomi.

Pada tanggal 30 September 1960, saat berbicara di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Soekarno mengenalkan dan menunjukkan Pancasila sebagai suatu peningkatan dari deklarasi kemerdekaan yang tidak memuat konsep keadilan sosial, maupun manifesto komunis yang tidak mengandung gagasan keberadaan Tuhan. Dia berpendapat bahwa Liberalisme dan Komunisme belum mampu menyatukan beragam sistem nilai dan ideologi yang ada di dunia. Usaha untuk membuat nilai-nilai Pancasila menjadi titik pertemuan dalam hubungan antarbangsa tercermin dalam Dasasila Bandung, yang merupakan pernyataan resmi dari Konferensi Asia-Afrika 1955. (Latif, 2020).

Sebagai ideologi terbuka, perlu diciptakan struktur proses berupa dinamisasi, demokratisasi, fungsionalisasi, dan institusionalisasi melalui setidaknya ada tiga dimensi yang mesti diperhatikan(Budiyono,2009):

1. Dimensi Teleologis, yaitu menunjukkan bahwa pembangunan mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945

2. Dimensi Etis, yang menunjukkan bahwa dalam Pancasila, manusia dan martabat manusia mempunyai kedudukan yang sentral
3. Dimensi Integral-Integratif, yaitu menempatkan manusia tidak secara individualisme melainkan dalam konteks strukturalnya

Kegiatan Belajar 2 :

Pancasila Sebagai Ideologi Tengah Tanpa Oposisi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 2, diharapkan Anda mampu menggambarkan Pancasila sebagai Ideologi Tengah yang tidak terpengaruh oleh berbagai ideologi yang ada di dunia.

Uraian Materi

Menurut pendapat dan karya-karya para penyusun dan perumus Pancasila, meskipun hanya memiliki lima prinsip dasar, Pancasila dapat dianggap sebagai Ideologi Tengah terutama dalam studi politik dan studi filsafat. Adaptasi atau berbagai bentuk dan variasi ideologi ini, secara alamiah mengalami perbedaan yang bertentangan satu sama lain, menghasilkan istilah Ideologi Kanan (Pemikiran yang menekankan individualisme, liberalisme, dan kapitalisme) dan istilah Ideologi Kiri (Pemikiran yang mementingkan kolektivisme, sosialisme, dan komunisme). Secara pelajar, pertemuan antara sosialisme dan komunisme pada sisi satu dan kapitalisme dan liberalism pada sisi lain telah lama terjadi dalam konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) yang juga diusulkan dalam Ideologi Pancasila. Oleh karena itu, dalam pidato penganugerahan gelar Doktor HC di UGM pada tahun 1956, Mohammad Hatta menyampaikan bahwa dengan menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai elemen awal dalam Pancasila, fondasi ideologi negara dapat terbentuk. Hal ini dikarenakan negara dan politik negara akan

didasarkan pada moral yang kokoh (Arifin, 2018).

Pancasila, sebagai fondasi ideologi nasional, melibatkan ideologi negara yang terkait dengan struktur pemerintahan dan ideologi yang terkait dengan nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa. Pengungkapan dan inklusi ideologi nasional dalam Pembukaan UUD 1945 meliputi konsepsi perjuangan, dipenuhi dengan semangat dan tekad bangsa untuk mencapai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Menurut BP- & Pusat (1993) yang dikutip dalam Syarbaini (2009), teks ini berisi tentang sebuah ideologi yang mengandung ajaran, doktrin, teori, dan/atau ilmu yang berkaitan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Ideologi ini diyakini sebagai kebenaran dan disusun dengan sistematis serta memiliki petunjuk pelaksanaan. Pancasila, yang merupakan prinsip ideologi nasional Indonesia, menggambarkan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia dalam cara berpikir dan cara kerja yang telah dilakukan selama perjuangan sejarah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghayati Pancasila..

Dalam rangka menjaga keberlanjutan ideologinya dan tetap menjadi titik pertemuan seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi bahaya pembubaran negara, sebagai negara Indonesia perlu terus waspada terhadap berbagai ideologi seperti kapitalisme, marxisme, sosialisme, komunisme, anarkisme, fasisme, liberalisme, radikalisme, dan konservatisme. Semua tantangan tersebut harus dihadapi dengan semangat cinta tanah air dan kesetiaan untuk membela Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Non-Pancasila

(Modifikasi dari Kaderi, 2015)

ASPEK	LIBERALISME/ KAPITALISME	KOMUNISME	SOSIALISME	PANCASILA
Agama	Agama uru- sanpribadi Bebas untuk beragama atau tidak beragama	Ateis (Tuhan telah mati) Agama ada- lah candu masyarakat Agama ha- rus dijauh- kan dari masyarakat	Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan	Bebas memi- lih salah satu agama Agama harus menjiwai ke- hidupan ber- masyarakat, berbangsa bermasyarakat
Ekonomi	Peran nega- ra kecil Swasta men- dominasi Kapitalisme Monopo- lisme Persaingan bebas	Peran nega- ra dominan Demi kolekti- tas, demi negara Monopoli negara	Peran negara demi untuk pemerataan Keadilan dis- tributive yang diutamakan	Peran negara ada agar tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat
Politik dan Hukum	Demokrasi liberal Hukum untuk melindungi individu Politik untuk melindungi individu	Demokrasi rakyat Kekuasaan mutlak pada Partai Politik Hukum un- tuk melang- gengkan komunis	Demokrasi un- tuk kolektivitas Diutamakan kebersamaan Masyarakat sama dengan negara	Demokrasi Pancasila Hukum untuk menjun- jung tinggi keadilan dan keebraadaan individu dan masyarakat

Pandangan terhadap Individu dan masyarakat	Individu lebih penting daripada masyarakat Masyarakat diabdikan bagi individu	Individu tidak penting Masyarakat tidak penting Kolektivitas yang dibentuk negaralah yang terpenting	Masyarakat lebih penting daripada individu	Individu dan masyarakat sama-sama diakui keberadaannya Hubungan individu dan masyarakat dilandasi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan Masyarakat ada karena individu Individu akan berarti jika hidup di tengah masyarakat
--	--	--	--	---

Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Anda kerjakan soal berikut;

1. Apa manfaat dari ideologi terbuka.....
 - a. Merupakan sebuah cita-cita dan gagasan sekelompok golongan tertentu
 - b. Menghargai keberagaman
 - c. Semua jawaban benar
 - d. Sebagai seperangkat gagasan yang menjelaskan struktur kekuasaan
2. Pancasila memuat nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat mendasar dan tidak langsung bersifat operasional karena pancasila sebagai
 - a. Ideologi nasional
 - b. Ideologi pembangunan
 - c. Ideologi terbuka
 - d. Ideologi masa depan
3. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang secara konstitusional mengatur negara republik indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya. Yang termasuk unsur-unsur negara yaitu
 - a. Wilayah, TNI, Polri dan pemerintahan negara
 - b. Rakyat, TNI, polri dan pemerintahan negara
 - c. Rakyat, Pemerintahan negara dan partai politik
 - d. Rakyat, wilayah dan pemerintahan negara

-
4. Apa yang dapat dihindari dengan penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka...
 - a. Ancaman fasisme
 - b. Ancaman komunisme
 - c. Ancaman fundamentalisme
 - d. Ancaman dogmatisme
 5. Apa yang mendukung pemikiran keterbukaan ideologi Pancasila...
 - a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional berencana dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat
 - b. Kenyataan menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi komprehensif
 - c. Kenyataan menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi dogmatis
 - d. Kenyataan menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi tertutup
 6. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi komprehensif...
 - a. Pancasila sebagai ideologi yang dogmatis
 - b. Pancasila sebagai ideologi yang tertutup
 - c. Pancasila sebagai ideologi yang dalam proses pembangunan nasional berencana dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat
 - d. Pancasila sebagai ideologi yang berlaku di tingkat negara

7. Apa yang dimaksud dengan ideologi kanan.....
 - a. Ideologi yang mendukung Pancasila
 - b. Ideologi yang berlawanan dengan Pancasila
 - c. Ideologi yang tidak ada hubungannya dengan Pancasila
 - d. Ideologi yang tidak perlu diwaspadai oleh negara Indonesia
8. Apa yang dimaksud dengan ideologi nasional yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945...
 - a. Ideologi yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945
 - b. Ideologi yang berhubungan dengan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara
 - c. Ideologi yang berhubungan dengan persyaratan sebagai ideologi Pancasila
 - d. Ideologi yang berhubungan dengan pandangan hidup bangsa
9. Apa yang dimaksud dengan pertemuan antara ideologi kiri dan kanan dalam konsepsi Negara Kesejahteraan....
 - a. Pertemuan antara sosialisme dan komunisme dengan kapitalisme dan liberalism
 - b. Pertemuan antara ideologi kiri dan kanan dalam konfigurasi ideologi
 - c. Pertemuan antara Pancasila dengan ideologi kiri dan kanan
 - d. Pertemuan antara ideologi kiri dan kanan dalam

Pembukaan UUD 1945

10. Apa yang dimaksud dengan konsepsi Negara Kesejahteraan...
 - a. Konfigurasi ideologi yang terkandung dalam Pancasila
 - b. Ideologi yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945
 - c. Persyaratan sebagai ideologi Pancasila sebagai Ideologi Tengah Tanpa Oposisi
 - d. Pertemuan antara ideologi kiri dan kanan dalam konsepsi Negara Kesejahteraan

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawabanyang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$

Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | |
|------|-------|
| 1. B | 6. D |
| 2. C | 7. B |
| 3. A | 8. D |
| 4. D | 9. A |
| 5. A | 10. D |

Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memahami materi di BAB ini dan Anda sudah menyelesaikan Soal yang diberikan, silahkan membac sumber lain yang ada di referensi. Anda juga dapat menyimak beberapa video di bawah ini untuk memperdalam pemahaman Anda.



<http://bit.do/fLwTn>

https://www.youtube.com/watch?v=Tj1KD3i-oGFY&ab_channel=CNNIndonesia



<http://bit.do/fLwTy>

<https://www.facebook.com/1794486427527504/videos/266898327225484/>



<http://bit.do/fLwTC>

https://www.youtube.com/watch?v=RmcpEAj-MUAY&ab_channel=KOMPASTV

Referensi

Arifin, Anwar. 2018. Pancasila: Ideologi Tengah tanpa Oposisi. Jakarta: Nufu Citra Mandiri kerjasama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia

BP7-Pusat. 1994. Bahan Penataran: P4, Pancasila/P-4. Jakarta: BP7-Pusat

Budiyono, Kabul. 2009. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi.

Bandung: Alfabeta

Kaderi, M. Alwi. 2015. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi.

Banjarmasin: Antasari Press

Latif, Yudi. 2020. Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembangunan (Edisi Komprehensif). Jakarta: Mizan

Oetojo Oesman dan Alfian (Penyunting). 1992. Pancasila sebagai Ideologi: dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Jakarta: BP7-Pusat

Republik Indonesia. 2005. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Srijanti, A. Rahman, dan Purwanto. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi: Mengembangkan Etika Berwarga Negara. Jakarta: Salemba Empat

Syarbaini, Syahril. 2009. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

Jakarta: Ghalia Indonesia

Berita Baru. 2019. Revitalisasi Pancasila Tidak Jalan, Azyumardi Kritik Kinerja Pemerintah. (OnLine).



<http://bit.do/fLwT3>

<https://beritabarbaru.co/revitalisasi-pancasila-tidak-jalan-azyumardi-kritik-kinerja-pemerintah/> (diakses 15 Oktober 2020)

Tim Media Rilis. 2018. Pancasila Aktualisasi Nasionalisme dan Agama, Bangsa Indonesia Harus Bangga. (OnLine).



<http://bit.do/fLwUe>

<https://damailahindonesiaku.net/pancasila-aktualisasi-nasionalisme-dan-agama-bangsa-indonesia-harus-bangga.html> (diakses 12 Oktober 2020)

Daftar Istilah

Anarkisme	: filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara, kembali ke hukum rimba
Distributive	: perlakukan sesuai jasa yang telah dilakukan
Fasisme	: paham berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas mutlak tanpa pengecualian
Ideology	: sekumpulan gagasan, ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis
Istiqamah	: konsisten tegak lurus, berpendirian teguh
Kapitalisme	: sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk memperoleh keuntungan
Konservatisme	: perlakukan tanpa melihat jasa yang telah dilakukan
Liberalisme	: tradisi politik berdasarkan kebebasan dan persamaan hak yang mencita-citakan suatu masyarakat bebas
Manifesto	: pernyataan sikap yang diumumkan kepada publik, sering bermuatan politis
Radikalisme	: gerakan politik yang cenderung tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan electoral

Rejuvenasi	: penyegaran kembali
Rekonsiliatif	: upaya pemulihan
Religion based ideology	: ideologi berdasarkan agama
Religious	: keagamaan
Revitalisasi	: proses menghidupkan kembali
Sciences idea	: ajaran tentang pengertian-pengertian dasar atau cita-cita
Sosialisme / Sentausa	: (sentosa) bebas dari segala kesukaran dan bencana; aman tenteram; sejahtera, serangkaian system ekonomi dan social yang ditandai kepemilikan social atas alat-alat produksi dan manajemen pekerja secara politik

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI III

Sahabat Mahasiswa, dalam bab ke tujuh ini Anda akan mendalami Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Bab ke 7 memuat dua aktivitas pembelajaran;;

Kegiatan Belajar 1; Pancasila Sebagai Working Ideology

Kegiatan Belajar 2; Tantangan Dan Kritik Ideologi Pancasila

Kegiatan Belajar 1 : Pancasila Sebagai Working Ideology

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengamati dengan seksama Kegiatan Belajar 1, diharapkan Anda bisa menggambarkan tentang jalur dan ruang lingkup yang harus ditempuh dalam mewujudkan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang benar-benar berfungsi.

Uraian Materi

Pemulihan kembali kepentingan terhadap Pancasila terjadi setelah 15 tahun Reformasi yang mempengaruhi pandangan negatif terhadap Pancasila sebagai dampak dari pemerintahan Orde Baru. Hal ini terutama terlihat di dunia Perguruan Tinggi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang mewajibkan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah umum. Pancasila sebagai ideologi memiliki peran yang beragam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam sistem pemerintahan, kepercayaan agama, interaksi sosial, kebudayaan, peraturan hukum, dunia politik, dan kemajuan pembangunan.

Gagasan tentang Ideologi Pancasila dalam birokrasi atau aparatur pemerintah mengacu pada pendekatan yang lebih sistematis. Dengan kata lain, Pancasila dapat dirinci dalam atau mencakup: karakter dan semangat struktur yang menyatu, jiwa UUD 1945, Sistem Nasional, identitas negara Indonesia, pelaksana (sistem) dan pemerintahan negara, tingkat infrastruktur dan suprastruktur, administrasi pemerintahan Indonesia,

sistem manajemen (proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, tanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan, proses sosial dalam masyarakat dan negara, serta etika professional. Pancasila yang kokoh dan lengkap memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan dapat dicapai jika berkaitan dengan kesesuaian dan harmoni. Dalam segala aspek kehidupan manusia, baik itu sebagai individu, dalam interaksi dengan masyarakat, dengan alam, dengan negara dan bangsa lain, dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, serta dalam usaha mencapai kemajuan materi dan kebahagiaan spiritual (Bintoro Tjokroamidjojo, 1991 dalam Oesman dan Alfian, 1992).

Penerapan Ideologi Pancasila dalam kehidupan ekonomi, secara berurut dapat berupa:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral
2. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian), sesuai asas-asas kemanusiaan
3. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi
4. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkret dari usaha bersama
5. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai

keadilan sosial (Mubyarto, 1991 dalam Oesman dan Alfian, 1992)

Setelah itu, terlihat bahwa TNI dan Polri menerapkan penjabaran Ideologi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan Keamanan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memulai dari pengalaman nyata untuk kemudian mencari prinsip-prinsip konseptual yang lebih umum serta merumuskannya kembali.

Dalam Pancasila terdapat lima sila, dan TNI beserta Polri secara khusus memberikan perhatian yang serius kepada tiga sila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan BerAdab, serta Persatuan Indonesia. Dalam hal sila keempat dan kelima, TNI dan Polri melalui institusi pendidikan mereka telah memulai proses penelitian dan pemeriksaan, serta ekspresi keprihatinan terhadap bahaya yang terkait dengan militerisme, diktatorisme, dan totaliterisme. Dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip fundamental ini, pada awalnya TNI dan Polri merujuk pada konsep yang diungkapkan oleh Notonagoro.

Mulai dari tahun 1971, ABRI (TNI dan Polri) telah memulai pengembangan nilai-nilai yang berperan penting dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk membangun sistem yang terstruktur, konsisten, dan terkait erat dengan ideologi Pancasila. Teks ini bisa dijelaskan baik dalam konteks internal maupun eksternal. Meskipun begitu, karena sifat naskah-naskah dinas ABRI yang umumnya terbatas, pemikiran-pemikiran tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. TNI dan Polri

tidak mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai nilai dasar mereka, tetapi mereka lebih fokus pada upaya pengamalan dan pengamanannya. Namun, TNI dan Polri menyadari bahwa ada banyak masalah keamanan yang berasal dari berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Agar masalah keamanan dan dampaknya terhadap kesejahteraan dapat diatasi, TNI dan Polri telah mengembangkan tindakan berdasarkan prinsip Pancasila dengan fokus pada kerjasama dan komunikasi yang intens dengan golongan-golongan lain di masyarakat.

Tantangan penjabaran Pancasila yang dihadapi TNI dan Polri adalah mencari keseimbangan yang serasi antara tugas pengamanan di satu pihak dengan tugas memberi peluang dan dorongan untuk berkembangnya kreativitas dan prakarsa masyarakat untuk pembangunan di pihak lain (Saafroedin Bahar, 1991 dalam Oesman dan Alfian, 1992).

Menurut Latif (2020). Setidaknya terdapat lima jalur yang mesti ditempuh jika Pancasila dikehendaki menjadi Working Ideology:

1. Jalur penguatan pemahaman Pancasila menuju Indonesia cerdas kewargaan
2. Jalur kerukunan kebangsaan menuju Indonesia bersatu
3. Jalur pendekatan keadilan sosial menuju Indonesia berbagi kemakmuran
4. Jalur pelembagaan Pancasila dalam pranata kenegaraan-kemasyarakatan menuju Indonesia tertata-lembaga

5. Jalur penyuburan keteladanan menuju Indonesia terpuji.
Inilah jalan kebahagiaan-kemajuan hidup bersama

Kegiatan Belajar 2

Reaktualisasi: Tantangan Dan Kritik Ideologi Pancasila

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Kegiatan Belajar 2, diharapkan Anda dapat menjelaskan cara untuk memberikan kembali makna dan esensi Pancasila melalui radikalasi, penghidupan kembali, dan pembaruan Pancasila dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang ada dan menganalisis kemungkinan kritik terhadap setiap sila dalam Pancasila.

Uraian Materi

Perlu diperhatikan tantangan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang kita hadapi saat ini:

1. Banyaknya tindakan dan tingkah laku yang merusak yang lebih menonjolkan hal-hal yang buruk dalam ruang publik semakin meningkat.
2. Kekurangan penghargaan dan dorongan terhadap pencapaian dan tindakan-tindakan yang positif.
3. Kesalahan dalam menempatkan prioritas pada pengamalan nilai-nilai Pancasila di ruang public
4. Ketidacukupan contoh yang diberikan oleh tokoh-tokoh

pemerintahan dan masyarakat

5. Cenderung mengutamakan keuntungan pribadi dan kelompok dengan menghiraukan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Azyumardi Azra dalam A. Ubaedillah dan Rozak (2016), ada tiga faktor yang membuat Pancasila dalam posisi sulit dan termarjinalkan:

1. Pancasila telah tercemar karena di zaman Orba dipakai sebagai alat politik untuk mempertahankan Status Quo kekuasaan.
2. Liberalisasi asas berpolitik di era Reformasi yang memberi peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya religion-based ideology.
3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang dapat menimbulkan sentimen local nationalism dan tumpang tindih dengan ethno nationalism.

Dampaknya, Pancasila kehilangan peran sentralnya dan tidak lagi menjadi topik pembicaraan publik. Bagaimana cara kita mengembalikan Pancasila sebagai landasan utama identitas dan jati diri bangsa Indonesia di tengah-tengah keberagaman? Ini adalah tugas yang dihadapi oleh semua orang yang percaya bahwa Pancasila adalah landasan ideologi yang paling realistis dan menjadi gaya hidup bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini dan di masa depan. Kelompok yang ingin melakukan perubahan ekstrem, pembaruan ulang, dan

pemulihan atas Pancasila harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat termasuk dukungan pemerintah.

Untuk itu diperlukan pengamanan atas Pancasila menurut Rosyadi (2001) dapat melalui cara:

1. Preventif berupa usaha pengamanan Pancasila yang bersifat pencegahan dengan membina kesadaran: wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan taat pada hukum.
2. Represif berupa usaha pengamanan Pancasila yang bersifat penindakan:
 - i. Dalam negeri: pemberontakan dan perusuh massal, pengkhianatan dan bentuk-bentuk provokasi dan adu domba, pelanggar hukum, perongrong Pancasila (komunis, liberalis, fasis dan militer)
 - ii. Luar negeri: subversi ideologi politik, infiltrasi, invasi militer, dan provokasi

Adapun Kritik ideologi Pancasila telah dipetakan oleh Latif (2020) sebagaimana berikut ini:

1. Kritik Sila Pertama: eksklusi sosial terjadi karena berkembangnya kecenderungan pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan yang tidak lagi mencerminkan "ketuhanan yang berkeadaban"; "yang lapang dan toleran". Agama tak perlu meninggalkan kepercayaan ritualnya, namun perlu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan menempatkan moralitas agama pada jantung kehidupan spiritual dan kehidupan publik.

2. Kritik Sila Kedua: meningkatnya kecenderungan eksklusif sosial secara eksternal mencerminkan dekadensi nilai-nilai keadilan dan keadaban dalam relasi kemanusiaan universal era globalisasi; dan secara internal mencerminkan lemahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan masalah "hak-hak asasi manusia". Dibutuhkan perenungan mendalam atas konstitusi kita (khususnya terkait Hak Asasi Manusia, juga kovenan Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak sipil yang telah diakomodir dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2005.
3. Kritik Sila Ketiga: kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam kesilaman, telah berakar pada tanah air beserta elemen-elemen sosial- budaya semenjak ribuan bahkan jutaan tahun hadir di Nusantara sebagai simpul persatuan Indonesia. Semangat multikulturalisme.
4. Kritik Sila Keempat: Secara sadar kita tetapkan kehidupan Demokrasi Pancasila, namun dalam prakteknya model-model demokrasi luar diterapkan tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal setiap demokrasi selalu merupakan "constitutional democracy", yang bermakna bahwa demokrasi merupakan fenomena politik yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi, yang semestinya disusun berdasarkan norma dasar negara yaitu Pancasila. Artinya, inovasi demokrasi berpagar batas garis kontur nilai-nilai Pancasila.

5. Kritik Sila Kelima: Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok kemanusiaan, simpul persatuan, mantra kedaulatan rakyat. Pewujudan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan inklusi sosial, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar persatuan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi total, perlu radikalisasi untuk bisa diaktualisasi ulang keluhuran nilai-nilainya. Pada dimensi mitos diarahkan untuk meneguhkannya kembali Pancasila sebagai Ideologi Negara, pada dimensi logos diarahkan untuk mengembangkan Pancasila dari Ideologi menjadi Ilmu, dan pada dimensi etos diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Disamping melayani kepentingan vertikal (negara), juga melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara (Latif, 2020).

Radikalisasi Pancasila ala Kuntowijoyo dalam Latif (2012), bahwa secara operasional ditawarkan lima langkah yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Pancasila yaitu:

1. Mengembalikan Pancasila sebagai Ideologi negara
2. Mengembangkan Pancasila sebagai Ideologi menjadi Pancasila sebagai Ilmu
3. Mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, kohesi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial

4. Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal(negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal
 5. Menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara
- Revitalisasi atas Pancasila menjadi mutlak dilakukan demi pengalaman masa lalu di mana, seperti ditegaskan Anhar Gonggong bahwa Pancasila hanya ada dalam retorika tetapi tidak ada dalam praksis, tidak terulang lagi (A.Ubaedillah dan Rozak, 2016).

Usulan menghidupkan kembali pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan pemberdayaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) semakin gencar terutama dalam rangka Pendidikan Karakter generasi muda. Terkenang Pidato Presiden Soekarno "To Build the World A New" di depan Sidang Majelis Umum PBB ke-15 tanggal 30 September 1960, bahwa bilamana dunia ingin damai, hanya Pancasila yang dapat dijadikan konsepsi dan kedudukan Pancasila sebagai suatu Ideologi besar bisa menjadi Ideologi alternatif di level dunia. Pancasila sudah final dan baku dan sebagai Filsafat Negara, fundamen Moral dan Politik; akhirnya, hanya manusia yang berakhlak dan beradablah yang bisa memeluk keberadaan Tuhan untuk berke-Tuhanan yang Maha Esa, kata Meutia Hatta Swasono (Tim Media Rilis, 2018).

Pentingnya mewujudkan atau memperbaharui kembali nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kebutuhan yang menjadi tuntutan sejarah, agar landasan negara Indonesia tidak terabaikan oleh perubahan yang terjadi dalam perkembangan bangsa

Indonesia. Salah satu usaha untuk memperbaharui Pancasila adalah melalui usaha menghidupkan kembali makna Pancasila sebagai arah bersama masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem pemerintahan, implementasi Pancasila dapat diwujudkan melalui penyusunan peraturan atau kebijakan negara yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan menjadikannya sebagai topik berdiskusi di kalangan akademisi.

Akhirnya, tidak perlu khawatir bahwa filsafat Pancasila akan terganggu, asalkan gagasan utamanya, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, masih dijaga dan diperkuat. Pancasila sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah Indonesia sejak Sarekat Islam yang dipelopori oleh H.O.S. Teks ini mengisahkan tentang Tjokroaminoto yang ditulis oleh Hamka pada tahun 1952. Muhammadiyah memiliki komitmen yang kuat terhadap negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah (negara yang dinyatakan dan disaksikan kesepakatannya), sedangkan bagi Nahdlatul Ulama, negara Indonesia merupakan Darussalam (negara yang damai).



Gambar/Skema: Ranah Transformasi Sosial Berlandaskan Pancasila (Latif, 2020)

Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Andakerjakansoal berikut;

1. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai....
 - a. Falsafah bangsa
 - b. Dasar negara
 - c. Ideologi negara
 - d. Cita-cita bangsa
2. Melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi Pancasila dapat....
 - a. Menambah penderitaan rakyat
 - b. Merusak moral generasi muda
 - c. Mengancam persatuan dan kesatuan
 - d. Meningkatkan tindak kejahatan
3. Ap Pancasila merupakan petunjuk yang mampu memberikan arah bagi bangsa Indonesia adalah kedudukan Pancasila sebagai.....
 - a. Dasar negara
 - b. Pandangan hidup bangsa
 - c. Kepribadian bangsa
 - d. Sumber hukum dasar nasional
4. Membiasakan diri menghargai hasil karya orang lain yang

bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama merupakan penerapan nilai nilai Pancasila sila...

- a. Kedua
 - b. Ketiga
 - c. Keempat
 - d. Kelima
5. Ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk ...
- a. menghindarkan terjadinya perpecahan antarsesama warga negara
 - b. menyatukan tekad dan semangat untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama
 - c. mewujudkan rasa syukur segenap rakyat Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - d. menyatukan suku-suku di Indonesia yang berbeda-beda adat, kebiasaan, dan bahasanya
6. Selaku ideologi, Pancasila bukan ideologi yang statis, beku, dan kaku, melainkan ideologi yang mampu mengembangkan pemikiran baru, segar, dan berkualitas sesuai dengan tuntutan jaman. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Pancasila merupakan ideologi yang.....
- a. dinamis
 - b. terbuka
 - c. persuasif
 - d. transparan

-
7. Karakteristik Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan dapat dibina.....
 - a. Perbuatan yang takut
 - b. Kerja sama yang harmonis
 - c. Perilaku yang taat
 - d. Kehidupan yang bahagia
 8. Apa yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia.....
 - a. Nilai-nilai yang telah dilakukan selama perjuangan sejarah
 - b. Nilai-nilai kolektivisme, sosialisme, dan komunisme
 - c. Nilai-nilai yang tidak berkaitan dengan budaya Bangsa Indonesia
 - d. Nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan kapitalisme
 9. Tiga sila apa yang diberikan perhatian serius oleh TNI dan Polri....
 - a. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Keadilan Sosial, Persatuan Indonesia
 - b. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Keadilan Sosial
 - c. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia
 - d. Ketuhanan Yang Maha Esa, Keadilan Sosial, Persatuan Indonesia

10. Bagaimana gagasan tentang Ideologi Pancasila dalam birokrasi atau aparatur pemerintah.....
 - a. Mengamalkan dan mengamankan Pancasila
 - b. Menjiwai kebijaksanaan ekonomi
 - c. Mengembangkan nilai-nilai terkait dengan ideologi Pancasila
 - d. Menerapkan penjabaran dalam bidang Pertahanan dan Keamanan

Dari hasil pengerjaan silahkan Anda cocokkan dengan kunci jawabanyang tersedia, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung nilai ketercapaian pembelajaran.

$$\text{NILAI} = \frac{\text{SKOR PEROLEHAN}}{\text{SKOR MAKSIMUM}} \times 100$$

Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | |
|------|-------|
| 1. C | 6. B |
| 2. C | 7. B |
| 3. B | 8. A |
| 4. A | 9. C |
| 5. A | 10. C |

Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memahami materi di BAB ini dan Anda sudah menyelesaikan Soal yang diberikan, silahkan membaca sumber lain yang ada di referensi. Andajuga dapat menyimak beberapa videodibawahiniuntukmemperdalam pemahaman Anda.



<http://bit.do/fLwTn>

https://www.youtube.com/watch?v=Tj1KD3i-oGFY&ab_channel=CNNIndonesia



<http://bit.do/fLwTy>

<https://www.facebook.com/1794486427527504/videos/266898327225484/>



<http://bit.do/fLwTC>

https://www.youtube.com/watch?v=RmcpEAj-MUAY&ab_channel=KOMPASTV

Referensi

- Hamka. 1952. Urat Tunggang Pantjasila. Djakarta: Pustaka Keluarga
- Latif, Yudi. 2020. Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembangunan (Edisi Komprehensif). Jakarta: Mizan
- Oetojo Oesman dan Alfian (Penyunting). 1992. Pancasila sebagai Ideologi: dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Jakarta: BP7-Pusat
- Republik Indonesia. 2005. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Rosyadi. 2001. Pancasila dan Kewiraan untuk Pendidikan Tenaga Kesehatan. Jakarta: Widya Medika
- Tim Media Rilis. (2018). Pancasila Aktualisasi Nasionalisme dan Agama, Bangsa Indonesia Harus
- Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2016. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah bersama Prenada Media Group

Wijayakusuma. (2019).



<http://bit.do/fLwTP>

<https://nasional.okezone.com/read/2019/09/01/337/2099154/pengamat-ada-2-ideologi-besar-ingin-menggeser-kedudukan-pancasila>

Berita Baru. 2019. Revitalisasi Pancasila Tidak Jalan, Azyumardi Kritik Kinerja Pemerintah. (OnLine).



<http://bit.do/fLwT3>

<https://beritabarur.co/revitalisasi-pancasila-tidak-jalan-azyumardi-kritik-kinerja-pemerintah/> (diakses 15 Oktober 2020)

BPIP. 2020. Seminar Internasional BPIP & Gerakan Pemuda Ansor. (OnLine)



<http://bit.do/fLwUa>

<https://www.youtube.com/watch?v=JfZS-DW098s>. (diakses 30 Oktober 2020)

Tim Media Rilis. 2018. Pancasila Aktualisasi Nasionalisme dan Agama, Bangsa Indonesia Harus Bangga. (OnLine).



<http://bit.do/fLwUe>

<https://damailahindonesiaku.net/pancasila-aktualisasi-nasionalisme-dan-agama-bangsa-indonesia-harus-bangga.html> (diakses 12 Oktober 2020)

Daftar Istilah

Darul ahdi wa syahadah	: negara tempat melakukan konsensus nasional
Diktatorisme	: paham suatu negara yang dipimpin secara otoriter dengan hak dan kewajiban yang absolut
Egalitarian	: kesamaan derajat
Ethno nationalism	: Nasionalisme berdasarkan etnis
Local nationalism	: nasionalisme negara bangsa
Militerisme	: suatu pemerintahan yang didasarkan pada jaminan keamanannya terletak pada kekuatan militernya
Monodualis	: manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial yang membutuhkan bantuan antar manusia, hewan, dan tumbuhan
Radikalisasi	: pengajaran secara masif
Revitalisasi	: proses menghidupkan kembali
Status quo	: keberadaan negara dalam keadaan tetap sebagaimana sekarang
To build the world anew	: membangun tatanan dunia baru berdasarkan Pancasila (Pidato Bung Karno 30 September 1960, di depan Sidang Umum PBB ke-15)
Totaliterisme	: pemikiran politik yang melihat bahwa eksistensi manusia secara orang perorang tidaklah penting, sebaliknya tiap manusia menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya kepentingan Bersama
Transnasional	: berkenaan dengan perluasan atau keluar dari batas-batas negara
Tri Prakara	: asas kebudayaan, asan religious, dan asas kenegaraan (terkait Pancasila)
voor de vuist	: tidak tertulis terlebih dahulu
Welfare state	: Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.
Way of life	: jalan atau pandangan hidup
Working ideology	: ideology yang bekerja dan menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari
Yuridis	: peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum

BAB VIII

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Tujuan Pembelajaran

Para mahasiswa memiliki kemampuan untuk menguraikan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, yang terdiri dari:

1. Penjelasan mengenai pengertian Pancasila pada beberapa fase secara komprehensif
2. Sebuah evaluasi yang obyektif tentang keseluruhan sistem Filsafat Pancasila
3. Mengemban tanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan analisis Pancasila yang dianggap tepat berdasarkan hasil studi yang dilakukan secara bersama-sama.

Uraian Materi

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

a. Pengertian Pancasila

Pancasila Sebagai Filsafat merupakan sebuah kesatuan yang memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu, serta memiliki kualifikasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, intinya Pancasila adalah komponen yang saling terhubung dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing.

1. Pengertian Filsafat.

Filsafat merupakan usaha manusia dalam menggali kebijaksanaan hidup yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban manusia. Seorang individu yang memiliki pemikiran mendalam sering kali disebut sebagai seorang filsuf, sebuah istilah yang pertama kali digunakan oleh Herakleitos. Banyak tokoh filosof telah menemukan dan merumuskan sistem filsafat yang dianggap sebagai panduan terbaik dari berbagai aliran filsafat, seperti materialisme, idealisme, spiritualisme, realisme, dan aliran modern lainnya, seperti rasionalisme, humanisme, individualisme, liberalisme-kapitalisme, marxisme-komunisme, sosialisme, dan sebagainya.

2. Pengertian Pancasila.

Pancasila merupakan kumpulan dari lima prinsip yang terdiri dari suatu kesatuan yang berasal dari nilai-nilai mulia dan mengambil sumber dari beragam budaya masyarakat di Indonesia yang heterogen, dengan makna adanya keberagaman yang disatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Materi filsafat bertujuan untuk memahami esensi dari entitas material yang konkret, seperti manusia, binatang, alam, dan sebagainya. Dan dalam teks ini, serta dalam abstraksinya, terdapat penjabaran mengenai nilai-nilai, ide-ide, moralitas, serta pandangan hidup.

3. Filsafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Negara:

Filsafat Pancasila adalah sistem nilai yang mengatur segala aspek kehidupan hukum dan aktivitas dalam konteks kehidupan sebagai sebuah bangsa dan negara, yang berlandaskan pada Pancasila. Sebab pancasila adalah asal dari semua asal hukum masyarakat dan negara Indonesia. Seseorang yang memiliki pemikiran filosofis adalah seseorang yang tidak menganggap remeh terhadap individu yang lebih rendah statusnya dan tidak meremehkan hal-hal kecil. Mereka selalu memiliki pandangan positif, kritis, bijaksana, luas, dan selalu optimis.

4. Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat

Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif.

- i. Deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadikannya pandangan yang komprehensif.
- ii. Induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikan dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat.

Sistem filsafat Pancasila menitikberatkan pada konsepsi tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan diri sendiri, hubungan antarindividu, dan

hubungan dengan masyarakat bangsa yang sekarang menjadi milik bangsa Indonesia. Sebagai sistem pemikiran, Pancasila memiliki keunikan yang berbeda dengan sistem filsafat lain yang ada di berbagai belahan dunia, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sejenisnya. Ciri unik dari nilai-nilai filsafat yang terdapat dalam Pancasila berkembang melalui budaya dan peradaban Indonesia, terutama sebagai inti dan prinsip spiritual bagi bangsa Indonesia selama masa perjuangan kemerdekaan. Lalu, prinsip-nilai Pancasila memiliki peran penting sebagai pandangan hidup bangsa atau filsafat hidup (*weltansvhuung*), serta menjadi jiwa dan kebanggaan nasional dalam menghadapi berbagai budaya dan peradaban global (Darmodihardj, 1979).

b. Pengertian Filsafat

Istilah 'filsafat' berasal dari bahasa Yunani, (*philosophia*), tersusundari kata *philos* yang berarti cinta atau *philia* yang berarti persahabatan, tertarik kepada dan kata *sophos* yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi (Barata, 2011). Dengandemikian *philosophia* secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Katakebijaksanaan juga dikenal dalam bahasa Inggris, *wisdom*. Berdasarkan makna kata tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisamenjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia (Kamilah, 2012).

Menguasai informasi yang berharga akan membantu seseorang mencapai kebenaran. Seseorang yang memiliki kecintaan terhadap pengetahuan yang berharga adalah seseorang yang mencintai kebenaran. Dari dulu hingga sekarang, setiap filsuf memiliki sifat yang mencintai kebenaran. Filsuf dalam usahanya mencari kebijaksanaan, menggunakan metode dengan berfokus dan menggali pikiran secara mendalam. Diharapkan bahwa filsafat, sebagai hasil refleksi yang mendalam, dapat mencapai pengetahuan yang paling bijaksana atau paling mendekati kesempurnaan. Secara keseluruhan, filsafat adalah disiplin akademik yang bertujuan untuk mempelajari esensi semua hal guna mengungkap kebenaran. Menurut makna yang umum, karakteristik filsafat dapat dijelaskan sebagai usaha berpikir yang menyeluruh, radikal, dan menyeluruh. Dengan kata lain, ini adalah cara berpikir yang mempertimbangkan dan menggali sesuatu secara mendalam.

Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. "Bendera Negara Indonesia ialah sang merah putih". Pasal 36, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Pasal 36A, "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika". Pasal 36B, "Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya". Bendera merah putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya, semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Faisal, 2009).

Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang rasional dan mendasar mengenai nilai-nilai dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Tujuannya adalah agar nilai-nilai tersebut dapat dijelaskan lebih detil dan diaplikasikan dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila juga penting untuk membuka dialog dengan perspektif-perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi kerangka evaluasi untuk semua kegiatan yang terkait dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Patung yang dirancang oleh Auguste Rodin mengilustrasikan konsep manusia yang bertimbang rasa, yakni individu yang cerdas dan bijaksana melalui tahap refleksi dan meditasi.



Sumber: <http://tutinonka.wordpress.com/2008/09/17/high-concept-high-touch-2/>

Di taman rumah pengasingannya di Ende, terdapat sebuah patung Soekarno yang sedang duduk. Melalui posturnya yang merenung, patung tersebut menggambarkan pikiran dan refleksi Soekarno mengenai masa depan Bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai landasan negara dan *Philosophische Grondslag* merupakan hasil dari proses pemikiran dan refleksi.



Sumber: <http://rosodaras.wordpress.com/tag/bra st>

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, Anda dapat menyimpulkan hal-hal berikut ini dan mencatatnya di dalam buku catatan Anda. Silakan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam evaluasi pembelajaran ini untuk mengevaluasi pencapaian Anda dalam pembelajaran.

Penilaian Pembelajaran

SilahkanAndakerjakansoalberikut untukmenilaipencapaianpenguasaanmateri Anda;

1. Bagaimana cara induktif dalam memahami Pancasila sebagai sistem filsafat...
 - a. Mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat
 - b. Menggali kebijaksanaan hidup
 - c. Mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis
 - d. Mengatur segala aspek kehidupan hukum dan aktivitas
2. Apa pengertian filsafat....
 - a. Pandangan hidup bangsa dan kebanggaan nasional
 - b. Sistem nilai yang mengatur kehidupan bangsa dan negara
 - c. Usaha manusia dalam menggali kebijaksanaan hidup
 - d. Kumpulan dari lima prinsip
3. Bagaimana cara deduktif dalam memahami Pancasila sebagai sistem filsafat....
 - a. Mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat
 - b. Menggali kebijaksanaan hidup
 - c. Mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis
 - d. Mengatur segala aspek kehidupan hukum dan ak-

tivitas

4. Apa yang dimaksud dengan filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara....
 - a. Usaha manusia dalam menggali kebijaksanaan hidup
 - b. Sistem nilai yang mengatur kehidupan bangsa dan negara
 - c. Kumpulan dari lima prinsip
 - d. Pandangan hidup bangsa dan kebanggaan nasional
5. Kedudukan Pancasila kaitannya dengan pengaruh budaya asing adalah
 - a. sebagai filter atau penyaring
 - b. jiwa dan kepribadian bangsa
 - c. pedoman hidup bangsa
 - d. sebagai penangkal
6. Apa yang digambarkan oleh patung Soekarno....
 - a. Manusia yang cerdas dan bijaksana
 - b. Manusia yang tidak memiliki emosi
 - c. Manusia yang tidak memiliki pikiran
 - d. Manusia yang tidak bodoh dan dangkal
7. Ciri orang yang bermoral Pancasila ialah....
 - a. Segala tindakannya mendapat pujian dari masyarakat
 - b. Perbuatannya selalu menguntungkan orang banyak

- c. Mengutamakan masyarakat daripada diri sendiri
 - d. Berhati-hati dalam setiap mengambil setiap keputusan
8. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 ialah menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan berpangkal atas
- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - b. Pengakuan warga negara sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial
 - c. Keseimbangan antara individu dan masyarakat
 - d. Hak-hak kodrat seorang manusia
9. Nilai-nilai pancasila dapat bersifat imperative apabila kedudukan sebagai...
- a. Pandangan hidup
 - b. Jiwa dan kepribadian bangsa
 - c. Dasar Negara
 - d. Tujuan yang hendak dicapai
10. Apa arti kata 'filsafat'?...
- a. Kecerdasan
 - b. Kebijaksanaan
 - c. Kebenaran
 - d. Keterampilan

Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | |
|------|-------|
| 1. A | 6. A |
| 2. C | 7. D |
| 3. C | 8. D |
| 4. B | 9. D |
| 5. A | 10. B |

Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memperoleh pemahaman tentang isi bab ini dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan, Anda dianjurkan untuk melanjutkan dengan membaca sumber-sumber lain yang terdapat dalam referensi.

Referensi

- Barata, Atep Adya. (2011). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta: Visimedia.
- Darmodiharjo, Darji, Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal, Gatot S.M. (2009). *How To Be A Smarter Taxpayer, Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang Lebih Cerdas*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kamilah, Anita. (2012). *Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian Dan Hukum Publik)*. Bandung: Keni Media.
- Magnis-Suseno, Franz. (2011). "Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi" dalam Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas GadjahMada, Yogyakarta, 2--3 Mei 2013
- (2002). *Hancurnya Negara-Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia tak Berbatas*. Yogyakarta: Qalam.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009--2014. (2013). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPRRI.
- _____. (2013). "Soekarno Sebagai Penggali Pancasila", dalam Prisma Edisi Khusus Soekarno, Membongkar Sisi-sisi Hidup Putera Sang Fajar, Volume 32, No.2 & No.3. Jakart: LP3ES.
- Siswanto, Joko. (2015). *Pancasila (Refleksi Komprehensif Hal-Ikhwail Pancaila)*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Suhadi. (2001). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat UGM.

Daftar Istilah

Komunisme	: ideologi tujuan utamanya politik, sosial ekonomi agar tercipta masyarakat komunis dengan aturansosial ekonomi berdasarkan kepemilikanbersama
Bhinneka Tunggal Ika	: masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam berbeda-beda agama, suku, budaya, adat istiadat, dan agama tetap satu Bangsa Indonesia
Materialisme	: Paham filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar benar ada (materi)
Liberalisme	: suatunegarakebebasanyatidakterbatas. Aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga (pemerintah tidak boleh turut campur)
Konsepsi Pancasila sebagai sistem filsafat	: suatu Konsepsi artinya Filsafat Pancasila suatukonsep di bidang Ekonomi, Politik, Hukum, Pertahanan dan lain lain
Rasionalisme	: doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atauidapatkanmelalui pembuktian
Philosophia	: mencintaikebijaksanaan, yang merupakan upaya manusia untuk mencari kehidupan yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat
Liberalisme	: sebuah ideologi atau pemahaman bahwa kebenaran dan persamaan hak yang utama (kebebasan tanpa batas)
Idealisme	: ide artinya dunia di dalam jiwa. Aliran ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dicamkan dan dipahami. Istilah Idealisme pertama kali diucapkan oleh penemu ilmu filsafat yaitu Plato

BAB IX

PANCASILA DALAM SUDUT PANDANG NILAI KEJUANGAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB 9 ini, diharapkan Anda dapat menguasai penjelasan tentang Pancasila dalam sudut pandang nilai kejuangan dimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu di terapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, dapat memberikan kesadaran akan pentingnya nilai kejuangan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Uraian Materi

Bangsa Indonesia telah mewarisi semangat dan nilai-nilai perjuangan yang sama dengan generasi 45, tetapi saat ini kita tidak lagi berjuang untuk mengusir penjajah Belanda. Musuh yang kita hadapi saat ini adalah masalah-masalah yang kompleks, termasuk kebodohan, kemiskinan, kesejahteraan, keadilan, dan praktik KKN. Terkadang, negara dan pemerintah mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah tersebut setelah Indonesia merdeka selama waktu yang lama. Pertanyaannya adalah, apa yang salah? Apakah kurangnya semangat juang yang dimiliki oleh bangsa dan negara? Ataukah ketidak-tahuan masyarakat tentang arti dari semangat juang? Permasalahan inilah yang seharusnya diatasi terlebih dahulu, dengan mengembangkan semangat juang di kalangan masyarakat

dan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar pemerintah tidak hanya mencari keuntungan pribadi, namun lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan meningkatkan pemahaman akan pentingnya perjuangan dalam masyarakat Indonesia, dapat menjadi solusi menghadapi masalah diskriminasi di antara penduduk. Faktanya, tidak bisa disangkal bahwa tingkat toleransi yang rendah serta kurangnya penghargaan terhadap keberagaman budaya dan kepercayaan di Indonesia semakin meningkat..

Dari segi semantik nilai-nilai kejuangan terdiri dari dua istilah yaitu "Nilai" dan "Kejuangan". "Nilai" adalah konsep yang berkenaan dengan sesuatu (Suhady, 2006: 47). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2008, nilai berarti sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Dengan demikian, nilai merupakan sesuatu yang berharga, yang diapresiasi oleh manusia karena nilai tersebut berguna bagi kemanusiaan itu sendiri. Nilai dalam artian tertentu ada di luar diri subjek, dan subjek sendiri bisa percaya, yakin, atau memiliki kemantapan terhadap nilai-nilai yang diyakininya tersebut (Kusuma, 2015: 176-177).

Schwartz (dalam Muthohar, 2009) mendefinisikan nilai sebagai berikut: Value as desireable transituational goal, varying in importance, that serve as guiding principles in the life of person or other social entity. Nilai adalah suatu tujuan akhir yang diinginkan, memengaruhi tingkah laku, yang digunakan sebagai prinsip atau panduan dalam hidup seseorang atau masyarakat. Bisa dikatakan bahwa nilai-nilai pada hakikat-

nya merupakan sejumlah prinsip yang dianggap berharga dan bernilai sehingga layak diperjuangkan dengan penuh pengorbanan. Seseorang yang hanya memperjuangkan nilai-nilai pribadi disebut individualis, namun jika seseorang memperjuangkan nilai-nilai sosial disebut pejuang atau pahlawan (orang yang banyak pahalanya). Nilai-nilai merupakan representasi kognitif dari persyaratan hidup manusia dan dapat bergeser karenanya. Tiga tipe persyaratan itu menurut Schwartz (dalam Mutohar, 2009), yaitu:

1. Kebutuhan individu sebagai organisme,
2. Persyaratan interaksi sosial yang membutuhkan koordinasi interpersonal,
3. Tuntutan institusi sosial untuk mencapai kesejahteraan kelompok dan kelangsungan hidup kelompok.

Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap maupun perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem (sistem nilai) merupakan salah satu wujud kebudayaan, di samping sistem sosial dan karya (Syarbaini, 2011: 33). Nilai adalah konsep abstrak mengenai suatu masalah dasar berupa norma agama, budaya, dan moral bangsa yang sangat penting dalam kehidupan dan memengaruhi tingkah laku (Dewan Harian Daerah, 2013: 10). Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah kualitas yang melekat pada suatu objek, sesuatu mengandung nilai apabila

berguna, berharga, untuk harkat dan martabatnya.

Kata “juang” sebagai kata kerja berarti “laga, lawan, kelahi, perang memperebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga”. Berjuang adalah berlaga, berkelahi, berperang dan berlawan (KBBI, 1989). Nilai kejuangan adalah konsep yang berkenaan dengan sifat, mutu, keadaan tertentu yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan yang menyangkut perihal perang, kelahi, lawan, dan laga. Kata nilai kejuangan dikenal terhadap konsepsi abstrak, anutan, paham, dan pendorong yang menyebabkan orang dapat berperang, berkelahi, berlawan dan berlaga, sehingga bermanfaat bagi dirinya untuk menang (Suhady, 2006: 47-48). Sama halnya dengan mereka yang merasa punya nilai kejuangan, pembela tanah air, nusa dan bangsa, disiplin nasional, dan sebagainya.

Tidak ada metodologi yang jelas untuk menumbuhkembangkannya. Bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba bisa menjadi pejuang dan punya disiplin nasional, tanpa dibina melalui pembiasaan, sehingga menjadikan “habitual” dalam kehidupan sehari-hari (Adiwijoyo, 2000: 121-122).

Nilai kejuangan merupakan landasan, kekuatan, dan daya dorong bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan mencapai tujuan nasionalnya. Nilai kejuangan itu dikenal dengan nama jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 45 atau nilai kejuangan bangsa, merupakan perekat wawasan Nusantara dan ketahanan Nasional dalam memperkokoh bangsa dan

negara Indonesia (Dewan Harian Daerah, 2013: 19). Ataupun rakyat Jepang, yang mengembangkan heroisme, nilai juang dan patriotisme melalui pembudayaan semangat Bushido (kerja sampai mati) bagi raja, bagi bangsa dan negaranya (Adiwijoyo, 2000: 121).

Setiap periode sejarah perjuangan bangsa Indonesia, selalu lahir jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangannya sebagai kekuatan yang melandasi, mendorong perjuangan bangsa melakukan perubahan secara gradual pada aspek kehidupan politik, sosial budaya, ekonomi, dan hankam dalam menciptakan kehidupan demokratis untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Bagaimanapun, ada timbal balik yang serasi antara bangsa dan rakyat yaitu bahwa rakyat yang telah memutuskan membentuk negara yang bernama Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan negara harusnya juga untuk memikirkan rakyat secara keseluruhan.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia nilai kejuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya dorong perlawanan dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan dirinya dari penjajahan. Nilai kejuangan ditanamkan kepada beberapa generasi dalam upaya untuk mencapai kemerdekaan. Nilai kejuangan seperti ini dimiliki oleh generasi pra 45 dan generasi 45. Sebutan generasi 1945 sangat mengemuka karena pada tahun 1945 inilah keberhasilan kemerdekaan bangsa itu datang. Namun, tentu saja keberhasilan itu bukan dibuat oleh generasi 45 belaka. Nilai perjuangan ini terwarisi terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya (Suhady, 2006: 48). Sebelum masa 1945, kita sudah

dihantarkan disuguhi perjuangan- perjuangan para pemuda dalam sejarah bangsa Indonesia seperti generasi angkatan 1908 sebagai pelopor masa pergerakan nasional, dan angkatan 1928 saat semua pemuda berikrar dalam Sumpah Pemuda yang ingin bersatu menjadi sebuah bangsa. Oleh karena itu, generasi pra 1945 yang mewakili seluruh sifat, kadar, mutu konsepsi yang menggerakkan perlagaan, perlawanan, dan peperangan yang diperoleh dari generasi sebelumnya, kemudian berkulminasi pada saat menjelang memasuki generasi 45. Jadi, generasi 45 mewarisi seluruh sifat dan mutu baik itu dari generasi pra 45 yang menghasilkan kemerdekaan (Suhady, 2006: 48). Sekarang semangat generasi 45 mulai berkurang, nilai perjuangan perlu diwariskan hingga proses perkembangan dan pembangunan bangsa ini berlangsung dengan lancar.

a. Pengertian Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai 45

Jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 sesungguhnya berkaitan sangat erat. Malahan dapat dikatakan bahwa hal-hal tersebut dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan dan harus dilihat sebagai sesuatu yang bulat dan utuh (Dewan Harian Daerah, 2013: 10-12).

1. Jiwa

Secara umum, jiwa adalah sesuatu yang menjadi sumber kehidupan dalam ruang lingkup makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Merupakan keseluruhan keadaan batin manusia yang terdiri atas pengenalan (kognitif), perasaan (afektif), kehendak (konasi), dan psikomotorik.

Jiwa 45 adalah sumber kehidupan bagi perjuangan

bangsa yang merupakan kekuatan batin dalam merebut, mempertahankan kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, dan mengisi kemerdekaan.

2. Semangat

Semangat adalah roh kehidupan yang memberi kekuatan dan dorongan berkehendak, bekerja dan berjuang; baik yang datang dari dalam diri (intrinsik) maupun dari luar (ekstinsik), dan terutama atas dasar ketakwaan.

Semangat 45 adalah dorongan dan perwujudan yang dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut, mempertahankan kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, dan mengisi kemerdekaan.

3. Nilai

Nilai adalah konsep abstrak mengenai suatu masalah dasar berupa norma agama, budaya dan moral bangsa yang sangat penting dalam kehidupan dan memengaruhi tingkah laku.

Nilai 45 adalah norma yang telah didapat dan disepakati sebagai ukuran dari sifat/perbuatan dan dinyatakan dalam kualitas.

4. Angka 45

Angka 45 menunjukkan tahun yang merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengakomodasi etos kejuangan bangsa sehingga dapat mempro-

klamasikan kemerdekaan bangsa. Angkatan 45 adalah generasi yang sempat mengalami, menyaksikan, ikut aktif dan merasakan gelora perjuangan memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Potensi angkatan 45 identik dengan potensi kejuangan bangsa, merupakan potensi spiritual yang mengandung jiwa, semangat, dan nilai- nilai 45.

5. Jiwa, Semangat, dan Nilai 45

Jiwa, semangat dan nilai (45) adalah dasar, kekuatan, daya dorong, dan moral perjuangan. Merupakan suatu rangkaian kata yang erat berkaitan, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan harus diartikan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh.

6. Kekuatan Moral (Moral Force)

Kekuatan moral adalah kekuatan yang tidak nyata (imagine) berupa kondisi mental dengan suatu pemahaman yang menyatu sebagai suatu kekuatan yang mampu mengubah suatu keadaan.

7. Kebangsaan

Kebangsaan adalah kesadaran dan sikap sebagai kelompok bangsa yang memiliki keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama. Kebangsaan merupakan rasa cinta bangsa (nasionalisme) yang tidak terpisah dari rasa cinta tanah air (patriotisme). Keduanya bersumber dari rasa cinta, mempunyai solidaritas, rasa setia kawan terhadap nasib bangsa dan tanah air, merasa sepenang-gungan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan tanah

air.

8. Gerakan Nasional Kesadaran Kebangsaan

Gerakan nasional kesadaran kebangsaan adalah gerakan yang mampu menumbuhkan pemahaman, sikap dan tekad yang seimbang, antisipatif, dialogis terhadap lingkungan sosial budaya, lingkungan alam dan terhadap diri sendiri melalui panduan sejarah dan nilai-nilai kejuangan bangsa serta berbagai proyeksi mengenai masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.

9. Watak dan Kepribadian Bangsa

Watak dan kepribadian bangsa sebagai bangsa pejuang adalah identitas dan jati diri bangsa. Identitas dan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang senantiasa dikaitkan dengan kebanggaan akan Proklamasi Agustus 1945, ideologi Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai kejuangannya tercantum dalam istilah jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Generasi angkatan 45 pada waktunya akan sirna secara alami, namun jiwa, semangat, dan nilai-nilai (kejuangan) 45 akan tetap abadi sebagai dasar kejuangan bangsa. Generasi muda Indonesia meskipun tidak terlibat secara fisik dalam revolusi kemerdekaan, adalah saksi intelektual revolusi Kemerdekaan Indonesia, tetap bangga, mensyukuri, dan mengembangkan sikap positif terhadap perjuangan kemerdekaan serta sanggup memberikan yang terbaik kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Paradigma Nasional

Paradigma nasional adalah komitmen hidup berbangsa yang tercermin dalam pikiran, perasaan, sikap, dan harapan, serta kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial yang dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Paradigma nasional adalah seperangkat kesepakatan nilai instrumental yang menjabarkan kaidah-kaidah pelaksanaan kehidupan, yang berlaku sebagai acuan, dan menuntun penyelenggaraan kehidupan nasional, termasuk peraturan undang-undangnya. Wujud paradigma nasional terlihat dalam nilai-nilai praktis setiap individu dan masyarakat Indonesia.

Penjelasan tersebut sesuai dengan syair lagu tema kebangsaan yang diciptakan Kusbini yang berjudul "Bagimu Negeri" dari syair ini kita bisa merasakan kekuatan batin dalam mencintai bangsa dan negeri ini.

Bagimu Negeri

*Padamu negeri kami berjanji
Padamu negeri kami berbakti
Padamu negeri kami mengabdikan
Bagimu negeri jiwa raga kami*

Dapat disimpulkan bahwa jiwa 45 adalah sumber kehidupan bagi perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan batin dalam merebut, mempertahankan kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, dan mengisi kemerdekaan. Semangat 45 adalah dorongan dan perwujudan yang dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut, mempertahankan kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, dan mengisi kemerdekaan.

Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Andakerjakansoal berikut;

1. Apa yang dimaksud dengan tipe persyaratan hidup manusia menurut Schwartz.....
 - a. Kebutuhan individu sebagai manusia
 - b. Kebutuhan individu sebagai individu
 - c. Kebutuhan individu sebagai organisme
 - d. Kebutuhan individu sebagai makhluk sosial
2. Apa yang dimaksud dengan nilai sebagai suatu sistem....
 - a. Nilai yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap maupun perilaku manusia
 - b. Nilai yang tidak berfungsi mendorong dan tidak mengarahkan sikap maupun perilaku manusia
 - c. Nilai yang tidak berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap maupun perilaku manusia
 - d. Nilai yang berfungsi mendorong dan tidak mengarahkan sikap maupun perilaku manusia
3. Apa pengertian dari kejuangan.....
 - a. Berlaga dan berkelahi
 - b. Berperang dan berjuang
 - c. Berperang dan berkelahi
 - d. Berjuang dan berlaga
4. Apa yang dimaksud dengan semangat 45...
 - a. Konsep abstrak mengenai suatu masalah dasar
 - b. Dorongan dan perwujudan yang dinamis dari jiwa 45

- c. Angka yang menunjukkan tahun puncak perjuangan bangsa Indonesia
 - d. Roh kehidupan yang memberi kekuatan dan dorongan berkehendak
5. Apa yang dimaksud dengan gerakan nasional kesadaran kebangsaan...
- a. Kekuatan yang tidak nyata (imagine)
 - b. Sumber kehidupan dalam ruang lingkup makhluk Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Gerakan yang mampu menumbuhkan pemahaman, sikap, dan tekad yang seimbang
 - d. Kesadaran dan sikap sebagai kelompok bangsa
6. Apa yang dimaksud dengan jiwa, semangat, dan nilai (45)...
- a. Dasar, kekuatan, daya dorong, dan moral perjuangan
 - b. Konsep abstrak mengenai suatu masalah dasar
 - c. Dorongan dan perwujudan yang dinamis dari jiwa 45
 - d. Roh kehidupan yang memberi kekuatan dan dorongan berkehendak
7. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia merupakan butir pengamalan pancasila pada.....
- a. Sila 4
 - b. Sila 3
 - c. Sila 2
 - d. Sila 1
8. Dalam rangka membina rasa nasional di kalangan mas-

varakat Indonesia hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal dibawah ini, kecuali

- a. Patriotisme
 - b. Sukuisme
 - c. Chauvinisme
 - d. Ekstrimisme
9. Salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila pada masa reformasi sekarang ini adalah
- a. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa
 - b. Semakin berkembangnya lembaga perekonomian yang syariat
 - c. menguatnya kekuasaan TNI/POLRI dalam kehidupan bernegara
 - d. Kekuasaan Kepala Negara dilakukan tanpa batasan Undang-Undang Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Keadilan Sosial
10. Dalam hal menyaring budaya asing maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai
- a. Perjanjian luhur bangsa
 - b. Dasar negara Indonesia
 - c. Etika hidup bangsa
 - d. Jiwa dan kepribadian bangsa Menjiwai kebijaksanaan ekonomi

Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | |
|------|-------|
| 1. C | 6. A |
| 2. A | 7. C |
| 3. D | 8. D |
| 4. B | 9. A |
| 5. C | 10. D |

Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memperoleh pemahaman tentang isi bab ini dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan, Anda dianjurkan untuk melanjutkan dengan membaca sumber-sumber lain yang terdapat dalam referensi.

Referensi

- Abdurakhman, dkk. 2015. *Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Achmad, Sri Wintala. 2016. *Politik dalam Sejarah Kerajaan Jawa*. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Aprianita, Tantrina Dwi. 2008. *Bung Karno Sang Proklamator*. Jakarta: Pacu Minat Baca.
- Aprianita, Tantrina Dwi. 2008. *Jenderal Sudirman, Berjuang Sampai Akhir Hayat*. Jakarta: Pacu Minat Baca.
- Budiharjo. 2015. *Pendidikan Karakter Bangsa, Membangun Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Budiyono, Kabul. 2007. *Nilai-nilai Kepribadian dan Kejuangan Bangsa Indonesia*. Bandung: Alfabeta..
- Darini, Ririn. 2013. *Sejarah Kebudayaan Indonesia Masa Hindu Buddha*. Yogyakarta: Ombak.
- De Jong, J.P.B De Josselin. 1971. *Kepulauan Indonesia Sebagai Lapangan Penelitian Etnologi*. Jakarta: Bharatara.
- Dewan Harian Daerah Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah. 2013. *Pembudayaan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan 45 Dalam Rangka Wawasan Kebangsaan*. Semarang: Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah.
- Hariyono. 1995. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hutagalung, Saut P. 2014. *Tanggapan Atas Substansi Perikanan Dokumen: "Indonesia Agri-Incorporated: Revolusi Pembangunan Pertanian Menuju Visi Pertanian Indonesia 2045"*, <http://kskp.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-08-IAI-Saut-P-Hutagalung.pdf>.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono. 2014. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Yogyakarta: Ombak.
- Kartodirdjo, Suyatno. 1989. *Fungsi Pengajaran Sejarah dalam Pembangunan Nasional, Historika*. No. 5. Tahun III. Surakarta: Program Pascasarjana IKIP Jakarta KDK UNS.

- Kusuma, Doni. 2015. Pendidikan Karakter. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Lickona. 1992. Educating for Character: How our school can teach respect & responsibility. New York: Bantam Books.
- Moedjanto, G., dkk. 1991. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muthohar, Sofa. 2009. Upaya Menanamkan Nilai-nilai Perjuangan Kepahlawanan. <http://www.averroes.or.id/upaya-menanamkan-nilai-nilai-perjuangan-kepahlawanan.html>.
- Nagazumi, Akira. 1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918. Jakarta: P.T. Pustaka Utama Grafiti.
- Pringgodigdo. 1980. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ricklefs dkk. 2013. Sejarah Asia Tenggara. Depok: Kumunitas Bambu.
- Samani, Muchlas & Hariyanto. Pendidikan Karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak. Soekmono. 1973. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3. Yogyakarta: Kanisius.
- . 1991. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2. Yogyakarta: Kanisius.
- Suhady, Idup dan A.M. Sinaga. 2006. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Republik Indonesia. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Supriatna, Nana. 2004. Terbentuknya Identitas Kebangsaan Pada Masa Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Suyadi. 2013. Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Dosen Univet Bantara. 2014. Nilai Kejuangan (kalangan sendiri). Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara.
- Sejarah Indonesia, Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES.
- Sumber Artikel Internet
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/07000031/hingga-september-2017-5kepala-daerah-terjaring-ott-kpk-siapa-saja-mereka?page=all> diakses tanggal 19 Oktober 2017.
- <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/09/p0p4a2396-pinisi-warisan-dunia>, diakses 10 Desember 2017.
- <http://www.infobiografi.com/biografi-dan-profil-lengkap-gajah-mada/>, diakses tanggal 19 Oktober 2017.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/sriwijaya>, diakses tanggal 19 Oktober 2017.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/majapahit>, diakses tanggal 19 Oktober 2017

Daftar Istilah

Habitual	: suatu hal yang sudah dilakukan karena terbiasa atau menjadi kebiasaan.
Heroisme	: keberanian dalam membela keadilan dan kebenaran.
Patriotisme	: tindakan seseorang yang siap mengorbankan semua hal demi kemajuan dan kesejahteraan negara tempat mereka tinggal, dengan semangat cinta terhadap tanah air.
Nasionalisme	: pemahaman tentang kebangsaan berkembang karena adanya kesamaan nasib dan sejarah, serta tujuan untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam satu negara. Hal ini juga mencakup upaya untuk mencapai, memelihara, dan berbakti pada identitas, persatuan, kemakmuran, kekuatan, dan kekuasaan negara yang bersangkutan melalui cita-cita bersama.
Individualis	: Seseorang yang terus menjaga identitas diri dan kebebasannya.
Gradual	: berangsur-angsur; sedikit demi sedikit.
Antisipatif	: Bersikap responsif terhadap situasi yang sedang berlangsung atau akan datang.
Dialogis	: bersifat terbuka dan komunikatif
Paradigma	: Pandangan seseorang terhadap dirinya dan lingkungannya mempengaruhi pemikirannya, perasaannya, dan perilakunya.

BAB X

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca BAB 10 diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang Pancasila sebagai Sistem Etika yang meliputi;

1. Pengertian Pancasila pada beberapa fase secara komprehensif.
2. Analisis objektif tentang sistem Etika Pancasila yang utuh.
3. Tanggung jawab atas keputusan yang diambil dari pengambilan kajian Pancasila yang dipandang benar berdasarkan hasil kajian yang dilakukan secara kolektif.
4. Pancasila sebagai upaya pencegahan Dekadensi Moral

Uraian Materi

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

a. Pengertian Nilai, Moral dan Norma

1. Pengertian nilai

Nilai menggambarkan karakteristik atau kualitas yang diberikan kepada obyek yang memiliki arti jika ada ciri atau kualitas tertentu yang melekat padanya. Nilai tidak hanya terbatas pada hal-hal abstrak, tetapi juga berlaku untuk objek material maupun non-materi-

il, bahkan sesuatu yang bukan benda atau material pun dapat memiliki nilai yang sangat berharga dan penting bagi manusia.

Karena itu, Pancasila dapat digunakan sebagai panduan untuk melakukan tindakan yang baik dan sebagai sudut pandang dalam mempelajari nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Sebagai suatu nilai yang saling terhubung, nilai-nilai tersebut memiliki sifat universal dan dapat ditemukan di setiap tempat dan waktu. Namun, sebagai suatu keseluruhan nilai, nilai-nilai ini mencirikan identitas khas Indonesia karena merupakan bagian utuh yang termanifestasi dalam Pancasila. Sistem Etika Pancasila merujuk pada nilai-nilai moral yang diambil dari agama, adat istiadat, dan budaya yang ada di Indonesia. Karenanya, Pancasila yang pada permulaannya menjadi kesepakatan politik yang menjadi landasan pendirian negara Indonesia.

2. Pengertian Moral

Asal mula moral adalah istilah *mos* (*mores*) yang sering digunakan untuk menggambarkan prinsip kesusilaan, kebiasaan, atau tindakan seseorang. Ajaran mengenai apa yang baik dan yang buruk, berkaitan dengan tindakan dan perbuatan manusia, adalah apa yang disebut sebagai moral. Seseorang yang patuh terhadap peraturan, prinsip, dan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan masyarakat dianggap pantas dan bertindak dengan kebenaran dalam konteks moral. Apabila situasinya

berbeda, individu tersebut akan dianggap tidak memiliki moralitas. Moral dalam pelaksanaannya dapat mengambil bentuk aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang layak, baik, dan mulia. Keberadaan moral ditandai oleh kesetiaan dan ketaatan terhadap nilai dan norma yang mengatur kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara

3. Pengertian Norma

Adanya kebutuhan manusia akan hubungan yang ideal akan mendorong mereka untuk mematuhi suatu aturan atau norma sesuai dengan norma kesadaran. Keseimbangan, kesesuaian, dan harmoni dalam hubungan yang ideal terlihat dalam tiga aspek, yaitu vertikal (hubungan dengan Tuhan), horizontal (hubungan dengan masyarakat), dan alamiah (hubungan dengan alam sekitarnya). Norma merupakan manifestasi dari kehormatan manusia sebagai makhluk berbudaya dan beragama. Norma merujuk pada sebuah kesadaran dan sikap mulia yang diinginkan oleh sistem nilai untuk diikuti (Siswanto 2015). Maka, norma dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti norma agama, norma filsafat, norma moral, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan yang mendorong orang untuk mematuhi karena terdapat konsekuensi yang akan diterima jika melanggarnya.

b. Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pancasila memiliki berbagai peran dan posisi yang berbeda, termasuk sebagai landasan negara, prinsip

hidup nasional, ideologi negara, serta sebagai esensi dan karakteristik bangsa. Teks ini juga menyatakan bahwa Pancasila kaya dengan nilai-nilai, termasuk nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Karenanya, Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman untuk berperilaku yang baik dan sebagai sudut pandang yang digunakan untuk memahami nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Nilai-nilai ini merantai satu sama lain dan ada di mana-mana serta di setiap waktu. Akan tetapi, sebagai satu kesatuan nilai yang lengkap, nilai-nilai ini menandai Indonesia secara khusus karena mereka terwujud dalam Pancasila sebagai landasan moral yang utuh. Pancasila ditemukan dan berakar dalam agama, tradisi, dan budaya yang ada di Indonesia. Karenanya, Pancasila yang awalnya merupakan kesepakatan politik yang menjadi landasan berdirinya negara Indonesia.

1. Pengertian Etika

Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut :

- i. Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlakubagi setiap tindakan manusia.
- ii. Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip ter-

sebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun makhluk sosial (etika sosial) Secara etimologis (asal kata), etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin, *mos* yang jamaknya *mores*, yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada (Zubair, 1987).

Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan *way of life* bangsa Indonesia, Pancasila bukan hanya sebagai prinsip moral yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang dibuat untuk membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku setiap individu. Pancasila berfungsi sebagai sebuah kerangka etika yang bertujuan untuk mengembangkan aspek moralitas dalam setiap individu agar dapat menunjukkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bersama di masyarakat, negara, dan bangsa. Mahasiswa sebagai individu yang sedang belajar perlu mengadopsi suatu set nilai etika yang asli dan menyeluruh agar dapat

mempengaruhi setiap keputusan yang diambilnya dalam bidang akademik. Dunia ilmiah bisa kehilangan nilai-nilai yang bermakna jika keputusan ilmiah diambil tanpa mempertimbangkan moralitas, sehingga berpotensi berakibat buruk bagi dunia ilmiah itu sendiri (value-free).

Anda sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri (Latif, 2002)

Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa

memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan degradasi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia (Ismawan, 2002).

Taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pengembangan keilmuan, serta kehidupan akademik dan profesinya; mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotongroyong, cinta damai, responsif, dan proaktif; berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum; menguasai pengetahuan tentang pengertian etika. Pancasila sebagai solusi permasalahan bangsa; terampil merumuskan solusi atas permasalahan bangsa dengan pendekatan Pancasila (Kaelan, 2000).

Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Anda kerjakan soal berikut;

1. Apa pengertian norma...
 - a. Hubungan yang ideal dalam tiga aspek
 - b. Aturan atau norma yang diinginkan oleh sistem nilai
 - c. Karakteristik atau kualitas yang diberikan kepada obyek
 - d. Prinsip kesusilaan, kebiasaan, atau tindakan seseorang
2. Apa yang dimaksud dengan norma sosial...
 - a. Norma yang berlaku dalam masyarakat
 - b. Norma yang berlaku di asia
 - c. Norma yang berlaku di dunia
 - d. Norma yang berlaku di Indonesia
3. Cabang Apa yang dimaksud dengan sistem etika Pancasila...
 - a. Sistem nilai yang hanya berlaku di Indonesia
 - b. Sistem nilai yang diambil dari agama, adat istiadat, dan budaya di Asia
 - c. Sistem nilai yang diambil dari agama, adat istiadat, dan budaya di dunia
 - d. Sistem nilai yang diambil dari agama, adat istiadat, dan budaya di Indonesia
4. Apa pengertian nilai.....
 - a. Prinsip kesusilaan, kebiasaan, atau tindakan seseorang

rang

- b. Aturan atau norma yang diikuti
 - c. Karakteristik atau kualitas yang diberikan kepada obyek
 - d. Hubungan yang ideal antara manusia
5. Apa pengertian etika...
- a. Ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran agama
 - b. Ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran politik
 - c. Ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral
 - d. Ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran sosial
6. Apa peran mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara....
- a. Tidak terlibat dan
 - b. tidak berkontribusi langsung sebagai perwujudan sikap tidak bertanggung jawab warga

-
- c. Terlibat dan berkontribusi langsung sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga
 - d. Terlibat dan berkontribusi langsung sebagai perwujudan sikap tidak bertanggung jawab warga
 - e. Tidak terlibat dan tidak berkontribusi langsung sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga
7. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai universal...
- a. Nilai-nilai yang hanya berlaku di Indonesia
 - b. Nilai-nilai yang hanya berlaku untuk objek material
 - c. Nilai-nilai yang hanya berlaku untuk objek non-material
 - d. Nilai-nilai yang dapat ditemukan di setiap tempat dan waktu
8. Mengapa penting mengadopsi nilai etika dalam pengambilan keputusan akademik...
- a. Karena dunia ilmiah tidak membutuhkan pengambilan keputusan
 - b. Karena dunia ilmiah membutuhkan moralitas dalam pengambilan keputusan
 - c. Karena dunia ilmiah bisa kehilangan nilai-nilai yang bermakna jika keputusan ilmiah diambil tanpa mempertimbangkan moralitas
 - d. Karena dunia ilmiah membutuhkan nilai-nilai yang bermakna dalam pengambilan keputusan
9. Mengapa penting mengaktualisasikan sila-sila Pancasila dalam tindakan konkret...
- a. Agar dapat menunjukkan sikap spiritualitas dalam

-
- kehidupan bersama di masyarakat, negara, dan bangsa
 - b. Agar dapat menunjukkan sikap egoistik dalam kehidupan bersama di masyarakat, negara, dan bangsa
 - c. Agar dapat menunjukkan sikap materialistik dalam kehidupan bersama di masyarakat, negara, dan bangsa
 - d. Agar dapat menunjukkan sikap individualistik dalam kehidupan bersama di masyarakat, negara, dan bangsa
10. Apa perbedaan antara etika umum dan etika khusus....
- a. Etika umum membahas prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan aspek kehidupan sosial
 - b. Etika umum membahas prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan aspek kehidupan agama
 - c. Etika umum membahas prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan aspek kehidupan politik
 - d. Etika umum membahas prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia

Kunci Jawaban

Setelah menyelesaikan tugas ini, Anda dapat membandingkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang diberikan. Selanjutnya, gunakan rumus berikut untuk menghitung sejauh mana Anda telah mencapai tujuan pembelajaran.

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

1. B
2. A
3. D
4. C
5. C
6. B
7. D
8. C
9. A
10. D

Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memperoleh pemahaman tentang isi bab ini dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan, Anda dianjurkan untuk melanjutkan dengan membaca sumber-sumber lain yang terdapat dalam referensi.

Referensi

- Ismawan, Indra. (2020). Menegakkan Pilar 'Good Governance' Di Daerah Sebagai Realisasi Otonomi Daerah. Jakarta: Business News.
- Latif, Yudi. (2002). Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- _____. (2013). "Soekarno Sebagai Penggali Pancasila", dalam Prisma Edisi Khusus Soekarno, Membongkar Sisi-sisi Hidup Putera Sang Fajar, Volume 32, No.2 & No.3, 2013. Jakarta: LP3ES.
- Fauzi, Achmad. (1983). Pancasila Ditinjau Dari Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis. Malang: Lembaga Penerbitan UB.
- Kaelan. (2000). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Afrita, Nadia Dewi. Dekadensi Moral Remaja dan Peran Tokoh Masyarakat dalam Memperkuat Perilaku Keagamaan di Kelurahan Dusun Kebun Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Program Studi Pendidikan Agama Islam 2020
- Siswanto, Joko. (2015). Pancasila (Refleksi Komprehensif Hal-Ikhwail Pancaila). Yogyakarta: Ladang Kata.
- Soekarno. (1984). Pancasila Sebagai Dasar Negara. Jakarta: Inti Idayu Press dan Yayasan Pendidikan Soekarno.
- Suwarno. (1993). Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Kanisius. Zubair. (1987). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat UGM.
- Nurdin, Encep Syarif. (2012). "Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia", dalam E-Materi Pendidikan Pancasila. Diktidan UGM.

Daftar Istilah

Moralitas	: sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk atau kualitas dalam perbuatan manusia menunjukkan bahwa perbuatan itu benar
Normatif	: berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku
Filosofis	: kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai akal pikiran
Universal	: konsep ini dipercaya dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan apakah manusia tersebut berbudaya, adat istiadatnya agamanya
Kristalisasi	: proses pembentukan atau proses pemindahan dan teknik pemisahan (transper)
Etimologis	: cabang ilmu yang mempelajari asal usul suatu kata
Akademis	: kemampuan yang dapat diukur secara pasti karena ilmu pengetahuan itu sendiri bersifat pasti dan dapat diuji kebenarannya
Historis	: kebenaran yang dianggap dalam sejarah di masa lalu
Sosiologis	: ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok (ilmu pengetahuan)
Konkrit	: kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, di rasa, di dengar di cium oleh panca indra.
Objektivitas	: objektif dalam ilmu untuk menangkap sifat alamiah dengan suatu cara di mana tidak tergantung pada pasilitas apapun
Konsensus	: sebuah perasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang di setuju secara bersama sama antar kelompok
Individual	: merupakan BAB yang terkecil atau bagian yang terkecil dalam suatu masyarakat
Pancasilais	: penganut idiologi pncasila sebagai dasar negara bangsa indonesia

BAB XI

PANCASILA DAN DEKADENSI MORAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB 11 ini, diharapkan Anda dapat menguasai penjelasan tentang Pancasila sebagai pedoman moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, generasi muda akan terhindar dari sifat-sifat yang menyebabkan penurunan moral seperti budaya korupsi, perundungan/ bullying, kekerasan sosial, dan sebagainya.

Uraian Materi

Sebelum kita memulai pembahasan tentang materi pancasila dandekadensi moral, mari kita mengingat bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari dasar-dasar pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang penting dan baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini juga menjadi salah satu fungsi dan peranan Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Namun dewasa ini masyarakat Indonesia cenderung tidak menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidupnya, sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Salah satu permasalahan yang timbul yakni dekadensi moral (penurunan moral). Penurunan moral sama saja mereka tidak memahami atau tidak mengerti bahkan boleh dibilang tidak menjunjung nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Tapi sebalik-

nya saya sebagai generasi penerus berkewajiban menjunjung tinggi dan mencintai Pancasila sebagai pandangan hidup saya karena kelima sila dalam Pancasila itu sendiri sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama dan seyogyanya kita harus menjadi sarjana yang berakhlak karena maju tidaknya suatu bangsa ditentukan oleh moral masyarakat bangsa itu sendiri.

a. Dekadensi Moral

Dekadensi dalam bahasa latin yaitu *decadere* memiliki arti jatuh, turun, mundur. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi yang menurun atau memburuk secara bertahap, bergerak ke bawah atau mengambil langkah mundur. Dengan kata lain dekadensi moral adalah saat nilai-nilai dan norma-nilai moral mengalami penurunan atau kemerosotan gaya hidup individu atau kelompok. Tulisan ini berisi tentang atribut-atribut seseorang. Dalam istilah lain, dekadensi moral merujuk pada kehancuran etika dan nilai-nilai yang dianggap mundur. atau penurunan karakter, perilaku, etika, dan moralitas individu. Dekadensi adalah ide yang menggambarkan pola perubahan yang berulang secara siklus. terjadi penurunan yang signifikan perubahan yang terlihat jelas dari setiap langkah mundur. Segala bentuk fenomena sosial seperti ras, etnis, lembaga, kepercayaan agama, sikap, metode, atau seni. Saat ini, kejatuhan yang terjadi tidak memiliki pengaruh positif terhadap moral atau karakter kita. Kita terancam oleh penurunan moral yang bisa mempengaruhi kita. Situasinya telah memburuk. Mana yang buruk karena banyak yang menggunakan topeng untuk menyembunyikan niat mereka. Mana yang

tidak baik adalah apa yang harus kita lakukan dengan masalah kerusakan ini (Ramdani, 2020).

Moralitas di sekitar kita bisa mempengaruhi keadaan lingkungan di sekitar kita menjadi lebih buruk. Arti moralitas berasal dari istilah Latin "mores" yang mengacu pada tradisi. Moralitas adalah konsep atau prinsip-prinsip yang mengatur perilaku atau tindakan seseorang berdasarkan penilaian etis atau norma yang berlaku dalam masyarakat. sangat sering dikaitkan dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat, yang dapat bersifat baik atau buruk. Paragraf ini berkaitan dengan umum atau masyarakat secara umum. sebab mengapa adat-istiadat masyarakat menjadi penting. Menetapkan apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, sangat bergantung pada sebuah tolak ukur. Moral merupakan suatu sistem yang komprehensif yang terdiri dari sifat-sifat atau kualitas individu. Keunggulan seseorang dapat muncul dari kecerdasan atau sikap yang istimewa. Karakteristik ini memengaruhi perilaku dan pola pikir mereka mendorongnya untuk bertindak sesuai dengan kepribadian dan prinsip yang sejalan dengan dirinya dalam keadaannya berubah-ubah. La Lande merumuskan bahwa moral adalah suatu sistem nilai yang memandu etika individu dalam menjalankan tindakan mereka yang memiliki empat arti yang berbeda, yakni:

1. Moral adalah sekumpulan kaidah bagi perilaku yang diterima dalam satu zaman atau sekelompok orang. Dengan makna ini moral bisa bersifat keras, buruk, atau rendah.

2. Moral adalah sekumpulan kaidah bagi perilaku yang dianggap baik berdasarkan kelayakan bukannya berdasarkan syarat.
3. Moral adalah teori akal tentang kebaikan dan keburukan, ini menurut filsafat.
4. Tujuan-tujuan kehidupan yang mempunyai warna humanisme yang kental yang tercipta dengan adanya hubungan-hubungan sosial Ali Abdul Halim Mahmud (Nadia, 2020).

Menurut pandangan filsafat, moral adalah konsep intelektual yang berkaitan dengan nilai-nilai baik dan buruk. Tujuan-tujuan hidup yang menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan Hubungan sosial mempengaruhi terciptanya hubungan-hubungan baru. Moral adalah aturan dan sistem yang mengatur norma dan nilai-nilai. Sikap seseorang terhadap komunitas di mana mereka berinteraksi merupakan hal penting untuk dipahami. Interaksi sosial dan keterlibatan individu dalam kelompok mempengaruhi sikap dan perilaku mereka.

Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu dan saling berinteraksi serta berbagi nilai, budaya, dan norma yang sama. seseorang atau suatu kelompok dalam mengambil keputusan atau bertindak. Standar moral ini dapat bervariasi antara individu dan budaya, namun umumnya berfungsi sebagai panduan dalam perilaku dan interaksi sosial. Moral juga dapat dilihat sebagai prinsip atau nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang dalam membentuk karakter dan integritas pribadi. Dalam kehidupan

sehari-hari, kita sering kali dihadapkan pada situasi di mana kita harus mempertimbangkan apa yang dianggap baik atau buruk secara moral sebelum mengambil tindakan. Penting bagi setiap individu dan masyarakat untuk memiliki kesadaran moral yang kuat guna mempromosikan kebaikan dan keadilan dalam kehidupan kita. Setiap individu dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya sebagai bagian dari kelompok. Tekanan sosial merupakan hal yang umum dalam kehidupan bermasyarakat. didefinisikan sebagai prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam tindakan dan interaksi dengan orang lain. Moralitas mencakup aspek-aspek seperti integritas, kejujuran, keadilan, empati, dan tanggung jawab. Moralitas juga dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan pendidikan. Tujuan moralitas adalah mempromosikan kebaikan dan menghindari kejahatan, serta menciptakan kesetiaan dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, dikatakan bahwa kemampuan untuk membedakan antara hal yang benar dan salah ada pada diri seseorang yang akan bertindak sebagai respons terhadap perbuatan tersebut. Aliah B. Purwakania Hasan dari Purwakania memiliki sudut pandang yang berbeda. Pendapat ini juga disampaikan oleh Sastrapedja yang dikutip oleh Sutarjo Adisusilo arti moralitas adalah segala aspek yang terkait dengan norma-norma moral. Perihal tentang tingkah laku manusia dan aturan-aturan yang dianut oleh mereka, kelompok masyarakat yang menjadi landasan untuknya. Dalam konteks ini, moralitas adalah suatu struktur atau kerangka kerja yang mendasari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku etis

dan keputusan manusia. Nilai-nilai mengenai bagaimana seseorang sebaiknya menjalani kehidupan secara baik sebagai manusia. Pada dasarnya, moral adalah penilaian terhadap berbagai jenis tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang harus diikuti. Moral adalah aturan atau pedoman etika yang menentukan perilaku yang benar atau salah dalam suatu masyarakat. Prinsip-prinsip moral ini mengatur hubungan antara individu-individu dan menentukan standar moral yang diharapkan dari setiap individu. Pranata moral ini diterapkan untuk memastikan kelangsungan dan harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, patuhi dan ikuti prinsip-prinsip moral untuk memastikan perilaku yang benar dan bertanggung jawab. Berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya sangat penting untuk memahami perilaku individu dalam konteks sosial.

Masyarakat adalah kelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah geografis dan berinteraksi secara sosial, budaya, dan ekonomi. seseorang atau suatu kelompok dalam menilai dan membedakan tindakan yang baik atau tidak baik. Moral merupakan pedoman atau aturan-aturan yang digunakan oleh individu atau kelompok dalam membentuk sikap dan perilaku mereka. Hal ini berhubungan dengan nilai-nilai budaya, agama, etika, dan norma-norma dalam masyarakat. Moral juga mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, empati, rasa hormat, dan kesetiaan. Anggota individu terbentuk oleh nilai-nilai budaya sosial yang ada. Sosiologi berhubungan dengan studi tentang masyarakat dan interaksi antara individu-individu di dalamnya. Moralitas adalah bagian

integral dari kepribadian yang menjadi kebutuhan setiap individu dalam hubungan dengan kehidupan sosial yang menyelaraskan, menyertakan, dan mengimbangi. Perilaku etis bertujuan untuk mencapai kehidupan yang tenang. Terdiri dari keluwesan, ketertiban, dan keterhubungan yang baik (Muhammad Asrori, 2006).

b. Anti Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptio" (Fockema Andrea : 1951) atau "corruptus" (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa "corruptio" berasal dari kata "corrumpere", suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah "corruption, corrupt" (Inggris), "corruption" (Perancis) dan "corruptie/korruptie" (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa (Muhammad Ali : 1998) :

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.
4. Jadi arti kata korupsi adalah sesuatu yang korup, buruk dan merusak. Berdasarkan fakta tersebut,

maka tindak pidana korupsi antara lain adalah sesuatu yang tidak bermoral, korup baik sifat maupun keadaannya, serta melibatkan jabatan dalam lembaga atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan untuk hadiah, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau kelompok untuk mengabdikan pada kekuasaan atau jabatan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, korupsi berarti korupsi, perbuatan curang, penipuan, tindak pidana yang merugikan perekonomian negara (Subekti dan Tjitrosoedibio: 1973). Korupsi tidak hanya ada dalam bentuk uang, namun banyak hal yang masuk dalam kategori korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi baik dari dalam diri pelaku maupun dari luar. Seperti yang dikatakan Yamamah tentang perilaku masyarakat dan sistem politik yang materialistis dan konsumeris yang masih “dewa”. Materinya dapat “menegakkan” perjudian dan korupsi (Ansari Yamamah: 2009) “Dalam keadaan seperti itu, hampir dapat dipastikan bahwa semua pejabat akan ‘dipaksa’ melakukan korupsi ketika mereka menjabat.” Nur Syam (2000) mengatakan, alasan seseorang melakukan korupsi adalah karena ia tertarik pada dunia materi atau kekayaan yang tidak dapat ia kendalikan. Ketika seseorang tidak dapat menahan keinginan untuk menjadi kaya, padahal kekayaan

dapat diperoleh melalui korupsi, maka ia melakukan korupsi. Jadi jika kita menerapkan perspektif ini pada penyebab korupsi, salah satu penyebab korupsi adalah cara kita memandang kekayaan. Cara yang salah dalam memandang kekayaan menyebabkan cara yang salah dalam memperoleh kekayaan. Pandangan berbeda disampaikan Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu, (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat dimana individu dan organisasi berada (Arif: 2000). Mengenai perilaku seseorang, Isa Wahyudi memberikan gambaran bahwa alasan seseorang melakukan korupsi bisa jadi karena motivasi dari dalam dirinya, bisa juga karena keinginan, niat atau kesadaran untuk melakukannya. Secara umum faktor penyebab korupsi dapat berupa faktor politik, hukum, dan ekonomi, sebagaimana diuraikan dalam buku "Peran Parlemen dalam Pemberantasan Korupsi" (ICW: 2000), yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, serta faktor transnasional.

Hingga saat ini, telah terdapat berbagai penelitian komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap perekonomian dan variabel-variabelnya. Dari hasil penelitian tersebut terlihat jelas berbagai dampak negatif korupsi. Korupsi melemahkan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Mauro: 1995). Selain itu, studi yang lebih rinci melaporkan bahwa korupsi menyebabkan penurunan produktivitas, yang dapat diukur dengan

berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan (Tanzi dan Davodi: 1997). Korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi suatu bangsa dan negara. Meluasnya korupsi di suatu negara memperburuk keadaan perekonomian negara, misalnya harga barang-barang di bawah standar menjadi lebih mahal, akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi lebih sulit, keamanan negara terancam, lingkungan hidup rusak, dan citra negara menjadi buruk. pemerintah adalah. rusak rusak Situasi buruk di mata internasional, melemahkan kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi terus berlanjut dan negara semakin tenggelam dalam kemiskinan. Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia tergolong negara berpendapatan rendah yang mempunyai utang tinggi (highly indebted low-income country) dan termasuk negara termiskin di dunia, seperti Mali dan Ethiopia. Berikut ini diuraikan berbagai dampak masif korupsi yang menggerogoti berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Anti Kekerasan Sosial

Kata kekerasan berasal dari kata latin “violentus” yang berarti kebrutalan, kebrutalan, kekerasan, kebrutalan, kekacauan dan pemerkosaan. Kekerasan mengacu pada tindakan yang dapat merugikan orang lain, misalnya. Pembunuhan, perampokan, pembunuhan, dll. Soerjono Soekanto (2002:

98) mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau benda. Selain penggunaan kekerasan fisik dan kekuasaan, kekerasan juga dapat berupa ancaman terhadap diri sendiri, individu atau sekelompok orang atau masyarakat, atau suatu tindakan yang mengakibatkan trauma, kematian, cedera psikologis, cacat perkembangan atau hilangnya hak. . (Narwoko dan Suyanto, 2000: 70).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kekerasan adalah perilaku yang disengaja atau tidak disengaja yang bertujuan untuk menghancurkan orang atau kelompok lain, baik melalui serangan fisik, mental, sosial, atau ekonomi yang melanggar nilai dan norma. di masyarakat sehingga berdampak buruknya trauma psikologis pada korban. Kekerasan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindakan kekerasan nampaknya sudah melekat pada diri manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Tidak mengherankan jika kekerasan dalam berbagai jenis dan bentuknya semakin hari semakin meningkat. Galtung (1996: 203) mencoba menjawabnya dengan membagi tipologi kekerasan menjadi tiga bidang, yaitu:

1. Kekerasan langsung.

Kekerasan langsung biasanya melibatkan kekerasan fisik, yang disebut juga dengan insiden kekerasan. Kekerasan langsung diekspresikan dalam perilaku, misalnya pembunuhan, penyerangan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan langsung merupakan tanggung jawab individu, artinya siapapun yang menggunakan kekerasan akan dipidana sesuai ketentuan KUHP.

2. Kekerasan struktural (kekerasan institusional).

Disebut juga proses kekerasan. Kekerasan struktural memanifestasikan dirinya dalam konteks, sistem dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan dan layanan kesehatan. Kekerasan struktural merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara yang tanggung jawabnya adalah melaksanakan ketentuan perjanjian dengan berusaha merumuskan kebijakan, melaksanakan inisiatif administratif, melaksanakan peraturan, dan melaksanakan pengelolaan dan pengendalian. Hal ini tergantung pada sistem peradilan pidana yang berlaku.

3. kekerasan kultural.

Kekerasan kultural adalah bentuk kekerasan permanen. Muncul dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, misalnya. Kebencian, ketakutan, rasisme, intoleransi, aspek budaya, dunia simbolik agama dan ideologi, bahasa dan seni serta ilmu pengetahuan. Beberapa ahli menyebut kekerasan jenis ini sebagai kekerasan psikologis. Menurut Bourdieu (Martono, 2009), kekerasan struktural dan kultural dapat digolongkan sebagai kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan mekanisme komunikasi yang bercirikan relasi kekuasaan yang timpang dan hegemonik dimana pihak lain memandang dirinya lebih unggul baik dari segi moralitas, ras, etnis, agama maupun gender dan usia. Setiap tindakan kekerasan pada dasarnya memerlukan hubungan dan/

atau komunikasi sukarela antara dua pihak.

Menurut kekerasan simbolik, hubungan ini mengacu pada citra pihak terhadap pihak lain, monopoli makna, dan pembebanan makna dalam teks, gambar, atau warna. Contoh istilah “kulit hitam” mengacu pada kelompok kulit hitam, istilah “bodoh” mengacu pada siswa yang tidak mengalami kemajuan di kelas, atau istilah “miskin” untuk orang yang kurang mampu secara ekonomi, dan sebagainya.

Berdasarkan pelakunya, kekerasan juga dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan individu dan kekerasan kolektif. Kekerasan individu adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu orang terhadap satu orang atau lebih. Contoh pencurian, penyerangan, penyerangan, dll. Sedangkan kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau kelompok. Contoh tawuran pelajar, bentrok antar desa. Kekerasan kolektif dapat disebabkan oleh individu-individu dalam suatu kelompok yang menjadi begitu terfragmentasi sehingga seseorang tidak lagi mengenal individu tersebut atau kehilangan rasionalitasnya. Kerusuhan sepakbola bisa menjadi contoh yang baik dari jenis kekerasan ini. “Hukuman massal” terhadap pencuri atau penjahat jalanan juga dikecualikan.

Klasifikasi lain dikemukakan oleh Sejiwa (2008: 20), yang membagi bentuk-bentuk kekerasan menjadi dua jenis, yaitu: kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan

fisik merupakan salah satu jenis kekerasan yang terlihat dengan mata. Artinya terlihat semua orang karena ada kontak fisik antara pelaku dan korban. Contohnya adalah: Memukul, menendang, mengetuk, tersandung, meludah, berteriak, melempar benda, dll. Sementara itu, kekerasan non-fisik merupakan jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, jika ada kecerobohan, maka perilaku tersebut tidak bisa langsung dikenali karena tidak ada kontak fisik antara pelaku dan korban.

Kekerasan non fisik ini terbagi menjadi dua bagian yaitu kekerasan verbal dan kekerasan psikis. Kekerasan verbal: Kekerasan dilakukan dengan kata-kata. Contoh: membentak, mengumpat, menghina, menjuluki, membentak, memfitnah, bergosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, menghina dengan kata-kata di muka umum, dsb. Sedangkan kekerasan psikologis/psikologis adalah kekerasan yang terjadi dalam bahasa tubuh. Contoh: tatapan sinis, tatapan mengancam, tatapan menghina, pendiam, penyendiri, tatapan baik hati, tawa, dan tatapan biasa-biasa saja.

Banyaknya tindak kekerasan di masyarakat menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan anggota masyarakat. Kekerasan apa pun yang terjadi tidak terjadi begitu saja tanpa alasan yang mendorong. Oleh karena itu, para ilmuwan sosial berusaha mencari penyebab terjadinya kekerasan guna mencari solusi yang tepat untuk mengurangi kekerasan. Menurut Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang wajar

dalam diri manusia. Ia meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri dan benci, sehingga menjadi jahat, liar, kasar, dan picik. Hobbes mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia (*homo homini lupus*). Oleh karena itu, kekerasan adalah sifat alami manusia.

Sikap kekerasan digunakan dalam pemerintahan untuk mengintimidasi warga negara dan membuat mereka tunduk kepada pemerintah. Hobbes bahkan menganjurkan prinsip bahwa hanya pemerintahan negara yang menggunakan kekuatan dan kekuasaan terpusat yang dapat mengendalikan situasi dan kondisi suatu bangsa. Pada saat yang sama, J. J. Rosseau mengungkapkan bahwa manusia pada dasarnya tidak bersalah, saling mencintai secara spontan dan tidak egois. Peradaban dan kebudayaan membuat manusia kehilangan sifat aslinya. Orang menjadi kasar dan kejam terhadap orang lain. Dengan kata lain, kekerasan yang dilakukan bukan murni manusiawi.

Terlepas dari kedua tokoh tersebut, ada beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya kekerasan, yaitu sebagai berikut :

- i. Faktor Individual Beberapa ahli berpendapat bahwa setiap perilaku kelompok, termasuk perilaku kekerasan, selalu berawal dari perilaku individu. Faktor penyebab dari perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor

sosial. Faktor pribadi meliputi kelainan jiwa. Faktor yang bersifat sosial antara lain konflik rumah tangga, faktor budaya dan faktor media massa.

- ii. Faktor Kelompok. Individu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan persamaan ras, agama atau etnik. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antara identitas kelompok yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan.
- iii. Faktor Dinamika Kelompok. Menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial dan masyarakatnya. Dalam konteks ini munculnya kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :
 - 1) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu.
 - 2) Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan

norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.

- 3) Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan.
- 4) Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasi diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.
- 5) Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan.

Kekerasan mempunyai dampak negatif, seperti kerugian materil dan immaterial. Mengakhiri kekerasan memang tidak bisa dicapai hanya oleh beberapa pihak saja. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara harus memainkan peran utama dalam menghentikan kekerasan tersebut. Pemerintah seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kekerasan bukanlah solusi suatu permasalahan, namun justru menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga harus memberikan contoh dan bukti nyata bahwa kekerasan tidak pantas

dilakukan di negara yang merdeka dan demokratis. Di sisi lain, masyarakat juga harus melakukan tugas preventif dengan lebih memperhatikan keamanan lingkungan dan mewujudkan masyarakat yang damai dan harmonis.

d. Anti Perundungan

Bullying (perundungan) adalah penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif atau yang bertujuan untuk menyakiti orang lain yang dilakukan oleh rekan atau peers secara berulang dan melibatkan ketimpangan kekuatan baik secara nyata atau menurut anggapan antara pelaku dan korban. (Olweus D. dalam Wolke & Lereya, 2015). Sedangkan American Psychological Association (APA) mendefinisikan bullying adalah sebagai sebuah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korban (Bullying, t.t.)

Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain atau akibat negatif lainnya, seperti misalnya psikis, fisik dan lain-lain yang menimbulkan luka psikis sosial

Dalam praktiknya, ada tiga pihak yang terlibat dalam perundungan ini: pelaku, korban, dan penonton. Pengamat perilaku bullying adalah orang-orang yang mengamati terjadinya bullying baik secara online, cyberbullying maupun offline. Dalam hal ini yang menjadi korban bullying bisa berupa teman, kolega, guru, atasan, pelatih, orang tua dan masih banyak lagi

lainnya (Assistant Secretary for Public Affairs (ASPA), 2019). Sebagai pengamat atau saksi dari kejadian lain, pengamat dapat memberikan dampak positif terhadap penindasan, terutama dengan menghentikan pelakunya. Namun, jika ia tidak bertindak dan hanya menonton saja, perundungan tersebut tidak berhenti dan cenderung semakin parah. Perilaku atau fenomena penindasan ini dapat mempunyai penyebab yang sangat berbeda. Adapun penyebab perilaku tersebut perlu dilihat tidak hanya dari satu sisi, tetapi dari semua sisi. Penyebab penindasan dijelaskan secara singkat di bawah ini dari sudut pandang pelaku, korban, dan orang yang melihatnya..

1. Pelaku

Biasanya pelaku perundungan melakukan perilaku ini karena beberapa hal yang bisa saja berbeda-beda dari satu individu ke individu lain. Seunagal (2021) menjelaskan bahwa beberapa hal yang bisa menjadi penyebabnya seperti merasa bahwa pihak lawan sebagai “bahaya” (perceived of threats), adanya keinginan untuk memiliki power sehingga dapat lebih berkuasa, balas dendam, hingga adanya trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Sebagai contoh kasus bullying, seorang senior di klub berenang yang bernama Rai merundung seorang juniornya yang bernama Nio karena Rai merasa juniornya ini dapat menjadi sosok yang lebih powerful dan lebih disukai oleh rekan-rekan di klub tersebut.

2. Korban

Selain pelaku, perundungan juga dapat disebabkan oleh beberapa hal yang berkaitan dengan atau berada pada diri korbannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korban perundungan atau bullying karena memiliki karakteristik psikologis tertentu, seperti sering mengalami emosi negatif berupa kesedihan, marah, hingga insecure (Emamzadeh, 2018). Pada kasus tertentu, individu yang menjadi korban perundungan cenderung memiliki suatu sisi yang lebih baik daripada pelaku sehingga pelaku merasa dalam bahaya jika bersaing dengan korban, seperti lebih skillfull, cekatan, pintar dan sebagainya (Gordon, 2020). Contohnya Nio mengalami perundungan oleh Rai bukan hanya karena ia junior, tetapi ternyata Nio sendiri merupakan individu yang sering merasa insecure dengan kemampuan berenangnya yang belum sebaik para anggota klub lainnya. Dengan adanya kesempatan tersebut serta *perceived of threats* karena merasa Nio lebih mudah berteman dengan anggota klub, maka Rai tidak segan untuk merundung Nio.

3. Bystanders

Saksi atau bystanders yang melihat perundungan dapat berperan dalam keberlangsungan perilaku perundungan itu sendiri. Bystanders yang tidak bertindak atau hanya diam saja ketika perundungan terjadi cenderung meningkatkan perilaku bullying tersebut. Diamnya bystanders ini dapat membawa beragam akibat, seperti pelaku maupun korban merasa bystanders ini

setuju dengan perundungan yang terjadi sehingga pelaku terus melakukannya sedangkan korban semakin merasa sendirian (Assistant Secretary for Public Affairs, 2019).

Jika melihat perilaku bullying secara umum dan berdasarkan definisi yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, Anda dapat memahami bahwa perilaku tersebut memiliki jenis atau manifestasi yang berbeda-beda. Bullying jenis ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal berdasarkan kategori tertentu. Secara umum, ada dua jenis penindasan: penindasan tradisional dan penindasan maya (Smith, 2018). Penindasan tradisional merupakan salah satu bentuk penindasan di mana penindasan terjadi secara offline dan biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku ini antara lain membentak, memukul, mengumpat, menjauh, dan lain-lain.

Cyberbullying adalah salah satu bentuk penindasan yang terjadi di internet atau online. Awalnya, perundungan seperti ini jarang terjadi, namun seiring berjalannya waktu dan seiring pesatnya perkembangan teknologi, perundungan online pun semakin meningkat. Contoh bullying online mudah ditemukan, misalnya siswi Afi mendapat komentar yang meremehkan foto yang baru-baru ini diunggahnya ke media sosial.

Selain dua bentuk bullying tersebut, masih terdapat beberapa bentuk atau tipe dari perilaku perundungan lainnya. Menurut New Zealand Ministry of Education (t.t.)

terdapat setidaknya tiga bentuk perilaku bullying jika dilihat dari sasaran atau bentuk perilakunya. Ketiga tipe perilaku bullying tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Bullying fisik: merupakan salah satu dari bentuk perundungan tradisional yang di dalamnya terdapat perilaku ataupun intensi untuk melukai fisik pihak lawan (New Zealand Ministry of Education, t.t.). Contoh perilaku bullying fisik ini misalnya saja memukul, menendang, mencubit, mencuri dan/atau merusak barang milik orang lain, menjambak dan masih banyak lainnya. Tipe perundungan ini yang biasanya lebih banyak ataupun lebih mudah diketahui, karena memang jelas terlihat oleh masyarakat atau komunitas yang ada di sekitarnya.
2. Bullying verbal: memiliki persamaan dengan dengan tipe perundungan fisik, karena juga lebih mudah untuk ditemui baik pada perundungan tradisional maupun cyberbullying. Hal ini dikarenakan perundungan verbal bullying biasanya dilakukan dengan menuliskan dan atau mengucapkan kata-kata atau kalimat yang tidak mengenakan (New Zealand Ministry of Education, t.t.). Misalnya saja, seorang karyawan baru bernama Ina mendapatkan kalimat sarkasme yang menyakiti hati setiap kali ia tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh rekan-rekan yang lebih senior.
3. Bullying sosial: Berbeda dengan bullying fisik dan verbal yang cenderung dilakukan secara langsung

terhadap individu, perundungan sosial merupakan bentuk perundungan yang bertujuan untuk merusak hubungan atau reputasi seseorang (New Zealand Ministry of Education, t.t.). Tipe perundungan sosial ini sebenarnya sering terjadi di tengah masyarakat, tetapi tidak banyak yang menyadari akan hal tersebut. Perilaku perundungan sosial bisa terjadi misalnya dalam bentuk Via mengajak teman-temannya agar tidak berteman dengan Nini karena ia siswa baru di sekolah dan berasal dari desa.

Perilaku bullying atau perundungan seperti yang disampaikan di atas memang dapat terjadi di mana saja tanpa memandang usia maupun status korbannya. Banyak contoh perilaku bullying yang terjadi di berbagai setting mulai dari institusi pendidikan, tempat kerja bahkan lingkungan tempat tinggal. Disadari maupun tidak, perundungan memberikan dampak negatif tertentu bagi seluruh pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun bystander. Korban perundungan atau bullying dapat mengalami beragam hal dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum, dampak jangka pendek yang dapat ditemukan pada korban bullying, seperti trauma, psikosomatis, rasa marah, depresi, cemas, penurunan prestasi, motivasi menurun hingga pemikiran untuk bunuh diri ("The Long Term Effects of Bullying," t.t.; Wolke & Lereya, 2015).

Pada jangka panjang, efek dari perundungan dapat berakibat pada berkurang atau tidak mampunya seseorang untuk beradaptasi saat sudah dewasa, seperti kesulitan memper-

tahankan hubungan romantis dalam jangka panjang, sulit adaptasi saat bekerja dan sebagainya (Wolke & Lereya, 2015). Sedangkan dari sisi pelaku, perilaku perundungan yang ia lakukan juga dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri, terutama ketika beranjak dewasa. Beberapa diantaranya adalah cenderung lebih banyak terlibat dalam kegiatan kriminal berupa perusakan, penyalahgunaan napza, menjadi sosok yang abusive, dan sebagainya (Assistant Secretary for Public Affairs, 2019). Dampak bullying tidak hanya pada korban dan pelaku, bystander juga dapat merasakan dampak buruk yang ada. Pada kasus pelajar, dampaknya dapat berupa membolos dan pada konteks yang lebih luas bystander dapat mengalami peningkatan penggunaan napza, rokok, serta mengalami gangguan kesehatan psikologis seperti kecemasan dan depresi maupun fisik (Assistant Secretary for Public Affairs, 2019).

e. Anti Intoleransi

Kata "intoleransi" terdiri dari awalan "in-", yang berarti "tidak, bukan", dan akar kata "toleransi", yang menunjukkan jenis atau pengaturan toleransi, batas pengukuran penambahan atau pengurangan yang merupakan penyimpangan yang dapat diterima. Dalam hal ini, pengertian toleransi yang relevan adalah "cara atau sikap toleransi". Kata toleran sendiri diartikan sebagai "cara atau sikap menerima (menghargai, memperbolehkan, memperkenankan) perbedaan kedudukan (pendapat, pendapat, kepercayaan, kebiasaan, tingkah laku, dan lain-lain) atau bertentangan dengan kedudukan sendiri".

Kasus intoleransi dapat disebabkan oleh sikap diskri-

minatif terhadap orang lain dan perasaan seseorang yang sebenarnya. Namun intoleransi juga bisa disebabkan oleh faktor pendidikan, karena pendidikan toleransi dan menghargai harus ditanamkan sejak usia dini (PAUD), namun jika sikap toleran tidak ditanamkan sejak dini maka sulit bagi seseorang untuk bertoleransi terhadap orang lain. Setelah sekian lama, toleransi kini mulai hilang. Tingkat kegairahan beragama tidak mendorong kelancaran aliran kasih sayang dan etika moral. Meningkatnya tempat ibadah dan upacara keagamaan tidak sebanding dengan peningkatan toleransi beragama antar sesama.

Banyak kasus intoleransi yang mencapai tingkat pembunuhan akibat fanatisme agama. Dahulu orang-orang berhenti membunuh karena alasan agama, namun kini orang-orang saling membunuh karena alasan agama. Bukan hanya pembunuhan. Banyak terjadi penyerangan terhadap tempat ibadah dan pemuka agama. Sikap diskriminatif dan citra diri yang selalu benar menjadi akar kesewenang-wenangan tersebut. Akibat dari intoleransi adalah masyarakat kurang bersatu. Dan komunitas agama tidak lagi saling menghormati.

Mengatasi permasalahan keagamaan di masyarakat seperti terorisme, intoleransi dan permusuhan antar umat beragama. Oleh karena itu, bangsa ini tidak hanya membutuhkan perubahan kelembagaan tetapi juga perubahan spiritual. Dalam proses perubahan agama ini, kita tidak boleh meninggalkan keyakinan dan upacara kita, namun memperdalam toleransi dan moralitas kita terhadap orang lain. Pada dasarnya toleransi dan saling menghormati menjadi akar penyelesaian

permasalahan keberagaman agama di Indonesia saat ini.

Seperti yang dikatakan Bung Karno, nilai Tuhan adalah Tuhan yang berbudaya. Inilah nilai-nilai etika keagamaan yang bersifat persaudaraan artinya toleransi yang mengandung semangat gotong royong antar umat manusia yang mewakili hakikat asli bangsa Indonesia sebagai bangsa dan negara.

Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Anda kerjakan soal berikut;

1. Bagaimana pengaruh dekadensi moralitas terhadap lingkungan dan masyarakat?
 - a. Mengurangi kualitas lingkungan dan masyarakat
 - b. Tidak ada pengaruh
 - c. Membuat lingkungan dan masyarakat lebih buruk
 - d. Meningkatkan kualitas lingkungan dan masyarakat
2. Apa arti dekadensi dalam bahasa Latin?
 - a. Jatuh
 - b. Naik
 - c. Turun
 - d. Mundur
3. Apa yang dimaksud dengan konsep moralitas?
 - a. Sistem nilai yang mengatur individu
 - b. Sistem nilai yang mengatur masyarakat
 - c. Sistem nilai yang mengatur lingkungan
 - d. Sistem nilai yang mengatur perilaku
4. Dari beberapa pengertian yang disebutkan, korupsi dapat

-
- diartikan sebagai?
- Perbuatan curang
 - Perbuatan busuk
 - Perbuatan baik
 - Perbuatan jujur
5. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, korupsi dapat melibatkan?
- Jabatan dalam lembaga Pendidikan
 - Jabatan dalam lembaga pemerintah
 - Jabatan dalam perusahaan swasta
 - Jabatan dalam organisasi masyarakat
6. Asal kata “kekerasan” berasal dari bahasa Latin “violentus” yang berarti?
- kebahagiaan
 - kekuatan
 - kebrutalan
 - kebaikan
7. Kekerasan simbolik merupakan mekanisme komunikasi yang bercirikan relasi kekuasaan yang timpang dan hegemonik dimana pihak lain memandang dirinya lebih unggul baik dari segi moralitas, ras, etnis, agama maupun gender?
- kekerasan psikologis
 - kekerasan sosial
 - kekerasan mental
 - kekerasan fisik
8. Apa yang menjadi karakteristik pelaku bullying menurut American Psychological Association (APA)?

-
- a. Pelaku dan korban memiliki ketimpangan kekuatan
 - b. Semua jawaban benar
 - c. Pelaku melakukan perilaku agresif
 - d. Pelaku melakukan penyalahgunaan kekuatan
9. Siapa yang menjadi bystanders dalam bullying?
- a. Orang yang melihatnya
 - b. Pelaku
 - c. Korban
 - d. Semua jawaban benar
10. Apa definisi bullying menurut American Psychological Association (APA)?
- a. Perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain atau akibat negatif lainnya
 - b. Perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korban dan bystanders
 - c. Perilaku agresif yang dilakukan oleh rekan atau peers secara berulang dan melibatkan ketimpangan kekuatan
 - d. Perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korban

Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut:

- | | |
|------|-------|
| 1. C | 6. C |
| 2. C | 7. A |
| 3. D | 8. C |
| 4. B | 9. A |
| 5. B | 10. D |

Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memperoleh pemahaman tentang isi bab ini dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan, Anda dianjurkan untuk melanjutkan dengan membaca sumber-sumber lain yang terdapat dalam referensi.

Referensi

- Ramdani, *Upaya Guru Akidah Akhlak dalam Mengatasi Dekadensi Moral Siswa di MA Negeri 1Lebong*, Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2020
- Asrori, Muhammad. 2006. Psikologi Remaja. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Ali, Muhammad (1993), Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta : Pustaka Amani
- Andrea, Fockema (1951), *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen – Jakarta Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, 1951 (Kamus Hukum, terjemahan), Bandung: Bina Cipta
- Subekti dan Tjitrosoedibio (1973), Kamus Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita
- Webster Student Dictionary (1960).
- Ansari Yamamah (2009) diunduh dari Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi <http://dellimanusantara.com/index.php>
- Nur Syam (2009) diambil dari Penyebab Korupsi <http://nursyam.sunan-ampel.>

[ac.id](https://doi.org/10.1136/archdis-child-2014-306667)

- ICW (2000) Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi Jakarta: ICW
- Bullying [Text]. StopBullying.Gov. <https://www.stopbullying.gov/prevention/bystanders-to-bullying>
- Assistant Secretary for Public Affairs (ASPA). (2019, September 24). Effects of Bullying [Text]. StopBullying.Gov. <https://www.stopbullying.gov/bullying/effects>
- Barth, F. D. (2017, Februari 7). 6 Smarter Ways to Deal With a Bully. Psychology Today. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-couch/201702/6-smarter-ways-deal-bully>
- Becoming an Upstander to Bullying Just Got Easier! (2018, Oktober 25). [Text]. StopBullying.Gov. <https://doi.org/10.24/becoming-an-upstander-to-bullying-just-got-easier>
- Bullying. (t.t.). American Psychological Association. Diambil 5 September 2021, dari <https://www.apa.org/topics/bullying>
- Emamzadeh, A. (2018, September 27). Workplace Bullying: Causes, Effects, and Prevention. Psychology Today. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-new-home/201809/workplace-bullying-causes-effects-and-prevention>
- Gordon, S. (2020, Mei 26). 6 Reasons Why People Are Bullied at Work. Verywell Mind. <https://www.verywellmind.com/reasons-why-workplace-bulies-target-people-460783>
- New Zealand Ministry of Education. (t.t.). Different types of bullying. Bullying Free NZ. Diambil 5 September 2021, dari <https://bullyingfree.nz/about-bullying/different-types-of-bullying/>
- Seunagal, G. (2021, Mei 7). The Psychology Of Bullying: Understanding What's Behind The Bully. Betterhelp. <https://www.betterhelp.com/advice/bullying/the-psychology-of-bullying-understanding-whats-behind-the-bully/>
- Wolke, D., & Lereya, S. T. (2015). Long-term effects of bullying. Archives of Disease in Childhood, 100(9), 879–885. <https://doi.org/10.1136/archdis-child-2014-306667>

Daftar Istilah

Pranata	Peraturan tentang suatu kegiatan khusus dalam masyarakat dapat berwujud dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis.
Komprehensif	Sesuatu yang dapat diamati dari setiap sudut secara keseluruhan.

Diskriminatif	sikap, tindakan, dan perilaku yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya.
Fanatisme	situasi di mana seseorang menjadi terlalu terobsesi dengan suatu hal, seperti keyakinan, kepercayaan agama, kebijakan politik, dan topik lainnya.
Psikosomatis	kondisi yang menggambarkan saat munculnya penyakit fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh kondisi mental seperti pikiran atau emosi.
Napza	bahan-bahan kimia yang memiliki dampak pada masalah kesehatan dan keseimbangan mental, seperti obat terlarang, obat psikotropika, dan zat yang memiliki efek adiktif.
Abusive	Istilah ini digunakan untuk menjelaskan situasi di mana satu pihak berusaha mendominasi dan mengontrol pihak lain melalui perilaku yang merugikan. Biasanya, hubungan ini dicirikan dengan tindakan kekerasan dalam bentuk verbal, fisik, dan bahkan seksual.

BAB XII

PANCASILA SEBAGA DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB 12 ini, diharapkan Anda dapat menguasai penjelasan tentang Pancasila sebagai pedoman moral dan spiritual dalam kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di Indonesia. Dengan demikian, perkembangan Iptek akan memberikan kepuasan secara materi dan non-materi bagi masyarakat Indonesia.

Uraian Materi

Sebelum kita memulai pembahasan tentang materi pancasila, mari kita mengingat bahwa Pancasila adalah sebuah sistem filsafat yang memiliki arti bahwa setiap aspek kehidupan dalam negara dan masyarakat harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, seharusnya tidak boleh ada pertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Hal ini berkaitan dengan filosofi yang ada di balik nilai-nilai tersebut, seperti nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Penting bagi mahasiswa sebagai generasi penerus dan aset bangsa untuk memahami dengan benar hal tersebut.

a. Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.

Ipteks sebenarnya tidak bisa terlepas dari nilai-nilai, tetapi sebaliknya, perkembangan Ipteks harus didasarkan pada nilai-nilai. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa IPTEK memiliki tujuan yang ingin mencapai kesejahteraan dan peningkatan derajat manusia. Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK meliputi nilai-nilai moral Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil serta beradab. Pandangan mengenai pengertian Pancasila sebagai landasan nilai perkembangan Iptek dapat dikemukakan dengan beberapa cara:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.
2. Setiap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia harus mencakup prinsip-prinsip Pancasila sebagai elemen esensial dalam proses pengembangannya.
3. Nilai-nilai Pancasila memiliki peranan penting dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai pedoman normatif, yang bertujuan untuk mengarahkan agar tidak melenceng dari pandangan dan perilaku yang harus diterapkan oleh bangsa Indonesia.
4. Hakekatnya, budaya dan ideologi bangsa Indonesia, atau yang dikenal sebagai IPTEK, tidak sepenuhnya bebas nilai, tetapi harus berdasarkan prinsip-nilai tertentu.

b. Pancasila Sebagai Karakter Keilmuan

Sejak era reformasi dimulai di lingkungan kampus, muncul tanda-tanda penolakan terhadap Pancasila sebagai ideologi bagi masyarakat Indonesia. Sebenarnya, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 mengatakan dengan jelas bahwa Pancasila harus menjadi dasar dalam pendidikan nasional. Tapi, ketika kita melihat peraturan pelaksanaannya, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pendidikan ideologi negara yang termasuk dalam kurikulum. Kondisi ini tentu memunculkan kekhawatiran yang besar.

Tidak disadari, terdapat masalah dalam sistem pendidikan yang terus berjalan tanpa gangguan. Akibatnya, banyak lulusan perguruan tinggi yang lebih memilih mengikuti paradigma ilmu pengetahuan dari budaya negara lain daripada ilmu pengetahuan asli dari budaya Indonesia (Effendi, 2006).

(Effendi, H A M, 1995, *Falsafah Negara Pancasila*, Semarang; Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press bekerjasama dengan dengan CVCendekia)

Dalam situasi seperti ini, langkah yang terburu-buru dan dilakukan dengan tekad kuat harus diambil untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, terhadap Pancasila sebagai nilai yang penting bagi kemajuan Indonesia.

Menurut penelitian oleh Jenie (2006), terdapat banyak masalah etika kemanusiaan, lingkungan, dan sejumlah persoalan lain yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam situasi saat ini, era modern.

Tujuan asli dari etika keilmuan adalah untuk mendukung dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar bangsa kita dapat menjaga kedudukan dan martabatnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang selaras dengan agama dan budaya bangsa kita. Pelaksanaan etika keilmuan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menciptakan hasil atau karya yang baik melalui proses belajar, penelitian, penulisan, inovasi, serta menumbuhkan iklim yang kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Taniredja, dkk, 2014)

Menurut Budi Sutisna (2016), dalam mengembangkan ilmu di Indonesia, adalah penting untuk menggunakan nilai kebenaran Pancasila sebagai fondasinya. Dalam Pancasila, kebenaran ilmiah harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hal ini harus sesuai dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, rakyat, dan konsep keadilan. Dalam konteks praktis, kebermanfaatan ilmiah haruslah dikaitkan dengan kemanusiaan yang beragama, bersatu, bermasyarakat, dan berkeadilan.

c. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ipteks

Sebagai upaya untuk mencapai kemajuan dan modernisasi masyarakat, penting bagi semua bangsa di dunia, termasuk Indonesia, untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tidak dapat disangkal bahwa keahlian dan pengetahuan dalam Ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman modern dan globalisasi ini penting, namun, perlu diingat

bahwa penguasaan ilmu tersebut harus diimbangi dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual.

Bangsa Indonesia yang mengadopsi Pancasila sebagai landasan filosofis, tentu harus mengintegrasikan Pancasila sebagai pedoman dan batasan nilai moral dan spiritual dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, perkembangan ipteks akan membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia secara fisik dan mental. Berdasarkan pandangan Soegito dan rekan-rekannya (2003), fokus pada kemajuan material bukanlah tujuan yang akhir, melainkan harus didukung oleh pertimbangan aspek spiritual. Oleh sebab itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat memelopori pencapaian kebahagiaan dalam hal lahir dan batin. Agar ilmu pengetahuan yang adil dapat berkembang, penting untuk menerapkan pengelolaan sumber daya alam secara adil dan sebagai kepemilikan bersama bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang maksimal bagi seluruh rakyat, serta mencegah dominasi oleh individu atau kelompok yang memiliki modal.. (Sembiring dkk, 2012).

Individu yang memiliki kecerdasan dan kapabilitas dapat menjunjung tinggi inovasi dengan maksud untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan. Namun, niat dan tujuan mereka bukanlah untuk menyombongkan diri atau memperlihatkan keunggulan, tetapi untuk kemakmuran dan kebahagiaan umat manusia. Dalam upaya pengembangan iptek, sangat penting untuk sepenuh-

nya menghormati nilai dan kehormatan manusia agar pada akhirnya dapat mencapai dan mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

d. Nilai Moral Dalam Sila Sila Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Iptek

Pancasila memiliki peranan penting sebagai prinsip hidup dan ideologi negara, sehingga seharusnya menjadi landasan utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perlu dicatat bahwa setiap prinsip dalam Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan sebagai bangsa, negara, dan masyarakat. Dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat di seluruh dunia, seharusnya Pancasila menjadi panduan atau batasan dalam hal nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa kebahagiaan dalam aspek fisik dan mental bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Jacob (1986, dikutip Soegito, dkk, 2003) terdapat nilai nilaimoral yang terkandung dalam sila sila Pancasila yaitu :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah mengkomplementasikan Iptek dalam perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Maka sesungguhnya Iptek tidak hanya memikirkan tentang apa yang ditemukan, diciptakan dan dibuktikan tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diimbangi dengan

pelestariannya.

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah memberikan dasar moralitas bahwa pengembangan Iptek harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dari itu hakikat pengembangan Iptek harus didasarkan atas tujuan menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Iptek diciptakan bukan untuk suatu kesombongan dan keserakahan melainkan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Sila Persatuan Indonesia adalah mengkomplementasikan sifat universalitas dan internasionalisme (kemanusiaan) yang berkaitan dengan sila-sila yang lainnya. Pengembangan Iptek
4. seharusnya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluhuran bangsa Indonesia yang merupakan bagian umat manusia di dunia.
5. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, menjadikan landasan pengembangan Iptek harus dilakukan secara demokratis. Maknanya adalah setiap orang wajib mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya dalam mengembangkan dan menguasai Iptek. Namun makna kebebasan bukan berarti bebas yang tanpa batas, melainkan tetap terkait dengan norma dalam masyarakat. Etika keilmuan juga tetap menjadi pegangan dalam pe-

ngembangan Iptek. Setiap orang (ilmuwan) harus bersikap terbuka agar orang lain dapat kesempatan untuk menyampaikan kritik, mengkaji ulang serta membandingkan dengan yang lainnya sehingga hasil penembangannya bisa bermanfaat untuk orang banyak.

6. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan landasan bahwa pengembangan Iptek harus menciptakan keadilan bagi umat manusia. Maksudnya adalah agar adil untuk diri sendiri, bagi manusia hubungannya dengan Tuhan, bagi manusia dalam hubungannya manusia dengan manusia, bagi manusia dalam hubungannya manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta manusia dalam hubungan dengan lingkungan alam lingkungannya.

Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran di atas, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan Iptek akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia baik dalam waktu sekarang maupun di masa depan, meskipun terdapat tekanan kemajuan Iptek global yang berasal dari luar negeri.

Penilaian Pembelajaran

Untuk menilai pencapaian penguasaan materi, silahkan Andakerjakansoal berikut;

1. Apa tujuan dari etika keilmuan...
 - a. Menjaga kedudukan dan martabat bangsa.

- b. Mendukung dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
 - c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Menciptakan hasil atau karya yang baik
2. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai karakter keilmuan....
- a. Pancasila adalah dasar dalam pendidikan nasional
 - b. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia
 - c. Pancasila adalah nilai-nilai moral dalam IPTEK
 - d. Pancasila adalah karakter yang harus dimiliki oleh ilmu pengetahuan
3. Apa yang terjadi jika kurangnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai nilai yang penting bagi kemajuan Indonesia.....
- a. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap Pancasila
 - b. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan berkembang
 - c. Pancasila akan menjadi ideologi yang tidak relevan
 - d. Tidak ada masalah yang timbul
4. Apa hubungan antara kebenaran ilmiah dan nilai-nilai Pancasila.....
- a. Kebenaran ilmiah lebih penting daripada nilai-nilai Pancasila.

- b. Kebenaran ilmiah tidak terkait dengan nilai-nilai Pancasila
 - c. Kebenaran ilmiah harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila
 - d. Kebenaran ilmiah adalah tindak lanjut nilai-nilai Pancasila
5. Apa peran Pancasila dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia.....
- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. Mengarahkan agar tidak melenceng dari pandangan dan perilaku yang harus diterapkan oleh bangsa Indonesia
 - c. Menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
 - d. Menciptakan hasil atau karya yang baik
6. Apa yang harus menjadi dasar dalam pengembangan Ip-tek...
- a. Prinsip-prinsip moral dan spiritual
 - b. Rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa Indonesia
 - c. Pengelolaan sumber daya alam secara adil
 - d. Kemakmuran umat manusia
7. Apa tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi....
- a. Pengelolaan sumber daya alam secara adil
 - b. Kemajuan material

- c. Prinsip-prinsip moral dan spiritual
 - d. Mencapai kemakmuran dan kebahagiaan umat manusia
8. Apa yang harus menjadi panduan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi...
- a. Kemajuan material
 - b. Globalisasi
 - c. Pancasila
 - d. Kemakmuran rakyat
 - e. Terjadi keseimbangan antar agama
9. Apa yang harus didasarkan atas tujuan menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia...
- a. Pengelolaan sumber daya alam secara adil
 - b. Pengembangan Iptek
 - c. Kemajuan material
 - d. Prinsip-prinsip moral dan spiritual
10. Apa yang menjadi landasan filosofis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia...
- a. Pancasila
 - b. Kemakmuran umat manusia
 - c. Kemaslahatan dan mejunjung martabat manusia
 - d. Globalisasi

Kunci Jawaban

Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban berikut;

- | | |
|------|-------|
| 1. B | 6. B |
| 2. D | 7. D |
| 3. A | 8. C |
| 4. C | 9. B |
| 5. B | 10. A |

Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah memperoleh pemahaman tentang isi bab ini dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan, Anda dianjurkan untuk melanjutkan dengan membaca sumber-sumber lain yang terdapat dalam referensi.

Referensi

Effendi, H A M. (1995). Falsafah Negara Pancasila. Semarang; Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press bekerjasama dengan dengan CV Cendekia.

Sembiring, H.M. Tama, dkk. 2012. Filsafat dan Pendidikan Pancasila. Jakarta: Yatama Printing.

Soegito, dkk (2003). Pendidikan Pancasila. Semarang: UNES Semarang Press.

Sutisna, Budi. (2016). Dalam Teori Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu; jurnal filsafat vol 39 nomor 1 April 2016: 57-76. Jogjakarta: jurnal.ugm.ac.id.

Tukiran, dkk. (2019). Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa. Bandung: Alfabeta.

http://www.academia.edu/9438724/Pancasila_sebagai_Pembangunan_IPTEK

Daftar Istilah

Normative menurut norma	: berpegang teguh pada norma, atau kaidah yang berlaku (KBBI)
Koheren sehingga bagian	: tersusunnya uraian pandangan bagiannya berkaitan satu den- gan yang lainnya (KBBI).
Pragmatic lajari hubungan	: cabang linguistic yang mempe- lajari hubungan antara konteks luar Bahasa dan maksud tuturan (Wikiped- ia).
Global secara garis	: secara umum dan keseluruhan, besar (KBBI)

